



Prestasi

Bangsa

# **LAPORAN KINERJA**



DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN Tahun 2018 Terabaikan, Tertekan, Terbentur,
Tertempa dan akhirnya Terbentuk

**Pramono Anung Wibowo** 

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapaiannya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah diantaranya di bidang perekonomian.

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memiliki peran strategis dalam membantu Presiden dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet. Deputi Bidang Perekonomian pada Sekretariat Kabinet terus berupaya meningkatkan peran dalam memberikan kontribusi berupa rekomendasi kepada Presiden di bidang perekonomian.

Tahun 2018 merupakan tahun ke-3 struktur organisasi Sekretariat Kabinet mengalami penyempurnaan, dimana Deputi Bidang Perekonomian memiliki sasaran strategis yang berupaya mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah.

Berdasar hasil pencapaian fungsi manajemen kabinet di Deputi Bidang Perekonomian pada tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja, selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja tersebut dilaporkan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

# Kata Pengantar



Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman kepada Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 serta dokumen perencanaan turunannya.

Semoga laporan kinerja Deputi Bidang perekonomian tahun 2018 dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit

Dalam rangka memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian terhadap penyiapan rekomendasi terkait penyelenggaraan pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa/subtansi penyusunan RPUU, materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, pada tahun 2018 Deputi Bidang Perekonomian telah berhasil mewujudkan rekomendasi yang berkualitas (*outcome*) di bidang perekonomian sebanyak 757 laporan dengan *output* sebanyak 784 laporan dari target 685 laporan. Realisasi tersebut didukung oleh anggaran sebanyak Rp. 2484.000.000,- dengan capaian sebanyak Rp. 2.478.545.310 (99,78%).

Laporan evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada kedeputian bidang perekonomian yang dikeluarkan oleh inspektorat Sekretariat Kabinet Nomor: LHE-25/INSP/12/2018, tanggal 3 Desember 2018 memperoleh nilai sebesar 78,06 dengan katagori BB: Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen

# Ikhtisar Eksekutif

yang andal (Sangat Baik), dimana nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap evaluasi seluruh komponen manajemen kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian berupaya membangun networking, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan, dengan mengusulkan capacity building dan meningkatan kapasitas ketatalaksanaan dengan (mengusulkan) pengembangan sistem database bidang Perekonominan dan manajemen pengadministrasian persuratan dan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

# Daftar Ssi

Kata Pengantar i	<i>O1</i> Pendahuluan	1	<i>O2</i> Perencanaan Kinerja7
Ikhtisar Eksekutifii  Daftar Isiiii  Daftar Tabel & Gambariv	<ul><li>A. Profil Organisasi</li><li>B. Gambaran Aspek Stra</li><li>C. Tantangan dan Peluan</li></ul>	C	<ul><li>A. Gambaran Umum</li><li>B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja</li><li>C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama</li></ul>
<i>03</i>	40	<i>O4</i> Penutup	76
Akuntabilitas Kinerja  A. Capaian Kinerja	10	A. Dinamika	a Capaian Kinerja
<ul><li>B. Akuntabilitas Keuangan</li><li>C. Pelaksanaan Instruksi Presid</li></ul>	den No. 7 Tahun 2017	· ·	Langkah Strategis asi Capaian Kinerja
D. Survei Kepuasan Mitra Ker	ja Tahun 2018	D. Lampiran	







Tabel 2.1	Pagu Anggaran Kegiatan	(10)	Gambar 1.1	Peta Jabatan	(3)
Tabel 2.2	IKU Deputi Bidang Perekonomian	(11)	Gambar 1.2	Analisis SWOT	(5)
Tabel 3.1	_Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian	(13)	Gambar 2.1	Perencanaan Kinerja Tahun 2018	(8)
Tabel 3.2	Capaian Target VS Realisasi	(14)	Gambar 3.1	_Capaian Kinerja Tahun 2016 s.d. 2018	(15)
Tabel 3.3	Persentase Capaian Target VS Realisasi	(14)	Gambar 3.2	Infografis Hasil Survei	(66
Tabel 3.4	Gambaran IKK 1	(16)	Gambar 4.1	Rekapitulasi Capaian Kinerja	(70
Tabel 3.5	Gambaran IKK 2	(26)			
Tabel 3.6	Gambaran IKK 3	(34)			
Tabel 3.7	Matrik Tindak Lanjut Arahan Presiden	(52)			
Tabel 3.8	Tingkat Kepuasan Mitra Kerja	(65)			



# **Pendahuluan**

#### A. PROFIL ORGANISASI

Pada Tahun 2015, struktur organisasi Sekretariat Kabinet mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet sendiri merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Kabinet di dukung 6 (enam) unit kedeputian. Deputi Bidang Perekonomian merupakan salah satu unit Kerja Eselon I dari 6 (enam) kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### TUGAS



Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perekonomian







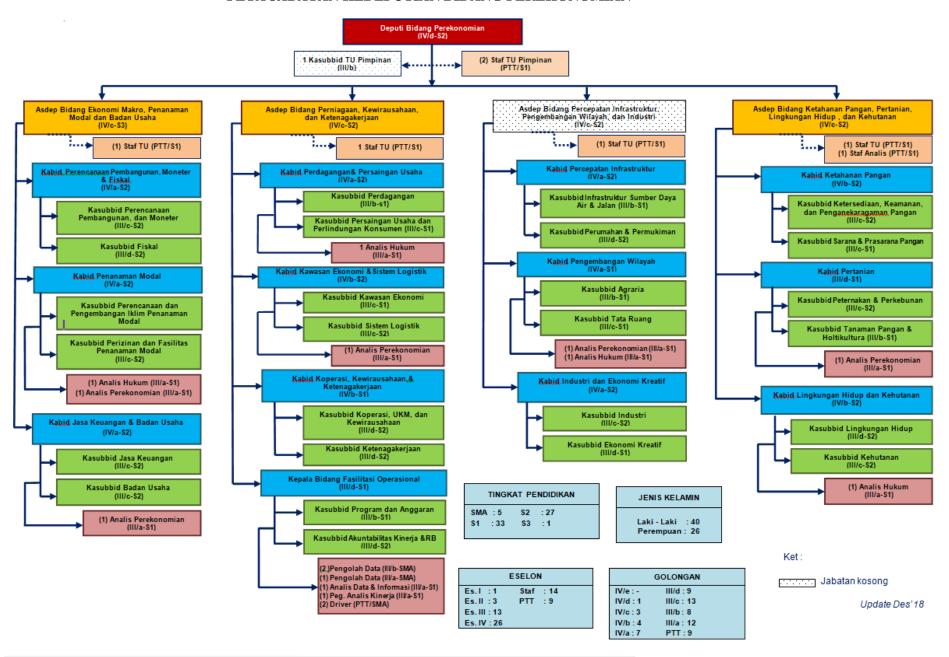
- 1. Perumusan & analisis atas rencana kebijakan & program pemerintah di bodang perekonomian;
- 2. Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
- 3. Pengawasan, pelaksanaan kebijakan & program pemerintah di bidang perekonomian;
- 4. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang perekonomian;
- 5. Penyiapan analisis & pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perekonomian, yang di pimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres;
- 6. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian, dan
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Deputi Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki 4 (empat) Bidang Unit Kerja Eselon II dengan jabatan Asisten Deputi, yaitu:

- Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha (Asdep Ekon 1);
- 2. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan (Asdep Ekon 2);
- 3. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri (Asdep Ekon 3);
- 4. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Asdep Ekon 4).

Adapun kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Perekonomian yaitu sebanyak 66 (enampuluh enam) personil yang terdiri dari 57 (limapuluh tujuh) ASN dan 9 (sembilan) pegawai tidak tetap, sebagaiman gambar 1.1 dalam peta jabatan Deputi Bidang Perekonomian sebagai berikut:

Gambar 1.1
PETA JABATAN KEDEPUTIAN BIDANG PEREKONOMIAN



#### **B. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS**

Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan manajamen kabinet, Deputi Bidang Perekonomian sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet memiliki peran yang strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet khususnya dalam menjalankan fungsi manaiemen kabinet di bidang perekonomian. Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapaiannya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah di bidang perekonomian. Peran dimaksud ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

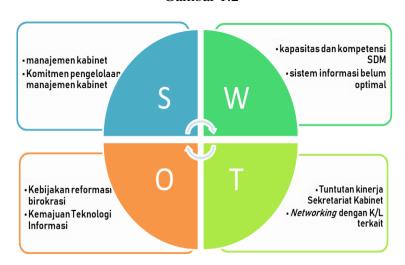
Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana rumusan Visi Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang perekonomian, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian hingga penyampaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang perekonomian; upaya deregulasi dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah.

Selain itu keterlibatan Deputi Bidang Perekonomian dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perekonomian.

Dalam rangka meningkatkan eksistensinya menghadapi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Deputi Bidang Perekonomian terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Deputi

Bidang Perekonomian berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:

Gambar 1.2



### C. TANTANGAN DAN PELUANG

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dan dalam upaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian, Deputi Bidang Perekonomian mengambil langkah-langkah dan keputusan yang strategis, antisipatif, inovatif, dan solutif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi maupun terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi yang sifatnya dinamis untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- 1. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi, melalui keikutsertaan dalam Panitia Antar Kementerian, dan berperan serta dalam rapat koordinasi Panitia Antar Kementerian. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah upaya mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan dan salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
- 2. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet melalui pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada arahan Presiden. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan,

arahan, keputusan dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden serta untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga.

- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan, dengan mengusulkan *capacity building* melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian, mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/workshop/fgd dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis; mengusulkan perlunya pengembangan jabatan fungsional baik dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian; dan mengusulkan penambahan SDM berdasarkan kebijakan yang ada.
- 4. Meningkatan kapasitas ketatalaksanaan dengan (mengusulkan) pengembangan sistem *database* bidang Perekonominan dan manajemen pengadministrasian persuratan dan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; penyusunan pedoman/panduan/petunjuk teknis pelaksanaan tugas

baik substansi maupun administrasi; dan sosialisasi dokumendokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan SOP).



# Perencanaan Kinerja

#### A. GAMBARAN UMUM

Proses penyusunan perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting dalam manajemen kinerja. Penrencanaan kinerja digunakan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan kinerja berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. **Tujuan proses perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk** *outcomes* atau manfaat.

Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Perekonomian tahun 2015-2019 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Perekonomian selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015-2019.

# **PERENCANAAN KINERJA 2018**

#### VISI



Menjadikan kedeputian yang profesional dan andal dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian

### MISI



Memberikan dukungan MANAJEMEN KABINET yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

### TUJUAN STRATEGIS

Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian



### INDIKATOR TUJUAN

persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dengan kategori nilai sangat baik (A)



## SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian



## INDIKATOR SASARAN

- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa & subtansi rancangan PUU di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh Presiden/Wapres di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris



#### **PROGRAM**

Dukungan pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden & Wapres dalam menyelenggarakan pemerintah di bidang perekonomian

# **DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

#### **B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA**

Didalam dokumen Renstra tersebut, dijabarkan juga target-target kinerja tahunan yang dalam perjalanannya mengalami revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Target kinerja tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Perekonomian tiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah tekad dan kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak pemberi amanah. PK berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Pada awal tahun 2018, Deputi Bidang Perekonomian telah menetapkan PK Deputi Bidang Perekonomian yang di dalamnya terdapat sasaran/program kegiatan dan IKU yang telah diselaraskan dengan IKU Sekretariat Kabinet yang telah disempurnakan sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik,

meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menyelaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet.

Seperti yang di jelaskan pada infografis perencanaan kinerja Deputi Bidang Perekonomian diatas, sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan utama dengan hanya 1 (satu) program, yang harus dilaksanakan oleh masingmasing Asisten Deputi yang ada di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, yaitu:

- Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
- Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
- Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri;
- 4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan;

Sekretariat Kabinet dalam penyusunan PK telah menggunakan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu) dan *hardcopy* yang telah ditandatangani di cetak ke dalam buku.

Sementara itu, rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputi Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pagu Anggaran Kegiatan Tahun 2018 (setelah optimalisasi\*)

KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp. 594.000.000,-
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp. 702.000.000,-
Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp. 594.000.000,-
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp. 594.000.000,-

**TOTAL ANGGARAN** 

Rp.2.484.000.000,-

\*Optimalisasi : digunakan untuk pembayaran tambahan tunjangan kinerja pejabat/pegawai di lingkungan Setkab

Setelah menentukan sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2018, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan indikator kinerja yang ditargetkan selama Tahun 2018.

#### C. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa IKU Deputi Bidang Perekonomian mengalami perubahan dengan menyelaraskan dari revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Tabel 2.2 IKU Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	IKU
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di	a. <i>Persentase</i> rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian yang <b>disetujui</b> oleh Sekretariat Kabinet
Bidang Perekonomian	b. <i>Persentase</i> rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian yang <b>disetujui</b> oleh Sekretaris Kabinet
	c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang <b>disetujui</b> Sekretaris Kabinet

Pengertian "disetujui" adalah apabila Sekretaris Kabinet **menyetujui/merespon memorandum** rekomendasi kebijakan dari Deputi Bidang Perekonomian.

Ketiga *core business* tersebut diukur menggunakan formulasi pengukuran persentase sebagai berikut:

Jumlah Rekomendasi yang disetujui

X 100%

Jumlah Rekomendasi yang disampaikan

# 03

# **Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini memberikan informasi akuntabilitas kinerja yang mencakup keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (outcome) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Perekonomian.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Deputi Bidang Perekonomian secara berkelanjutan pada tahun—tahun berikutnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018 dalam rangka mendapatkan gambaran tingkat pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian, kegiatan analisis menggunakan capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Deputi Bidang Perekonomian terbatas pada pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian, Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian hanya melaporkan hal-hal yang bersifat strategis, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II dibawahnya.

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian merupakan indikator yang berdasar dan tercakup dalam PK Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018 dan yang merupakan IKU Deputi Bidang Perekonomian sebagaimana ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2018.

Capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian diukur dengan membandingkan target dengan realisasi dari IKU sasaran Deputi Bidang Perekonomian, dimana Deputi Bidang Perekonomian telah menghasilkan *outcome* sebanyak 757 berkas rekomendasi

disampaikan dan disetujui dan direspon oleh Sekretaris Kabinet dengan target 685 rekomendasi.

Tabel 3.1 Capaian Output Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018

	Targ	et	Realis	Realisasi	
IKK	Pagu	Output	Pagu	Output	
	(Rp)	(Laporan)	(Rp)	(Laporan)	
Jml	2.484.000.000	743	2.478.545.310	817	
1	1.961.266.000	465	1.956.815.261	488	
2	120.726.000	70	120.530.000	78	
3	300.358.000	150	299.550.049	191	
FO	101.650.000	58	101.650.000	58	

Adapun capaian kinerja Fasilitasi Operasional adalah unit yang melakukan dukungan terhadap kegiatan internal di lingkungan Deputi Bidang perekonomian, dimana sebanyak Rp. 85.350.000,-digunakan untuk pelaksanaan rapat kerja Sekretariat Kabinet di Bandung tanggal 23 s.d. 25 Februari 2018. Pada kesempatan tersebut Deputi Bidang Perekonomian mendapatkan penghargaan penampilan terbaik dari 6 (enam) kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan berikut tabel capaian (non-FO) dari Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2018.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja & Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Target (kuantitas) vs Realisasi Tahun 2018

Target			Realisasi		
IKK	Pagu (Rp)	Output (Laporan)	Pagu (Rp)	Capaian Output (Laporan)	
Jml	2.382.350.000	685	2.478.545.310	757	
1	1.961.266.000	465	1.956.815.261	488	
2	120.726.000	70	120.530.000	78	
3	300.358.000	150	299.550.049	191	

Tabel 3.3
Persentase Capaian Kinerja & Anggaran
Deputi Bidang Perekonomian
Target (100%) vs Realisasi
Tahun 2018

IKK	Pagu (Anggaran)	Outcome (Laporan)
Average	99,78%	97,44%
1	99,77%	95,87%
2	99,84%	97,50%
3	99,73%	98,96%

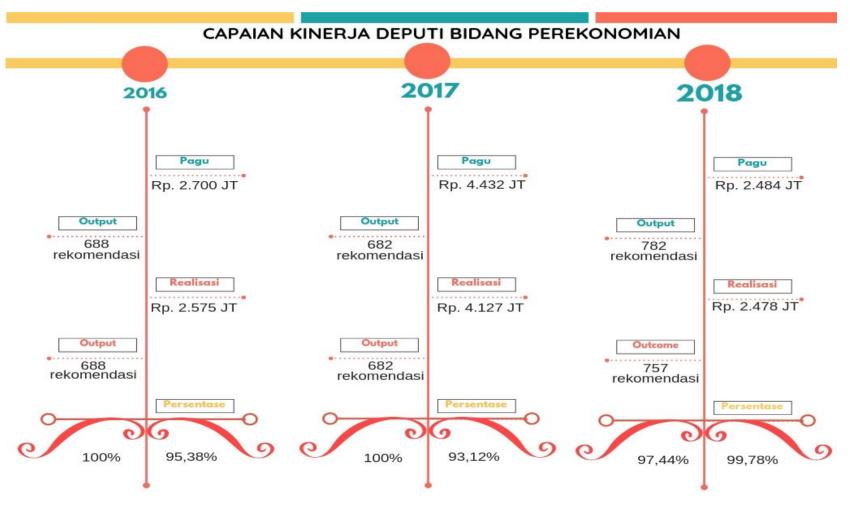
#### **B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA**

Seperti telah dijelaskan pada Bab II bahwa bahwa pada indikator kinerja yang terdapat pada PK Tahun 2018 telah diubah, semula frasa ditindaklanjuti diubah menjadi disetujui. Selain itu, pada Tahun 2016 Indikator Kinerja rekomendasi kebijakan diubah menjadi rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun target capaian kinerja adalah 100% sehingga walaupun secara jumlah penghitungan outcome melebihi target outcome, namun mengacu pada rumus maka persentase tidak mungkin lebih dari 100%.

Adapun pada tahun 2018 tercapai 97,44% mengingat berkas yang naik ke pimpinan sebanyak 2,55% berkas belum turun kembali sampai bulan Desember 2018, sehingga berkas tersebut masih di hitung *output* pada tahun 2018.

Pada gambar 3.1 sebagai penjelasan keseluruhan capaian bahwa walaupun tahun 2018 tidak tercapai 100% namun jumlah pencapaian rekomendasi lebih besar daripada tahun 2016 dan 2017 serta melebihi dari jumlah yang ditargetkan dimana perbedaan kualitas penghitungan pada tahun 2016-2017 dengan tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa capaian di tahun 2018 lebih baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.1



Keterangan: Pada tahun 2016 dan 2017 penghitungan masih berdasar *output* = *outcome* karena belum ada *tools* untuk menghitung secara akurat. Pada tahun 2018 triwulan III dan IV, hasil rekomendasi atas penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi dan sesuai dokumen IKU 2018, dimana capaian kinerja harus berdasarkan *outcome*, maka FO Deputi Bidang Perekonomian membuat inovasi berupa kertas kerja penghitungan *output* dan *outcome* yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai lampiran pada SIKT.

# Tabel 3.4 Gambaran Indikator Kinerja Kegiatan 1 (Tusi 1, 2, 3, & 6)

## Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian

NO	SUBTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
1.	Penghematan Belanja Barang Kementerian/ Lembaga (K/L) Pagu Anggaran Tahun 2019	Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada tanggal 18 Juli 2018 mengenai Pagu Anggaran Tahun 2019 agar Menteri dan Pimpinan Lembaga melakukan penghematan belanja barang sesuai perhitungan Menteri Keuangan, muncul permintaan penyusunan Inpres untuk mengawal pelaksanaan penghematan belanja barang tersebut.	Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juli 2018 yang menghasilkan 4 (empat) keputusan yaitu:  1. Tidak diperlukan instrumen khusus berupa Instruksi Presiden;  2. Penghematan belanja barang K/L agar dilakukan dengan memperhatikan pencapaian target prioritas tahun 2019 serta pencapaian target RPJMN 2015-2019;  3. Pembahasan atas pemanfaatan penghematan belanja barang K/L dalam forum trilateral meeting agar memperhatikan arahan Presiden dalam rangkaian rapat-rapat kabinet terkait penyusunan RKP 2019 dan RAPBN TA 2019;  4. Dalam hal terjadi pergeseran besaran penghematan belanja barang K/L dan perubahan rencana pemanfaatannya dari yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018, Menteri agar menyampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	Kebijakan yang diambil Pemerintah terhadap penyusunan APBN 2019:  1. Tidak tersusunnya Inpres mengenai penghematan pelaksanaan penghematan belanja K/L tahun 2019; dan  2. pemanfaatan Penghematan belanja barang K/L APBN tahun 2019 dilakukan dengan berdasarkan pada capaian target output 2019 sebagaimana arahan Presiden yang disampaikan dalam surat Sekretariat Kabinet tanggal 24 Juli 2018.

NO	SUBTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
2.	Evaluasi Online Single Submission (OSS)	Dalam Rapat Terbatas tentang Peningkatan Investasi dan Perdagangan pada tanggal 5 Januari 2018, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meneruskan deregulasi peraturan dan kepada seluruh pimpinan K/L untuk mendukung pelaksanaan Online Single Submission (OSS) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha.	Sebagai tindak lanjut arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet turut aktif dalam mengawal Arahan Presiden dengan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan, yaitu:  1. Rapat Pra Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, tanggal 18 April 2018;  2. Rapat Pembahasan RPP OSS. Pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018), Sekretariat Kabinet aktif dalam melakukan pemantauan implementasi PP Nomor 24 Tahun 2018 di daerah. Pemantauan evaluasi OSS dilakukan di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, DKI Jakarta, dan Kota Surabaya.  Setelah melaksanakan evaluasi di daerahdaerah tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 24 Oktober 2018 untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan OSS. Rapat tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut:  1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mempercepat penyelesaian permasalahan implementasi sistem OSS; dan  2. Percepatan penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.	Sebagai tindak lanjut terhadap kesepakatan rapat di Sekretariat Kabinet tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem OSS yaitu sebagai berikut:  1. Penyempurnaan sistem OSS dengan membangun sistem OSS versi 1.1;  2. Mempercepat keterhubungan sistem OSS di daerah;  3. Mempersiapkan sosialisasi dan bimbingan teknis secara terpadu;  4. Menambahkan beberapa fitur dalam sistem OSS diantaranya pada saat NIB terbit pelaku usaha akan diberitahukan langkahlangkah penyelesaian komitmen dan kepada instansi mana komitmen tersebut harus diurus; dan  5. Mendorong penerbitan NSPK di Kementerian/ Lembaga/Daerah.
3.	Penyampaian Hibah dan Audiensi Japan International Halalan Thaiban Union Kepada Presiden	Presiden Japan International Halalan Thaiban Union (JIHTU), Sdr. Idrisno Madjid dan ahli waris dana hibah, Sdr. Onodera Masataka kepada Presiden menyampaikan hibah dari masyarakat Jepang dan permohonan audiensi dengan Presiden untuk	Terhadap permohonan dimaksud, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bapenas yang intinya agar permohonan penyampaian hibah dapat dikaji dari sisi keabsahan dokumen obligasi dan peraturan perundang-undangan.	Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet berpendapat yaitu: Rencana hibah dimaksud tidak perlu dipertimbangkan untuk diterima; Ke depan diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti penyampaian dana hibah pribadi yang serupa.

NO	SUBTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		menyerahkan hibah sebanyak 50 lembar obligasi yang setiap obligasinya bernilai ¥500 miliar (atau sekitar ± 3.000 triliun).	Kementerian Keuangan merespon surat Sekretariat Kabinet dengan menelusuri validitas dokumen obligasi dimaksud melalui Kementerian Luar Negeri c.q. KBRI Tokyo yang melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kementerian Keuangan Jepang. Dari hasil koordinasi tersebut disampaikan bahwa:  1.  Kementerian Luar Negeri Jepang meragukan keabsahan dokumen salinan Sertifikasi Obligasi seri 57 No. "A0977";  Kementerian Keuangan Jepang tidak pernah mengeluarkan sertifikat sejenis dan sertifikat dimaksud tidak memiliki dasar hukum dalam pengeluarannya;  Salinan sertifikat obligasi seri 57 yang disampaikan Sdr. Onodera Masataka memiliki kesamaan dengan contoh sertifikat palsu sebagaimana rilis pernyataan pers Kementerian Keuangan Jepang tahun 2011.  Dengan demikian, Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan sertifikat obligasi	
4.	Perjanjian Perdagangan Internasional	Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa setiap perjanjian Perdagangan Internasional harus disampaikan kepada DPR paling lama 90 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR.  Saat ini, terdapat 6 (enam) Perjanjian Perdagangan Internasional yang saat ini penyelesaian ratifikasinya tertunda di DPR.	dimaksud adalah palsu.  Atas tertundanya penyelesaian ratifikasi sejumlah perjanjian perdagangan internasional tersebut, Sekretaris Kabinet telah meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar dapat mengoordinasikan penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional tersebut termasuk mengkaji perlunya instrumen hukum (Perpres) untuk mengatur mekanisme dan tata kerja pemerintah dalam proses praratifikasi pasca berlakunya UU Perdagangan (Surat Nomor: B.525/Seskab/20/2017 tanggal 12 Oktober 2017).  Sehubungan dengan terhambatnya	Pada tanggal 31 Oktober 2018, Presiden telah menyelenggarakan Rapat Internal dengan Menteri Perdagangan dan Sekretaris Kabinet yang salah satunya membahas isu penyelesaian ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional yang penyelesaiannya terhambat di DPR. Dalam Rapat Internal tersebut Presiden memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan dan Sekretaris Kabinet agar penyelesaian masalah tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  Melaksanakan arahan Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah

NO	SUBTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) UU Perdagangan memberikan batasan 60 hari kepada DPR untuk memberikan keputusan, apakah perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah akan diratifikasi dengan undang-undang atau dengan Perpres. Selanjutnya, jika dalam waktu 60 hari DPR tidak mengambil keputusan, maka Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR. Kemendag bersama dengan K/L terkait telah melakukan pertemuan konsultasi dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat, konsinyering, dan Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR sejak Agustus 2015 hingga September 2018, termasuk 2 (dua) kali mengirimkan surat pada bulan Desember 2016 dan Agustus 2017, namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban/ putusan dari DPR.	penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional (DPR tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu 60 hari), dan memperhatikan tidak efektifnya pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet memberikan arahan/direktif agar penyelesaian masalah ini dibahas melalui Rapat Terbatas untuk mengatasi berlarutnya proses ratifikasi sejumlah perjanjian/protokol perdagangan internasional pasca berlakunya UU Perdagangan.  Arahan Presiden sangat diperlukan mengingat proses penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional terkait dengan hubungan antara dua lembaga negara (eksekutif dan legislatif), yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pejabat setingkat Menteri dan arahan Presiden juga akan menjadi acuan kementerian/lembaga dalam penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional selanjutnya.	menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada tanggal 7 November 2018 yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet (diwakili oleh Deputi Bidang Perekonomian), Menteri Sekretaris Negara (diwakili), dan Menteri Luar Negeri (diwakili) yang menyepakati bahwa Pemerintah akan segera menetapkan Perpres mengenai ratifikasi atas 7 (tujuh) perjanjian perdagangan internasional.
5.	Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan TKA	Sebagai tindak lanjut penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA), Deputi Bidang Perekonomian aktif melakukan pemantauan untuk memastikan agar implementasi Perpres TKA tersebut dapat berjalan dengan baik.	Kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Perekonomian untuk memantau pelaksanaan atau implementasi Perpres TKA antara lain dilakukan dengan terlibat aktif dalam penyusunan Tim Pengawas Penggunaan TKA yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta mengawal penyusunan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 dan Permenkum Nomor 16 Tahun 2018 yang merupakan peraturan pelaksana Perpres TKA.  Monitoring atas implementasi Perpres TKA, juga dilaksanakan terkait mekanisme pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).	Hasil rapat di Sekretariat Kabinet tersebut selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet dengan Surat Nomor: B.523/Seskab/Ekon/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk dapat segera ditindaklanjuti.

NO	SUBTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
			Berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan, belum ada kesepahaman antar kementerian dan pemerintah daerah provinsi terkait pembayaran DKPTKA tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Deputi Bidang Perekonomian menyelenggarakan rapat guna membahas permasalahan tersebut yang dihadiri oleh para pejabat yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara.	
6.	PT. Cisco System Indonesia menyambut baik bekerjasama dengan pemerintah	PT. CISCO System Indonesia kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet tanggal 18 September 2018, menyampaikan sambutan baik untuk bekerjasama dengan Pemerintah. PT. CISCO System Indonesia menantikan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam bidang pemerintahan digital, industri digital, BUMN digital, inklusi digital dan cybersecurity. PT. CISCO System Indonesia yakin bahwa PT. CISCO System Indonesia yakin bahwa PT. CISCO System Indonesia akan mampu membantu mempercepat pertumbuhan Indonesia dalam bidang ekonomi digital melalui pelayanan publik yang lebih baik dan penciptaan inovasi lokal, dengan tetap memastikan bahwa kemampuan cybersecurity akan berjalan selaras dengan penggunaan teknologi digital. PT. CISCO System Indonesia melalui Networking Academy telah melatih lebih dari 212.000 siswa di Indonesia, melalui kontribusi dalam bentuk alat, sumber daya, dan instruktur. Total 212.000 siswa ini merupakan partisipasi siswa Networking	Keamanan siber, merupakan salah satu pilar penting yang harus diperhatikan karena pergerakan di dunia pelayanan online sangat tinggi. Sayangnya, oleh sebagian pihak, masalah keamanan siber dianggap bukan masalah penting atau utama, oleh karena itu, perlunya tindakan-tindakan preventif maupun defensive. Pasalnya, tindakan-tindakan itu tidak hanya bisa melindungi negara, namun juga warga negara, dari berbagai aksi kejahatan siber. Indonesia merupakan pasar potensial bagi bisnis keamanan informasi dan siber karena rawan terhadap serangan siber, seperti malware, ransomware, atau aksi penyalahgunaan teknologi lainnya, misalnya hacking dan pencurian data. Teknologi internet kini telah berkembang pesat dan digunakan oleh seluruh sektor industri. Hal ini membentuk cyber security sebagai aspek penting karena memberikan proteksi atas jaringan, komputer serta data para penggunanya.  Perekonomian Indonesia sedang bertransformasi menjadi ekonomi digital, seiring dengan tren yang terjadi saat ini dan juga meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah berikut tenaga kerja muda yang	Sekretaris Kabinet meneruskan surat no B-473/Seskab/Ekon/10/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), guna menyampaikan hal tersebut untuk dikaji sesuai dengan bidang tugasnya yang isinya PT. CISCO System Indonesia menawarkan menyiapkan penyambutan kunjungan ke kantor CISCO di San Jose untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai gambaran dan implementasi bagaimana digitalisasi dan inovasi dalam cybersecurity dan Internet of Things dapat menciptakan peluang perubahan bagi Indonesia.

NO	SUBTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
7.	Masukan kadin batam	Academy terbesar kedua di kawasan ASEAN.  Kamar Dagang dan Industri Kota	mahir teknologi. Pemerintah harus menyediakan platform yang andal dan merumuskan peraturan untuk memastikan bahwa ekonomi digital mematuhi standar keamanan dunia maya serta memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat.  Pemerintah tetap konsisten untuk	Sekretaris Kabinet meneruskan surat no B-
	tentang kebijakan terkaitan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di kota Batam	Batam (KADIN Batam) menyampaikan kajian kebijakan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam kepada Sekretaris Kabinet. Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) yang telah dinikmati dan menjadi bagian dari seluruh masyarakat Batam, sehingga perubahan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak menjadi rekomendasi. Dualisme kewenangan dan tumpang tindih pengelolaan tata ruang antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam mengenai lahan. Penerapan KEK di Batam akan berdampak pada kenaikan harga barang, termasuk tarif jasa dan penguasaan lahan secara tidak sah (rumah liar) dan pemindahannya jika lahan yang dikuasai secara tidak sah sudah dialokasikan kepada pihak lain (biasanya perusahaan).	mempertahankan sistem KPBPB/FTZ Batam, dan tidak merubahnya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah melakukan evaluasi regulasi yang menghambat kegiatan dan lalu lintas barang serta menambahkan fasilitas lainnya yang meningkatkan daya tarik investor ke Batam sebagai KPBPB/FTZ Batam sesuai aturan perundang-undangan. Pemerintah dapat melakukan harmonisasi dan penyelarasan struktur pemerintahan, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh pasal 21 Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mengatur hubungan kerja antara pemerintah Kota Batam dengan Badan Otorita Batam (BP Batam), guna menyelesaikan dualisme kewenangan yang berhimpitan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam.  Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 12 Desember 2018 memberikan arahan agar pengelolaan Pulau Batam dilakukan oleh Walikota Batam yang merangkap ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang mana saat	2/Seskab/Ekon/1/2019 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai bahan telaah lebih lanjut yang isinya Mempertimbangkan kajian KADIN dimaksud memiliki substansi yang berkaitan dalam proses penyelesaian permasalahan dualisme di Batam yang sedang dalam proses penanganan sesuai dengan Arahan Presiden dan mengingat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan, kami berpandangan kiranya kajian KADIN dimaksud dapat diteruskan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bahan telaah lebih lanjut.

NO	SUBTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
			ini RPP dimaksud dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
8.	Permohonan Dukungan Pembangunan Aren	Deputi Perekonomian dengan Surat Nomor B-46/Ekon/1/2018, tanggal 23 Januari 2018 telah meneruskan surat permohonan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.  Terhadap Surat Deputi Perekonomian tersebut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Surat Nomor S.27/PSKL/PKPS/PSI.0/2/ 2018, tanggal 6 Februari 2018. Deputi Perekonomian melalui Memo Nomor M.121. 14 Februari 2018 melaporkan kepada Sekretaris Kabinet yang intinya akan mengawal proses tersebut dengan melakukan kegiatan mengundang rapat pihak terkait dan melakukan pemantauan ke daerah.	Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mewakili Deputi Perekonomian tanggal 3 Agustus 2018 mengadakan rapat tanggal 3 Agustus 2018 mengundang k/l terkait dengan permohonan tersebut, dengan kesepakatan bahwa akan diadakan tinjauan lapangan.  Tanggal 23-25 Agustus, tim dari Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mewakili Deputi Perekonomian melakukan kunjungan ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan.	Melalui memorandum nomor M-682, tanggal 13 September 2018 Deputi Perekonomian melaporkan hasil temuan tim dan tindaklanjut kunjungan lapangan yakni adanya Perda Pemprov nomor 10 Tahun 2018 yang berpotensi menghambat keluarnya 26 surat ijin pengelolaan hutan di Provinsi Riau.  Melalui Surat Nomor b-449 tanggal 17 September 2018, Sekretaris Kabinet meneruskan hasil temuan tersebut Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera dikaji dan dilaporkan kepada Presiden.
9.	Permohonan Kesediaan Presiden Untuk Membuka Acara Indonesia Industrial Summit (IIS) 2018 Dan Melakukan Lauching Roadmap Implementasi Revolusi Industri 4.0.	Menteri Perindustrian (Menperin) kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) dengan surat Nomor 187/M-IND/3/2018, tanggal 19 Maret 2018 menyampaikan permohonan kesediaan Presiden untuk membuka acara Indonesia <i>Industrial Summit</i> (IIS) 2018 dan melakukan <i>Lauching Roadmap</i> Implementasi Revolusi Industri 4.0.	Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Perekonomian berpendapat bahwa seyogyanya Presiden dapat menghadiri kegiatan dimaksud pada kesempatan pertama, mengingat dengan adanya acara IIS 2018 dimaksud dijadikan momentum atau <i>starting point</i> kepada setiap pihak untuk mempunyai kesepahaman dalam pola pikir dan cara bertindak guna menghadapi era digitalisasi teknologi di semua lini dan sesuai dengan	Presiden Jokowi didampingi Menperin dan Sekretaris Kabinet menghadiri Pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran "Making Indonesia 4.0", di Cendrawasih Hall, JCC Senayan, Jakarta, pada Hari Rabu tanggal 4 April 2018.

NO	SUBTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
			arahan Presiden.	
10.	Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Arahan Presiden pada tanggal 5 Februari 2018 dalam Rapat Terbatas yang membahas Perkembangan Kebijakan Satu Peta, Presiden menyutujui usulan Menko Bidang Perekonomian bahwa data statistik sektor sosial, ekonomi, demografi, dan lainnya ada di Kementerian/Lembaga (K/L) agar dimasukan ke dalam kebijakan satu peta.		Pada tanggal 16 Agustus 2018, setelah paripurna proses pembubuhan dan penyempurnaan materi, Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan penetapan RKeppres tersebut kepada Presiden dimana memuat keputusan terkait:  1. Pemegang akses untuk berbagi data informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional terdiri atas: Presiden dan Wakil Presiden; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kepala Badan Informasi Geospasial; Menteri atau pimpinan lembaga; Gubernur; dan Bupati/Wali Kota.  2. Klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi data informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional, berupa: Mengunduh, Melihat, dan Tertutup.  Dengan ditandatanganinya Rkepres oleh Presiden pada 21 Agustus 2018, maka RKepres tersebut resmi ditetapkan menjadi Kepres dengan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
			akses untuk Mengunduh dan Melihat.  Terhadap masukan Menteri PPN/Kepala	
			Bappenas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dengan	

NO	SUBTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
11.	Tindak lanjut arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani	Dalam rangka mengawal tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2017 tentang Mengkorporasikan Petani, sejak akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan kegiatan pemantauan ke beberapa lokasi rintisan korporasi petani, yaitu di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu Jawa Barat.	Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan disampaikan bahwa pada prinsipnya Menko Bidang Perekonomian menyetujui usulan penambahan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai salah satu pihak yang juga memiliki kewenangan akses untuk Mengunduh dan Melihat. Dengan demikian, masukan tersebut diakomodasi dalam RKeppres.  Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pemantauan ketiga lokasi yang dilakukan pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 tersebut kemudian dilaporkan oleh Deputi Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet. Inti dari laporan tersebut adalah bahwa peranan sektor swasta dalam rangka mewujudkan korporasi petani yang berskala ekonomi tinggi sangat diperlukan sebagaimana praktek rintisan korporasi petani di Tasikmalaya. Selain itu untuk mewujudkan skala ekonomi yang besar dengan pengelolaan lahan sawah seluas ± 5000 Ha melalui mekanisme konsolidasi lahan, sangat bergantung pada kontur tanah dan budaya masyarakat setempat.  Untuk memperdalam kajian yang dilakukan, maka dilakukan pemantauan lanjutan untuk melihat implementasi rintisan korporasi petani wilayah Kabupaten Magelang Jawa Tengah pada akhir Januari 2018. Selanjutnya, untuk melaporkan hasil kajian atas keseluruhan rangkaian pemantauan yang telah dilakukan, Deputi Bidang Perekonomian menyampaikan memo kepada Sekretaris Kabinet melalui memo Nomor M.235, tanggal 2 April 2018.	Memo laporan kajian tersebut dikirimkan melalui Surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian Pertanian Nomor B.146, tanggal 5 April 2018, perihal Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani Inti dari kajian adalah bahwa untuk mewujudkan korporasi pertanian sesuai arahan Presiden dalam Ratas tentang mengkorporasikan petani. Terdapat beberapa upaya yang masih perlu dilakukan oleh Kementerian Pertanian antara lain:  a. Membuat model bisnis korporasi petani sebagai pilot project untuk selanjutnya dapat direplikasi di beberapa tempat;  b. Memfasilitasi kemitraan antara swasta sebagai off taker dan avails dengan petani sebagai penyedia bahan baku;  c. Percepatan integrasi kartu tani;  d. Akses pembiayaan perbankan melalui KUR.

NO	SUBTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
12.	Focus Group Discussion "Implementasi Rewetting, Revegetation, dan Revitalitation Livelihood (R3) dalam Pengelolaan Lahan Gambut di 7 Provinsi"	Sekretariat Kabinet khususnya Deputi Bidang Perekonomian menjadi anggota Tim Pengarah Teknis BRG. Dengan Peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan gambut adalah mengawal perumusan kebijakan implementasi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan yg dilakukan oleh BRG sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang BRG.  Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawal arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Restorasi Gambut tanggal 11 Januari 2017, Sekretariat Kabinet telah mengadakan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) "Implementasi Rewetting, Revegetation, dan Revitalitation Livelihood (R3) dalam Pengelolaan Lahan Gambut di 7 Provinsi" pada tanggal 6 April 2018 dengan narasumber Prof. Dr. Ir. H. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dari Institut Pertanian Bogor.	FGD tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi konsep R3 yang diberlakukan dalam pengelolaan gambut, mengidentifikasi implementasi konsep R3 di lapangan, dan mengidentifikasi permasalahan umum restorasi lahan gambut dan penerapan R3.  Setkab pada tanggal 6 Agustus 2018 menyelenggarakan rapat koordinasi progres pelaksanaan restorasi gambut yang dihadiri oleh Deputi Bidang Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan BRG, Deputi Bidang Edukasi Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan BRG, dan Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Rapat koordinasi (rakor) bertujuan untuk mengetahui capaian terkini (per Agustus 2018) dari pelaksanaan restorasi gambut di 7 provinsi prioritas beserta kendala yang dihadapi hingga di tingkat tapak. Selain itu, untuk mengetahui progres tindak lanjut arahan Presiden yang disampaikan dalam Rapat Terbatas maupun Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Presiden mengenai restorasi gambut dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).	Rakor membahas progres pelaksanaan restorasi gambut oleh BRG dan disampaikan bahwa menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla sebagai upaya persiapan Asian Games.  Tahun 2018, BRG dengan Badan Geologi dan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Prov. Sumatera Selatan telah melakukan upaya untuk meminimalisir potensi karhutla di Prov. Sumatera Selatan.  Melalui Presiden dengan nomor memo M.921 tanggal 17 Agustus 2018, Setkab mendorong agar menteri LHK mempercepat penyelesaian penyusunan rencana kerja pengelolaan gambut yang akan dilakukan sebagai pedoman perusahaan HTI.

## Tabel 3.5 Gambaran Indikator Kinerja Kegiatan 2 (Tusi 4)

## Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perekonomian

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
1.	Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas kepada Presiden mengajukan permohonan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (RPerpres RKP 2019).  RPerpres RKP 2019 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.RPerpres tersebut juga merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa rancangan akhir RKP diatur dengan Peraturan Presiden.	Terhadap permohonan dimaksud, Sekretariat Kabinet meneliti dan memberikan masukan atas draf RPerpres RKP 2019 beserta lampirannya, melalui beberapa forum rapat antara lain:  1. Tanggal 23 Mei 2018 di Kementerian PPN/Bappenas.  Sekretariat Kabinet antara lain mengusulkan kepada Kementerian PPN/Bappenas agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan diikutsertakan dalam rapat pembahasan RKP Tahun 2019, yang kemudian ditindaklanjuti Kementerian PPN/Bappenas dalam rapat berikutnya tanggal 5 Juni 2018 dengan turut mengundang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.  2. Tanggal 5 Juni 2018 di Kementerian PPN/Bappenas.  Sekretariat Kabinet memberikan masukan substantif dan teknik penyusunan perundang-undangan untuk RPerpres RKP 2019, termasuk kemungkinan memasukkan informasi mengenai Pagu Anggaran Kementerian/ Lembaga dan tidak memasukkan RKP on the map yang menampilkan lokasi Proyek Prioritas hingga level kabupaten/kota dalam Lampiran RPerpres RKP 2019 karena akan berimplikasi pada penambahan jumlah halaman RPerpres.	RPerpres RKP 2019 telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 24 Agustus 2018 dan ditetapkan sebagai Perpres Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

				DEVOMENDACI
NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI
				(OUTCOME)
2.	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018	Dengan berakhirnya Master Agreement between The Government of	Sekretariat Kabinet ikut mendorong proses penyusunan Perpres dengan terlibat	Rperpres tersebut ditetapkan oleh Presiden menjadi Peraturan Presiden Nomor 73
	tentang Pengakhiran	The Republic of Indonesia and The	dalam beberapa kegiatan yang mengkaji tentang	Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan
	Tugas dan Pembubaran	Investor for Asahan Hydroelectric and	pengakhiran tugas dan pembubaran badan	Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan
	Badan Pembina Proyek	Alumunium Project dan telah	Pembina proyek asahan, pengalihan barang	dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan
	Asahan dan Otorita	dialihkannya aset tanah Otorita Asahan	milik negara yang dimiliki oleh otorita asahan,	pada tanggal 31 Agustus 2018.
	Pengembangan Proyek	kepada Indonesia, maka tugas Otorita	dan status karyawan pada otorita asahan.	
	Asahan	Asahan dipandang telah selesai dan perlu	Pada tanggal 2 Mei 2018 Sekretariat	
		dilakukan pengakhiran tugas serta	Kabinet menyelenggarakan rapat pembahasan	
		pembubarannya. Untuk itu Menteri	RPerpres yang dihadiri oleh wakil dari	
		Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang	
		menyampaikan permohonan agar Presiden menyetujui penyusunan Rancangan	Perekonomian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kementerian	
		Peraturan Presiden tentang Pengakhiran	Negara (DJKN), dan Kementerian Perindustrian. Dalam rapat tersebut membahas	
		Tugas dan Pembubaran Badan Pembina	dan menyepakati perubahan rumusan RPerpres	
		Proyek Asahan dan Otorita	dengan pertimbangan agar Kementerian	
		Pengembangan Proyek Asahan.	Keuangan dapat menelusuri keseluruhan aset	
		1 engembangan 1 toyek Asanan.	diluar yang telah tercatat di Kementerian	
			Perindustrian, dan terdapat perbedaan jumlah	
			aset antara data yang dilaporkan oleh Otorita	
			Asahan dengan jumlah yang ditelusuri oleh	
			DJKN.	
			RPerpres tersebut menjadi landasan	
			untuk pendanaan pelaksanaan pengakhiran tugas	
			Otorita Asahan, termasuk pembayaran uang penghargaan kepada pimpinan dan karyawan	
			Otorita Asahan, dan memberikan kepastian bagi	
			status dari aset lainnya yang masih dikelola oleh	
			Otorita Asahan yang selanjutnya menjadi	
			wewenang Kementerian/Lembaga.	
3.	Peraturan Presiden	Menteri Perencanaan Pembangunan	Terhadap permohonan dimaksud,	RPerpres Hak Keuangan KNKS telah
.	tentang Jenis dan	Nasional / Kepala Bappenas kepada	Sekretariat Kabinet meneliti draf RPerpres Hak	ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 17
	Besaran Hak Keuangan	Presiden mengajukan Permohonan	Keuangan KNKS, dan terdapat beberapa hal	September 2018 dan ditetapkan sebagai
	dan Fasilitas Lainnya	Penetapan Rancangan Peraturan Presiden	yang masih perlu diklarifikasikan kepada	Perpres Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jenis
	bagi Manajemen	tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian	dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas
	Eksekutif Komite	dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen	Keuangan, dan Kementerian PAN dan RB,	Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite
	Nasional Keuangan	Eksekutif Komite Nasional Keuangan	sehingga pada tanggal 4 Mei 2018 di Sekretariat	Nasional Keuangan Syariah.
	Syariah	Syariah (RPerpres Hak Keuangan KNKS).	Kabinet diselenggarakan rapat penyempurnaan	
	-	RPerpres tersebut sebagai landasan	RPepres Hak Keuangan KNKS, terkait:	

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		hukum bagi penetapan jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi manajemen eksekutif KNKS sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Perpres Nomor 91 Tahun 2016 tentang KNKS.	<ul> <li>a. Grading fasilitas lainnya bagi Manajemen Eksekutif KNKS;</li> <li>b. Waktu dimulainya pemberian hak keuangan bagi Direktur Eksekutif;</li> <li>c. Mekanisme perubahan besaran hak keuangan;</li> <li>Hak keuangan Sekretariat KNKS yang bersifat ex-officio.</li> </ul>	
4.	Rancangan Instruksi Presiden Aksi Nasional Perlindungan Konsumen	Hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia di tahun 2016, survei yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terhadap konsumen di 13 Provinsi, menunjukkan nilai yang masih rendah, yaitu 30,86. Nilai tersebut masih rendah 20,26 poin dibandingkan dengan nilai perhitungan IKK di 29 negara Eropa tahun 2011 yang sudah mencapai 51,31.	Dalam hal ini, Deputi Bidang Perekonomian selaku mitra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional bersama kementerian terkait lainnya menyusun kebijakan, strategi, sasaran, target, dan sektor-sektor yang menjadi prioritas perlindungan konsumen. Semua kebijakan tersebut dikemas dalam suatu Rancangan Instruksi Presiden tentang Aksi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2018-2019, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen yang lebih sinergi, harmonis, dan terintegrasi.	Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B.467/Seskab/Ekon/09/2018 tanggal 27 September 2018 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyampaikan permohonan paraf persetujuan Menteri terhadap Rancangan Instruksi Presiden dimaksud, dan selanjutnya untuk diajukan kepada Presiden guna penetapannya.
5.	Usulan Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023	Keputusan Presiden Nomor 19 dan 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tanggal 7 Mei 2018, sehingga perlu ditetapkan kembali Susunan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023.  Gubernur Kepulauan Riau kepada Presiden menyampaikan Usulan Susunan Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023.	Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas disebutkan bahwa Ketua dan Anggota Dewan Kawasan ditetapkan Presiden atas usul Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau mengusulkan nama-nama calon keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023.	Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan:  a. Pengusulan Keanggotaan Dewan Kawasan (Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden harus melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, suatu rencana kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan berasal/disiapkan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai dengan bidang

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
				tugasnya. b. Usulan struktur keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023 perlu dikaji dengan menyesuaikan rencana kebijakan Pemerintah yang akan melebur yang akan melebur Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun ke dalam Kawasan Nasional.
6.	Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Arahan Presiden terkait penyederhanaan perizinan TKA disampaikan pada sejumlah rapat terbatas, yaitu rapat terbatas tanggal 5 Januari 2018, 31 Januari 2018, dan 6 Maret 2018. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki dan menyederhanakan proses birokrasi untuk meningkatkan investasi, baik melalui debirokratisasi, maupun deregulasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah diantaranya terkait dengan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang selama ini banyak dikeluhkan pelaku usaha, atau investor karena prosesnya yang dipandang rumit dan waktunya yang lama.	Menindaklanjuti arahan Presiden tentang penyederhanaan perizinan TKA, Sekretariat Kabinet menyiapkan rancangan Peraturan Presiden mengenai Penggunaan TKA sebagai pengganti Perpres yang mengatur perizinan TKA sebelumnya, dan membahasnya beberapa kali dalam rapat dengan kementerian/lembaga di Sekretariat Kabinet. Pokok-pokok penyederhanaan dalam Perpres:  1. Perizinan penggunaan TKA dilakukan secara online (data sharing) antar instansi yang terlibat dalam proses perizinan TKA (tidak lagi terjadi tatap muka dalam proses pemberian perizinan TKA).  2. Pengesahan Rencana Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat merupakan izin untuk mempekerjakan TKA.  3. Penghapusan syarat rekomendasi dari kementerian/ lembaga dalam proses perizinan TKA.  4. Permohonan Visa Tinggal Terbatas sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Terbatas (Itas).  5. Pemberian Itas dilaksanakan di tempat pemeriksaan imigrasi yang sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan.	RPerpres Penggunaan TKA pada akhirnya ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2018, dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2018.  Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA tersebut secara garis besar mengatur penyederhanaan birokrasi dan administrasi perizinan penggunaan TKA di Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.  Penyederhanaan proses perizinan penggunaan TKA melalui Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan tanpa mengurangi faktor pengawasan dan keamanan serta kepentingan dalam negeri, khususnya dalam melindungi tenaga kerja Indonesia.

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
7.	Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum	Arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 16 Januari 2018 terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum ditindaklanjuti oleh Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 8 Februari 2018 dengan menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden yang merupakan hasil pembahasan tingkat eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.	Terhadap surat tersebut, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet menindaklanjutinya dengan melaksanakan rapat beberapa kali guna penyempurnaan redaksi atas Rperpres tersebut secara antarkementerian terakhir pada tanggal 23 Februari 2018, yang menyepakati bahwa perlunya melakukan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum secara terpadu dibentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim DAS Citarum.  RPerpres tersebut mengatur mengenai: 1) percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum; 2) pembentukan Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum; 3) dukungan kementerian/lembaga dalam percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum; dan 4) pemberian insentif perpajakan bagi Wajib Pajak yang ikut serta dalam program pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum dengan menyediakan infrastruktur sosial.	Berkenaan dengan penyampaian dan proses penyempurnaan naskah RPerpres tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat B.87/Seskab/Ekon/3/2018 pada 2 Maret 2018 memohon paraf persetujuan pada setiap lembar naskah RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinatr Bidang Kemaritiman, dan Menteri Keuangan Geospasial.  Pada tanggal 6 Maret 2018, setelah proses pembubuhan dan penyempurnaan materi terhadap RPerpres tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan penetapan kepada Presiden.  Dengan ditandatanganinya RPerpres oleh Presiden pada 14 Maret 2018, maka RPerpres tersebut resmi ditetapkan menjadi Perpres dengan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan PengendalianPencemarandan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
8.	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Bandung dan Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (RPerpres). RPerpres dimaksudkan sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26	Berkenaan dengan penyampaian Rperpres tersebut, Pada tanggal 13 & 14 Februari 2018 secara intensif Sekretariat Kabinet beserta Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Bappenas melakukan pembahasan rumusan pengaturan pengembangan Kawasan Walini ke dalam RPerpres serta pengecekan terakhir RPerpres secara keseluruhan terkait kesesuaian antara pengaturan pada batang tubuh dan lampiran (Peta & Indikasi Program).  Pada tanggal 1 Maret 2018 melalui surat	Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018, setelah mendapatkan tanda tangan Presiden, RPerpres tersebut kemudian dilakukan penetapan dan diundangkan menjadi Perpres dengan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.	nomor B.85/Seskab/Ekon/03/2018, Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan paraf persetujuan kepada Menteri ATR/BPN dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atas naskah RPerpres sebelum dilakukan penetapan oleh Presiden.	
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan	Alih fungsi lahan sawah kepada lahan non sawah mencapai 100.000 hektar pertahun, dan berdampak pada hilangnya 5 juta rumah tangga pertanian dalam satu dekade terakhir.  Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memberikan arahan untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (RPerpres) sebagai instrumen hukum guna mencegah alih fungsi lahan sawah kepada lahan non sawah, khususnya kepada daerah yang belum menetapkan LP2B.	Selanjutnya arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan beberapa rapat yang melibatkan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut mengenai RPerpres dilakukan kembali di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.  Dalam rapat tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan pendapat sesuai masukan yang telah disampaikan secara tertulis melalui surat Deputi Nomor B.932, yang intinya perlu dipertimbangkan kembali terhadap rencana penerbitan RPerpres sebagai instrumen hukum untuk mencegah alih fungsi lahan sawah kepada lahan non sawah khususnya kepada daerah yang belum menetapkan LP2B, dengan alasan bahwa:  1) Substansi mengenai pengintegrasian LSB dengan rencana tata ruang dalam RPerpres tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang LP2B dan Pemda, karena dinilai mengambil alih kewenangan Pemda untuk menetapkan wilayahnya sebagai areal kegiatan pertanian dan/atau non pertanian.  2) Substansi mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah dalam RPerpres dinilai tidak efektif pelaksanaannya. Hal ini mengingat Penetapan LSB oleh Menteri ATR/Kepala BPN melalui RPerpres hanya merupakan data indikatif lahan sawah yang tidak secara otomatis merubah status LSB menjadi Kawasan Pertanian Pangan	Selanjutnya, dalam hal proses RPerpres dinilai tetap perlu dilanjutkan, muatan materi RPerpres diusulkan terbatas pada penetapan LSB yang selanjutnya menjadi acuan Pemda dalam penyusunan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.  Terhadap usulan Sekretariat Kabinet tersebut di atas, rapat menyepakati agar penyusunan RPerpres tetap dilanjutkan dengan catatan:  1) ruang lingkup RPerpres dibatasi hanya pada penetapan LSB dalam peta indikatif;  2) perubahan judul RPerpres untuk menghindari pemahaman bahwa LSB merupakan bagian dari LP2B, sehingga peraturan perundang-undangan mengenai LP2B tidak secara otomatis berlaku untuk LSB; dan  3) pengendalian alih fungsi lahan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Hal tersebut telah dilaporkan melalui Memorandum Nomor M- 613, tanggal 30 Oktober 2018. Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM akan segera menyelenggarakan rapat lanjutan pembahasan RPerpres.

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pulau Karantina (RPP) pada	Berkelanjutan (KP2B) dan LP2B. Sehubungan hal tersebut, kewenangan Menteri ATR/Kepala BPN dalam memberikan persetujuan alih fungsi LSB yang belum ditetapkan menjadi LP2B dalam rencana tata ruang menjadi tidak bermakna.  Terhadap penyusunan RPP dimaksud, Kementerian Pertanian telah melakukan	Beberapa masukan atas RPP yang disampaikan Sekretariat Kabinet dalam rapat dimaksud,
	Pulau Karantina	pokoknya merupakan amanat pelaksanaan Pasal 36D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, penyelesaian RPP juga dilakukan sebagai tindak lanjut Arahan Presiden terkait Pembangunan Pulau Karantina pada Rapat Terbatas tanggal 6 Juni 2017 tentang Evaluasi Pelaksanaan PSN di Provinsi Bangka Belitung, yang terdiri dari penyelesaian regulasi terkait pulau karantina dan penyusunan cost and benefit atas rencana pembangunan pulau karantina.	pembentukan Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan RPP melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 116/Kpts/OT.050/2/2018, dengan mengikutsertaan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu anggota PAK. Setelah dilakukan beberapa kali rapat PAK pembahasan RPP, Menteri Pertanian melalui surat Nomor B-3921/ HK.120/A/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan permohonan pengharmonisasian konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pulau Karantina. Lebih lanjut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan tiga kali rapat pleno untuk membahas penyempurnaan substansi dan teknis penulisan peraturan perundang-undangan atas RPP dengan melibatkan Sekretariat Kabinet, yang telah dilaporkan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui memo Nomor M.601 tanggal 25 Oktober 2018.	yaitu:  a. Perlu pengaturan secara jelas yang membedakan kegiatan penentuan zona oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh otoritas veteriner nasional (Pasal 4 dan Pasal 5 RPP) dan penetapan zona oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil analisis risiko oleh otoritas veteriner nasional (Pasal 8 dan Pasal 9 RPP), sehingga dapat terlihat apakah kedua kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan atau merupakan kegiatan yang berbeda.  b. Perlu pengaturan secara jelas mengenai program/kegiatan penguatan sistem yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pengamanan penyakit hewan di dalam negeri, mengingat materi penguatan sistem dalam Pasal 6 Ayat (1) RPP dinilai hanya mengatur mengenai tujuan yang akan dicapai.  c. Perlu pengaturan secara jelas mengenai pelaksanaan surveilans dalam Pasal 6 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) RPP karena dinilai tidak mendalam.  d. Keikutsertaan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah terkait dalam tim studi kelayakan (Pasal 14 Ayat (1) huruf i dan j RPP).  e. Perlunya penjelasan mengenai pelaksanaan prinsip pengamanan maksimum di pulau

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
11.	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	Rancangan Instruksi Presiden tersebut diajukan kepada Presiden oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dengan judul Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (surat Nomor: S-9/M.EKON/01/2017 tanggal 23 Januari 2017). Pengajuan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan arahan Presiden tanggal 14 April 2016 yang disampaikan di Pulau Karya, Kepulauan Seribu dan dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan produktivitas kelapa sawit yang mempengaruhi penggunaan lahan.	Menindaklanjuti pengajuan tersebut Sekretariat Kabinet melakukan pemrosesan RInpres melalui serangkaian kegiatan pengkajian dan rapat pembahasan. Terhadap hasil rapat tersebut, Menko Bidang Perekonomian melakukan revisi terhadap substansi yang kemudian disampaikan kembali penyempurnaan RInpres tersebut kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) pada tanggal 20 September 2017 (Nomor:S-239/M.EKON/09/2017).  Sekretariat Kabinet telah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi penyempurnaan RInpres dengan rapat koordinasi terakhir pada tanggal 19 Maret 2018 yang kemudian diikuti dengan adanya surat permohonan paraf persetujuan ulang atas RInpres kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri LHK, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/BPN), Menteri Pertanian, dan Menteri dalam Negeri (surat Nomor B.177/Seskab/Ekon/04/2018 dan Nomor B.178/Seskab/ Ekon/04/2018 tanggal 23 April 2018).	karantina (Penjelasan Pasal 27 Ayat (4) RPP).  Terhadap penyempurnaan RPP yang telah dilakukan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor PPE.PP.03.03-651 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Menteri Pertanian, menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RPP untuk dapat diajukan kepada Presiden guna mendapatkan penetapan.  Setelah pengajuan Seskab melalui memorandum Nomor M-705 tanggal 3 Juli 2018 kepada Presiden, pada tanggal 19 September 2018 Presiden menetapkan Inpres tersebut melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2018.  Selanjutnya pasca penetapan tersebut Sekretariat Kabinet akan melakukan pemantauan terhadap kebijakan moratorium dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut penting mengingat hasil pendataan dan verifikasi Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan merupakan input bagi pencapaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) atau sumber TORA yang merupakan agenda prioritas nasional.
12.	Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengesahan	Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tersebut diajukan kepada Presiden melalui Surat Menteri Luar	Sebelum diajukan kepada Presiden, Sekretariat Kabinet meminta paraf persetujuan RPerpres kepada Menteri LHK dan Menteri	Peraturan Presiden menjadi dasar ratifikasi Agreement on the Establishment of The Asian Forest Cooperation Organization,

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
	Agreement on the Establishment of The Asian Forest Cooperation Organization (Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia)	Negeri Nomor: 549/HI/09/2018/08/01 tanggal 27 September 2018 tentang permohonan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement on the Establishment of The Asian Forest Cooperation Organization (Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia), dimana RPerpres diprakarsai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Ratifikasi ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum bagi berlakunya Agreement on the Establishment of The Asian Forest Cooperation Organization secara nasional dan keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut.	Luar Negeri (Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.477/Seskab/Ekon/10/ 2018 tanggal 2 Oktober 2018).  Setelah diparaf, RPerpres diajukan kepada Presiden melalui memo Sekretaris Kabinet Nomor: M.1135 tanggal 5 Oktober 2018.  RPerpres ditetapkan oleh Presiden tanggal 14 November 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2018.	untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan segera mendepositkan ratifikasi tersebut kepada Sekretariat AFoCO.  Adapun manfaat ratifikasi dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2018 tersebut yakni untuk mempromosikan dan melaksanakan aksi nyata dalam program kerjasama kehutanan di Asia, sarana kampanye positif pembangunan kehutanan Indonesia, sarana sharing lesson learned pembangunan hutan di Indonesia kepada anggota lain.

### Tabel 3.6 Gambaran Indikator Kinerja Kegiatan 3 (Tusi 5)

## Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat Atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
1.	Tarif Cukai Tembakau	Menteri Keuangan mengusulkan	Keputusan dalam Rakortas dimaksud	Dalam Sidang Kabinet tersebut, Sekretariat
	dan Harga Jual Eceran	Rencana Kenaikan Tarif Cukai Tembakau	disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden	Kabinet menyampaikan beberapa rekomendasi
	(HJE) Tahun 2019	dan Harga Jual Eceran (HJE) untuk tahun	dalam Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 2	kepada Presiden yaitu:
		2019. Kenaikan tarif cukai dan HJE ini	November 2018.	a. Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian
		mendapat respon kurang baik dari		agar mengkaji kembali secara cermat dampak
		beberapa pelaku industri yang		besaran kenaikan tarif cukai dan HJE yang
		mengkhawatirkan terjadinya penurunan		cukup signifikan untuk tahun 2019 dengan
		volume produksi rokok. Selain itu juga		mempertimbangkan 4 (empat) aspek utama
		terdapat usulan dari Menteri Perindustrian		secara seimbang, yaitu: kesehatan; pencegahan
		agar dilakukan penundaan		rokok illegal; volume produksi, tenaga kerja
		penyederhanaan strata/layer tarif, dan		dan permintaan terhadap tembakau dan
		penggabungan produksi SKM dan SPM		cengkeh; dan penerimaan Negara.

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		sebagai dasar penentuan golongan pengusaha pabrik rokok pada tahun 2019.  Atas permasalahan ini Menko Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri pada tanggal 30 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. Rapat menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:  a. Pada Tahun 2019, tarif cukai tembakau akan dinaikan pada kisaran lebih dari 10%-17%, dan HJE pada kisaran 26,7%-34% (kenaikan tarif cukai dan HJE tertinggi akan dikenakan pada Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKT)). Untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak mengalami kenaikan tarif cukai, dan hanya mengalami kenaikan HJE yang paling kecil dengan ratarata hanya sebesar 5% untuk golongan SKT tertinggi.  b. Penyederhanaan strata layer pada golongan pengusaha tembakau untuk jenis SKM dan SPM tetap dilakukan pada tahun 2019.  c. Penundaan pelaksanaan pengabungan produksi SKM dan SPM selama 2 (dua) tahun ke depan dan/atau akan berlaku pada tahun 2021.		Kenaikan tarif cukai dan HJE yang terlalu tinggi memang akan menurunkan konsumsi rokok, namun akan berdampak pada penurunan volume produksi secara signifikan dan kemudian menurunkan permintaan terhadap tembakau lokal dan cengkeh, mendorong peredaran rokok illegal, dan menurunkan penerimaan negara dari cukai (volume produksi rokok sebagai basis penerimaan cukai akan turun sehingga penerimaan negara tidak tercapai).  b. Penyederhanaan strata/layer tarif tetap dilakukan pada tahun 2019, dan penggabungan produksi SKM dan SPM sebagai dasar penentuan golongan pengusaha pabrik rokok ditunda selama 2 (dua) tahun (di mulai pada tahun 2021).  Dalam pelaksanaannya Presiden memutuskan untuk tidak melakukan kenaikan tarif cukai dan HJE pada tahun 2019. Selain itu Presiden juga memutuskan agar penyederhanaan strata/layer tetap dilakukan pada tahun 2019, dan penggabungan produksi SKM dan SPM sebagai dasar penentuan golongan pengusaha pabrik rokok ditunda selama 2 (dua) tahun (di mulai pada tahun 2021).
2.	peningkatan investasi dan peningkatan ekspor	Sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang	Pemerintah kembali menyelenggarakan Ratas tentang peningkatan investasi dan	Terhadap Arahan Presiden dalam Ratas tanggal 31 Januari 2018 dan permasalahan
	uan peningkatan ekspor	Peningkatan Investasi dan Perdagangan	peningkatan ekspor pada tanggal 31 Januari 2018.	ekonomi yang dihadapi Indonesia, Sekretariat
		pada tanggal 5 Januari 2018, dimana	Dalam Ratas tanggal 31 Januari 2018	Kabinet memberikan rekomendasi yang
		Presiden menyampaikan beberapa arahan	tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahan	disampaikan kepada Presiden sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		mengenai peningkatan investasi yang perlu untuk ditindaklanjuti K/L yaitu sebagai berikut:  a. Menteri Kesehatan dan pimpinan K/L terkait agar memperhatikan regulasi obat-obatan untuk mengatasi permasalahan misalnya rendahnya investasi di sektor obat-obatan, alat kesehatan, serta lamanya proses perizinan.  b. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar memastikan investor asing di bidang pendidikan yang akan berinvestasi di Indonesia diproses segera.  c. Para Menteri dan kepala lembaga agar langsung menangani investor yang datang untuk mempercepat proses investasi.  d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kepala BKPM, dan pimpinan K/L terkait agar menentukan lokasi/tempat pembangunan KEK Pendidikan.  e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri BUMN agar memperhatikan investasi kilang minyak yang terhenti dan tidak ada realisasinya.  f. Kepala BKPM dan pimpinan K/L terkait agar memperhatikan investasi harus disertai dengan peningkatan lapangan pekerjaan.	masukan dan rekomendasi untuk Ratas dimaksud.  Beberapa hal yang dibahas dalam Ratas tersebut terkait dengan perekonomian nasional yang dihadapkan pada sejumlah risiko misalnya, kebijakan proteksionism Amerika Serikat, normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, intermediasi perbankan yang lemah, dan ruang fiskal yang terbatas.	<ul> <li>a. Memberdayakan Satuan Tugas percepatan investasi di instansinya masing-masing untuk mengawal investor sekaligus proaktif dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh investor.</li> <li>b. Melaporkan secara lisan atas hasil kunker LN dan tindak lanjutnya terkait investasi kepada Presiden per triwulan.</li> <li>c. Memastikan bahwa program kerja Kementerian/Lembaga selaras dan focus pada pencapaian target investasi yang tercakup dalam RKP 2018.</li> <li>d. Segera melakukan penyederhanaan izin yang menjadi lebih sederhana dan waktunya dikurangi.</li> <li>e. Mematuhi Inpres 7 tahun 2017 dalam menyusun kebijakan, dimana analisa dampak dan risiko serta konsultasi publik harus dilakukan secara maksimal.</li> </ul>
3.	Komite Nasional Keuangan Syariah	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan	Sekretaris Kabinet menyampaikan hal tersebut kepada Presiden dengan memberikan	Usulan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan terselenggaranya Rapat Pleno KNKS yang
	<del></del>	Perencanaan Pembangunan Nasional	pertimbangan dan urgensi, beserta saran dan	membahas progres dan perkembangan keuangan
		kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan	rekomendasi terkait pengembangan keuangan	syariah, serta rencana pengembangan keuangan

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		usulan Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).	syariah, antara lain:  a. upaya percepatan pengembangan keuangan syariah perlu terus dilakukan mengingat pangsa pasar keuangan syariah nasional yaitu sebesar 8,4% masih tertinggal jauh dibanding negara berpenduduk Muslim lainnya seperti Arab Saudi yang memiliki pangsa pasar 51,1%, Malaysia sebesar 23,8%, dan Uni Emirat Arab sebesar 19,6%;  b. perlunya mengoptimalkan pengumpulan dana sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf agar potensi yang ada dapat dialokasikan sebagai dana pendukung pembangunan dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat;  c. perlunya membangun ekosistem ekonomi syariah untuk mengembangkan industri halal dan melakukan langkah-langkah pembukaan pasar serta peningkatan industri kreatif di bidang busana muslim guna meningkatkan penetrasi ke pasar busana muslim dunia; dan d. perlunya mendorong pengembangan industri makanan halal nasional, meningkatkan arus investasi untuk industri produk-produk makanan halal, serta penyiapan infrastruktur kelembagaan untuk sertifikasi produk makanan halal.	syariah pada tanggal 5 Februari 2018.  Sejalan dengan saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, dalam Rapat Pleno KNKS, Presiden memberikan arahan antara lain agar strategi pengembangan keuangan syariah perlu ditangani dengan serius dengan melihat pangsa pasar yang menjanjikan antara lain:  a. mendukung dan melibatkan pelaku-pelaku di bidang pangan muslim, busana muslim, kosmestik dan obat-obatan halal, dan wisata halal;  b. memperbanyak pembukaan bank wakaf mikro; dan  c. mengkaji kembali penggunaan dana sosial keagamaan untuk pembiayaan yang produktif.
4.	Peresmian Pembukaan	Untuk meningkatkan daya saing	Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris	Atas memorandum Sekretaris Kabinet
	Trade Expo Indonesia 2018 ke-33 Tahun 2018.	ekspor barang dan jasa, sasaran perdagangan luar negeri dalam RPJMN	Kabinet telah menyampaikan memorandum kepada Presiden (Memo Nomor M.369/Ekon/5/2018	tersebut, Presiden berkenan hadir dalam membuka dan meresmikan TEI 2018 pada tanggal 24 Oktober
		2015-2019 antara lain dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor	tanggal 4 Mei 2108) guna mempertimbangkan untuk membuka/meresmikan TEI 2018 dengan	2018.
		produk non-migas rata-rata 11,6% per tahun dan peningkatan pangsa pasar	pertimbangan bahwa TEI memiliki dampak positif bagi para pelaku usaha, dan kehadiran Presiden	
		ekspor produk manufaktur menjadi 65%.	akan memberikan dorongan moril, semangat serta	
		Guna meningkatkan ekspor tersebut, Kementerian Perdagangan	menunjukkan perhatian Pemerintah kepada para pelaku usaha ekspor dalam peningkatan ekspor	
		sebagai <i>counterpart</i> dari Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan	Indonesia.	

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
5.	Pembukaan World Conference on Creative Economy 2018	Ketenagakerjaan setiap tahun secara rutin menyelenggarakan Trade Expo Indonesia (TEI). TEI adalah salah satu agenda tahunan Kementerian Perdagangan dan merupakan pameran terbesar produk ekspor Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mendorong ekspor Indonesia melalui pameran dagang berskala internasional dan terbesar di Indonesia.  Kementerian Perdagangan dengan Surat Nomor 525/M-DAG/SD/4/2018 tanggal 24 April 2018 telah menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk membuka sekaligus menyerahkan penghargaan Primaniyarta dan Primaduta pada pembukaan TEI ke-33 yang memiliki tema "Creating Product for Global Opportunities" pada tanggal 24-28 Oktober 2018 di Indonesia Convention Exhibition Tangerang.  Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menyampaikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membuka acara World Conference on Creative Economy (WCCE) 2018 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 6-8 November 2018.	Terhadap permohonan Kepala Bekraf dimaksud, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi Presiden berkenan membuka acara WCCE 2018 dimaksud, dengan pertimbangan: a. WCCE merupakan konferensi ekonomi kreatif internasional pertama di dunia yang telah diakui oleh Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). b. WCCE akan diikuti oleh perwakilan pemerintah, organisasi internasional (UNCTAD, UNESCO, WIPO, ITU, UNDP dan UNIDO), pelaku kreatif dan bisnis, akademisi, think tank, dan media dari berbagai negara. Konferensi ini diharapkan menjadi kerangka utama kerja sama internasional di sektor ekonomi kreatif dan semakin menempatkan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi kreatif di tingkat global. c. Event dengan skala internasional ini dapat	Sesuai dengan rekomendasi dari Deputi Perekonomian, Sekretaris Kabinet telah merekomendasikan Presiden untuk membuka WCCE 2018 dan Presiden menerima positif rekomendasi tersebut, namun demikian pada waktu yang bersamaan Presiden mengadakan Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Pembahasan Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan POLRI, sehingga acara tersebut dibuka langsung oleh Menteri Luar Negeri dan Kepala BEKRAF.

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
			menjadi kesempatan dalam mempromosikan Indonesia di mata dunia setelah berhasil menyelenggarakan event ASIAN Games 2018 dan Annual Meeting IMF-WBG 2018 dengan sangat sukses.  d. Presiden menyampaikan arahan pada tanggal 20 Oktober 2018, yang intinya agar ekonomi kreatif dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui promosi, diferensiasi, dan branding.	
6.	Peresmian 4 (empat) KEK yang telah siap beroperasi (KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Galang Batang, dan KEK Arun Lhokseumawe).	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyampaikan Evaluasi Kesiapan Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan permohonan kepada Presiden untuk meresmikan 4 (empat) KEK yang telah siap beroperasi, antara lain KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Galang Batang, dan KEK Arun Lhokseumawe.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan evaluasi terhadap 4 (empat) KEK tersebut dan telah memenuhi persyaratan operasional antara lain kesiapan infrastruktur dan fasilitas kawasan, kelembagaan dan SDM, serta perangkat pengendali administrasi dalam rangka pemberian pelayanan kepada pelaku usaha/investor di KEK. Keempat KEK tersebut diharapkan dapat diresmikan oleh Presiden pada bulan November 2018 atau sesuai dengan keluangan waktu Presiden.	Terhadap permohonan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi agar Bapak Presiden berkenan untuk meresmikan 4 (empat) KEK yang siap beroperasi pada bulan November 2018 atau sesuai dengan keluangan waktu Bapak Presiden.	Dengan pertimbangan:  1. Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK dan PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 100 Tahun 2012, dinyatakan bahwa KEK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah harus siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.  2. Empat KEK yang telah siap diresmikan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah;  3. Pengembangan KEK akan mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, mempercepat perkembangan daerah, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Keempat KEK yang telah siap diresmikan tersebut telah memenuhi kriteria beroperasi serta memiliki target investasi dan penyerapan tenaga kerja.  Presiden melakukan kunjungan ke Aceh pada tanggal 14 Desember 2018 dalam rangka peresmian sejumlah proyek strategis termasuk KEK Arun Lhokseumawe.
7.	Hari Koperasi Nasional Ke 71	PLH Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) dengan Surat nomor B/156/DEKOPIN-L/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara) menyampaikan	Deputi Perekonomian melalui Memo Nomor M.474. 10 Juli 2018 melaporkan kepada Sekretaris Kabinet yang intinya merekomendasikan Presiden untuk hadir dalam acara dimaksud sebegai bentuk keberpihakkan pemerintah kepada penggiat koperasi di seluruh Indonesia, disamping	Presiden hadir dalam acara hari koperasi ke-71 yang dilaksanakan tanggal 12 Juli 2018 di ICE BSD Tangerang.  Dalam acara tersebut Presiden menyampaikan pentingnya Koperasi untuk menyesuaikan diri dengan era revolusi industri 4.0, sehingga koperasi

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		permohonan Kehadiran Presiden pada Hari Koperasi Nasional ke-71 pada tanggal 21 Juli 2018.  Surat tersebut merupakan tindaklanjut dari surat nomor 03.1/M.KUKM/I/2018, tanggal 31 Januari 2018 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara) menyampaikan permohonan Kehadiran Presiden pada Hari Koperasi Nasional ke-71 pada tanggal 21 Juli 2018 dan permohonan audiensi	menyampaikan beberapa kebijakan presiden terkait penurunan bunga KUR dari 9% menjadi 7% dan penurunan pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%.	dapat berkembang pesat dan menjadi besar. Selain itu juga Koperasi harus mampu menebarkan informasi kepada anggota sekaligus menjadi wadah bagi anggota untuk belajar mareketing, kemasan, variasi produk.  Selain itu Presiden dalam kesempatan itu juga melakukan sosialisasi pajak penghasilan (PPh) Final UMKM menjadi 0,5 %.
8.	Penyediaan Rumah Bagi Aparatur Sipil Negara dan TNI/ Polri	Pada tanggal 15 Januari 2018 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan permohonan penyelenggaraan Rapat Terbatas guna membahas penyediaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri dan mendapatkan arahan Presiden terkait skema kemudahan bagi ASN dan TNI/Polri untuk penyediaan rumah tersebut. Selain itu, dalam suratnya disebutkan pula bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah menjajaki beberapa skema dalam meringankan beban ASN dan TNI/Polri dalam kepemilikan rumah, antara lain melalui pemberian fasilitas kredit dengan downpayment sebesar 0% yang melibatkan bank pemerintah dan PT Taspen.	Terhadap permohonan Menteri PPN/Kepala Bappenas dimaksud, Deputi Bidang Perekonomian melalui memorandum kepada Presiden menyampaikan beberapa informasi terkait perihal tersebut dan menyampaikan rekomendasi yaitu:  a. Usulan tersebut didasarkan pada masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan perumahan yang layak huni melalui sewa atau kepemilikan dengan harga yang layak. Hal tersebut ditambah dengan sulitnya akses perbankan untuk membiayai kepemilikan rumah terutama bagi ASN dan TNI/Polri. Oleh karena itu Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk menjembatani hal tersebut dengan melakukan penyesuaian skema Kredit Kepemilikan Rumah produk perbankan yang diperuntukkan bagi ASN dan TNI/Polri.  b. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada ASN dan TNI/Polri untuk dapat mengakses layanan KPR di bank pemerintah, yakni dengan mendapatkan "jaminan dari pemerintah" untuk keberlangsungan/keberlanjutan pembayaran	BUMN agar dapat merumuskan skema suku bunga dan tenor khusus sesuai dengan profil risiko ASN, TNI dan Polri. d. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PAN

2) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri

PUPR agar mengkoordinasi harmonisasi

sasaran penerima program ASN, TNI dan

Polri dengan program penyediaan rumah

angsuran KPR pada bank pemerintah. Selain

itu, penyesuaian dilakukan untuk memenuhi

keterbatasan pendapatannya, tingkat suku bunga

terkait

kebutuhan ASN dan TNI/Polri

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
			perlu disesuaikan dan tenor untuk pembayaran cicilan harus dibuat lebih panjang, serta angsuran lebih rendah, dan <i>Debt Service Ratio</i> (DSR) yang lebih kecil.  c. Usulan kebijakan tersebut perlu dilakukan kajian dan pertimbangan yang mendalam atas pemberian KPR dimaksud, termasuk peran Pemerintah dalam pemberian kemudahan atas penyediaan KPR bagi PNS, TNI, dan Polri. Sehingga terhadap kebijakan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu dalam forum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan, agar dalam implementasi kebijakannya tidak lantas kontraproduktif dan bersinggungan dengan kebijakan pemerintah lainnya.  Menindaklanjuti surat Menteri Bappenas tersebut, Sekretariat Kabinet pada tanggal 26 Januari 2018 mengadakan rapat dengan mengundang Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka pembahasan lebih lanjut terkait permohonan Rapat Terbatas tentang Rumah ASN tersebut dan disepakati permasalahan tersebut diajukan ke dalam Rapat Terbatas untuk mendapat arahan Presiden.	bagi MBR (FLPP).
9.	RUU Pertanahan	Menteri Lingkungan Hidup dan	Menindaklanjuti surat tersebut, Sekretaris	Dalam penyelenggaraan Rapat Terbatas
		Kehutanan (Menteri LHK) dalam surat nomor S.324/MENLHK/SETJEN/KUM.0/10/2018, tanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Presiden dan surat nomor S.325/MENLHK/SETJEN/KUM.0 /10/2018, tanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan intinya meminta agar diselenggarakan Rapat	Kabinet melalui Memorandum Nomor M.1773, tanggal 15 Oktober 2018 menyampaikan bahwa Rapat Terbatas perlu diselenggarakan guna membahas permasalahan dimaksud dan untuk memperoleh arahan Presiden atas permohonan Menteri LHK pada tanggal 23 Oktober 2018.	pada tanggal 23 Oktober 2018 tentang RUU Pertanahan, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi di antaranya: perlunya mempertimbangkan potensi konflik kewenangan antar Kementerian/Lembaga dalam hal pelimpahan atribusi dari Presiden kepada Menteri ATR/BPN untuk pelaksanakan Hak Menguasai Negara atas tanah dilakukan, penggunaan data perizinan kementerian lain guna efektifitas pelaksanaan pengukuran serta pelibatan Kementerian-

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		Terbatas (Ratas) yang dimaksudkan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU) sampai dengan selesainya pembahasan antar kementerian yang menyertakan menteri-menteri yang ditugaskan dalam surat Presiden kepada DPR (Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, dan Menteri Hukum dan HAM) serta menteri-menteri yang bertanggung jawab dalam bidang sumber daya alam (Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri LHK).		kementerian terkait dalam pelaksanaan pengukuran di kawasan tertentu guna mempercepat pelaksanaan PTSL  Dalam Ratas, Presiden memberikan arahan yang pada intinya senada dengan rekomendasi Sekretariat Kabinet, yaitu agar seluruh jajaran pemerintah memiliki pemahaman yang sama terkait RUU Pertanahan sebelum melangkah ke dalam pembahasan di DPR. Hal ini bertujuan agar UU Pertanahan yang baru tidak membawa semangat yang lama sehingga tidak menjadi bermanfaat sama sekali.
10.	Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	Sekretariat Kabinet menyelenggarakan beberapa kali rapat guna melakukan finalisasi dan klarifikasi ulang atas Rperpres. Dalam rapat finalisasi tersebut ditemukan permasalahan terkait peruntukan ruang untuk Transit Oriented Development (TOD) Walini yang merupakan TOD untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dan bagian dari Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. TOD Walini berdasarkan RPerpres tersebut masuk ke dalam zona B4 di Kabupaten Bandung Barat, dimana zona B4 tersebut merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sedang dan memiliki kesesuaian untuk budidaya pertanian. Disamping itu, pada wilayah tersebut juga telah direncanakan untuk dibangun Kawasan Wisata Terpadu (KAWIT) Walini oleh PTPN VIII. Di sisi lain, terdapat rencana pembangunan Kampus ITB yang perlu diakomodasi dalam Rperpres. Presiden pada	Selanjutnya, permasalahan tersebut diajukan ke dalam Rapat Terbatas untuk mendapat arahan Presiden. Sebagai bahan ratas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian memberikan rekomendasi, yaitu:  a. Menteri ATR/BPN agar mengkaji lebih lanjut secara komprehensif terhadap ketiga rencana pembangunan tersebut secara terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  b. Menteri BUMN agar memerintahkan PT. KCIC dan PTPN VIII untuk memberi dukungan data kepada Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pelaksanaan kajian tersebut.  c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan percepatan dan dukungan dalam penyusunan kajian tersebut.	Ratas diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2017 dengan hasil Arahan Presiden sesuai dengan saran rekomendasi Deputi Bidang Perekonomian Sekretaris Kabinet. Setelah melaksanakan Arahan Presiden tersebut, Menteri ATR/BPN pada tanggal 5 Februari 2018 melalui surat Nomor 433/10.4/II/2018 menyampaikan kembali naskah RPerpres kepada Sekretariat Kabinet untuk difinalisasi sebelum penetapan oleh Presiden.

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		kesempatan Ratas tanggal 23 November 2016 memberikan arahan terkait tencana pembangunan Kampus ITB tersebut.  Dalam rapat di Kemenko Perekonomian pada 18 Juli 2017, PT. KCIC, PTPN VIII, TIM GTA Campus ITB telah menyampaikan hasil kajian masing-masing terkait kesesuaian ketiga rencana pengembangan dengan peruntukan ruang di kawasan Walini. Namun, ketiga rencana pembangunan tersebut belum bersinergi, belum dilakukan secara terpadu, dan khusus untuk TOD Walini belum memenuhi unsur kesesuaian dengan peruntukan ruang di kawasan Walini.		
11.	Harga bahan kebutuhan pokok (Pangan)	Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1439 H/2018 Masehi	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan bahan Rapat Terbatas tentang Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1439 H/2018 Masehi melalui memorandum nomor M-198 tanggal 5 April 2018, yang selanjutnya secara berjenjang disampaikan Deputi Bidang Perekonomian melalui memorandum Nomor M- 234 tanggal 5 April 2018, dan Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum Nomor M- 378 tanggal 5 April 2018, yang pada intinya menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:  a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPI) agar segera melakukan penghitungan stok dan pemantauan harga barang-barang kebutuhan pokok penting pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri;  b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan berkoodinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Perum BULOG untuk meningkatkan	Bahan Rapat Terbatas kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui memorandum nomor M-299 tanggal 30 Mei 2018, yang selanjutnya Intinya adalah sebagai berikut:  a. Menjelang Idul Fitri harga bahan kebutuhan pokok (Pangan) cenderung mengalami kenaikan, hal ini dipicu oleh banyaknya jumlah permintaan. Bank Indonesia dalam release tanggal 20 Mei 2018 memperkirakan laju inflasi Mei 2018 sebesar 0,22%. Proyeksi tersebut lebih rendah disbanding laju inflasi 1 bulan sebelumnya pada tahun 2017 (inflasi Mei 2017) sebesar 0,39%, tahun 2016 (inflasi Juni 2016) sebesar 0,66%, dan tahun 2015 (inflasi Juni 2015) sebesar 0,54%.  b. Memperhatikan pola historis laju inflasi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri, laju inflasi akan bersumber pada 2 (dua) kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dengan penjelasan sebagai berikut:  1) Pada tahun 2017, laju inflasi kelompok

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
			efektifitas operasi pasar.  Terkait dengan penyelenggaraan Rapat Terbatas Persiapan Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1439 H/2018 Masehi yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2018, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan secara berjenjang disampaikan Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor M- 425/Ekon/5/2018 tanggal 30 Mei 2018 dan Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum Nomor M-628 tanggal 30 Mei 2018.	bahan makanan pada bulan Ramadhan (Mei 2017) dan Idul Fitri (Juni 2017) masing-masing mencapai 0,86% dan 0,69%, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,14% dan 0,17%. Komoditi bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar adalah bawang putih, daging ayam ras dan minyak goreng.  2) Sementara itu, kelompok transportasi memberikan sumbangan inflasi terbesar hanya pada saat Idul Fitri dengan laju inflasi sebesar 1,27% dengan andil inflasi sebesar 0,23%. Jenis komoditi yang mempunyai sumbangan inflasi terbesar pada kelompok transportasi adalah tarif angkutan antar kota.
12.	Panen Raya Padi Rawa dalam Rangkaian Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 Tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	Menteri Pertanian RI mengajukan permohonan kesediaan Presiden melakukan Panen Raya Padi Rawa dalam Rangkaian HPS ke-38 Tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan surat nomor 303/KL.210/M/8/2018 tanggal 29 Agustus 2018.	Surat tersebut ditindaklanjuti dengan memo Sekretaris Kabinet kepada Presiden dengan nomor M-1044 tanggal 13 September 2018.	Pembukaan HPS ke-38 tahun 2018 dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian mewakili Presiden. Rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah menghadiri Penyelenggaraan HPS ke 38 di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:  a. Panen Raya Padi Rawa dalam rangkaian acara HPS ke-38 Tahun 2018 dilaksanakan di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Oktober 2018;  b. Tema internasional HPS ke-38 Tahun 2018 ini adalah "Our actions are our future. A #ZeroHunger world by 2030 is possible", sedangkan Tema Nasional adalah "Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045";  c. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mewujudkan kemadirian pangan. Salah satunya adalah dengan optimalisasi lahan rawa

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
				sebagai lahan suboptimal untuk pertanian produktif. Optimalisasi lahan rawa adalah bagian dari komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk menjaga kebutuhan pangan kita dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Bahkan, untuk visi yang lebih besar yakni lumbung pangan dunia di 2045; d. Dari data Kementan tercatat luas lahan rawa di Indonesia diperkirakan mencapai 34,1 juta hektare yang terdiri dari sekitar 20 juta hektare lahan rawa pasang surut, dan lebih dari 13 juta hektare lahan rawa lebak. e. Lahan ini tersebar tersebar di 18 provinsi, atau 300 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 9,52 juta hektare diantaranya bisa dikembangkan untuk pertanian. Potensi ini lebih luas dibandingkan lahan sawah irigasi yang hanya seluas 8,1 juta hektare. Kendala terbesar pemanfaatan lahan rawa terdahulu adalah genangan maupun kekeringan, namun saat ini dapat diatasi dengan pengelolaan tata air dan teknologi penataan lahan. Upaya konversi lahan rawa menjadi lahan pertanian ini telah berhasil dikembangkan salah satunya di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan ditargetkan akan ada 4.000 hektare lahan rawa di Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2018 nanti yang sudah jadi lahan pertanian produktif.
13.	Kunjungan Kerja dan Rapat Terbatas Desa untuk Program Padat Karya Tunai Desa	Guna memantau tindak lanjut Rapat Terbatas mengenai Optimalisasi Dana Desa serta Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya) yang	Untuk menindaklanjuti usulan penyelenggaraan Ratas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan dan mengikuti beberapa kegiatan yaitu:	Namun demikian setelah penyelenggaraan rapat internal antara Deputi Perekonomian dan Deputi Bidang PMK, Wakil Gubernur Gorontalo menyampaikan surat
	•	diselenggarakan Pada tanggal 18 Oktober 2017 dan 3 November 2017, dan tindak lanjut rapat Wakil Sekretaris Kabinet terkait Persiapan Rapat Terbatas Pembangunan di Desa Berbasis Padat Karya yang diselenggarakan pada tanggal	<ul> <li>a. Menyelenggarakan rapat Koordinasi dengan Kementerian Pertanian tanggal 21 Maret 2018 di kantor Sekretariat Kabinet.</li> <li>b. Menghadiri rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Ratas di Desa dan kunjungan kerja Presiden ke Provinsi</li> </ul>	permohonan kesediaan Presiden untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo guna meninjau pelaksanaan beberapa program di provinsi tersebut. Permohonan tersebut selanjutnya diproses Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
		13 November 2017, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan telah menyampaikan usulan Rapat Terbatas di Desa untuk program padat karya bidang pertanian melalui Memorandum nomor M-86 tanggal 12 Maret 2018, yang selanjutnya disampaikan Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M-188 tanggal 12 Maret 2018.	Gorontalo, sekaligus melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau kesiapan daerah terkait pelaksanaan Ratas dan kunjungan kerja Presiden tersebut.  c. Menyelenggarakan rapat koordinasi internal antara Deputi Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada tanggal 10 April 2018, dengan kesepakatan bahwa Deputi Bidang Perekonomian akan memantau perkembangan atas hal dimaksud mengingat Deputi Bidang PMK telah melaporkan usulan Rapat Terbatas Desa secara berjenjang kepada Presiden.	untuk disampaikan secara berjenjang kepada Deputi Bidang Perekonomian nomor M-250, Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memo nomor M-351 tanggal 2 Mei 2018.  Terkait dengan usulan Ratas di desa dan Kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Gorontalo tersebut, Presiden telah memberikan arahan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mewakili Presiden pada acara tersebut.
14.	Percepatan Pelaksanaan Mandatory Biodiesel (B20)	Kebijakan perluasan mandatori Biodiesel merupakan arahan Presiden yang disampaikan beberapa kali dalam rapat terbatas mengenai Strategi dan Kebijakan Menghadapi Dampak Ketidakpastian Perekonomian Global (9 Juli 2018), Percepatan Pelaksanaan Mandatory Biodiesel (20 Juli 2018), Strategi dan Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa (dengan Instrumen Biodiesel/Palm Oil) (31 Juli 2018), dan Lanjutan Strategi dan Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa (14 Agustus 2018).  Dalam beberapa rapat terbatas tersebut, Presiden menginstruksikan agar penerapan perluasan mandatori biodiesel B20 tidak hanya untuk PSO tetapi juga Non PSO. Diharapkan dari kebijakan ini Pemerintah dapat menekan impor dan dapat memanfaatkan serta menyerap produk kelapa sawit untuk kebutuhan dalam negeri sehingga potensi penghematan negara dari kebijakan ini sebesar Rp 15,8 Triliun.	Peran Setkab dalam proses pengambilan kebijakan ini adalah mendorong dan terlibat dalam pembahasan payung hukumnya yakni Perpres 66/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 61/2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu dalam rapat tanggal 17 Mei 2018 di Setkab dan rapat tanggal 10 Juli 2018 di Kemenko Bidang Perekonomian.  Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Pelaksanaan <i>Mandatory</i> Biodiesel (B20). Dalam rangka penyiapan bahan untuk Ratas tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat pra ratas dengan mengundang K/L terkait (surat undangan rapat nomor: Und.590/Ekon/07/2018 tanggal 18 Juli 2018).  Dalam rapat terbatas tanggal 31 Juli 2018, Presiden memberikan mandat kepada Setkab untuk mengawal dan memastikan pencapaian dan adanya laporan perbulan kepada Presiden (yang disiapkan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan	Hasil rakor tindak lanjut akan disampaikan kepada Menko untuk dimuat dalam Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan akan dilaporkan kepada Presiden.  Sekretariat Kabinet juga menyiapkan bahan pidato Presiden dalam pembukaan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) yang disampaikan oleh Seskab kepada Presiden dengan memorandum Nomor: M-1222 tanggal 26 Oktober 2018. Adapun inti arahan Presiden yakni agar dilakukan percepatan pemberian Bantuan Langsung Tunai peremajaan sawit.

NO	SUBSTANSI	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI (OUTCOME)
			pada tanggal 21 Agustus 2018 (surat undangan rapat nomor: Und.691/Ekon/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018), dan terus aktif mengawal arahan presiden untuk menyampaikan laporan per bulan penggunaan B20. Rapat menyepakati matrik rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh K/L dan pada tanggal 16 dan 18 Oktober 2018, Sekretariat Kabinet mengadakan rapat lanjutan untuk membahas progres atas matrik tersebut.  Matrik kegiatan yang telah ditindaklanjuti utamanya adalah:  a. Penetapan 2 regulasi operasionalisasi, yaitu Perpres 66/2018 tentang perubahan kedua tentang Perpres 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Permen ESDM 41/2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.  b. Kemenko Perekonomian telah menetapkan Tim Debottleneck dan Customer Care penggunaan B20.  c. BPSPKS telah memilih Surveyor independen untuk verifikasi penyaluran B20.  d. Dirjen EBTKE atas nama Menteri ESDM telah menetapkan BU BBN untuk Non-PSO.  e. PLN telah menyampaikan kepada Kementerian ESDM dan Menko Perekonomian kebutuhan biodiesel tahun 2018 dan tahun 2019.  f. PT Pertamina telah menyalurkan FAME untuk sektor PSO dan Non PSO melalui 65 Terminal BBM (tambahan Terminal BBM Palopo, Bima, Kolaka, Cepu, dan Cilacap).	

#### C. REALISASI ANGGARAN 2018

Pada Tahun 2018 Kedeputian Bidang Perekonomian mendapatkan Pagu Alokasi Awal sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah). Pagu tersebut digunakan untuk menunjang program dan kegiatan di lingkungan Kedeputian bidang Perekonomian, yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, yaitu:

- Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha;
- 2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan;
- Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri; dan
- 4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan;

Pada bulan Februari 2018 terdapat optimalisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk di Kedeputian Bidang Perekonomian, yang digunakan untuk tunjangan kinerja Pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. Jumlah optimalisasi tersebut adalah sebesar Rp. 1.656.000.000 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah), sehingga pagu Kedeputian Bidang Perekonomian Tahun 2018 setelah

optimalisasi adalah sebesar Rp. Rp. 2.484.000.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah). Adapun penggunaan anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha; Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha (Asdep Ekon-1). Asdep Ekon-1 mendapat pagu awal sebesar Rp. 990.000.000, (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dalam rangka optimalisasi (tunjangan kinerja Sekretariat Kabinet) Asdep Ekon-1 melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga pagu Asdep Ekon-1 setelah optimalisasi adalah sebesar Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Anggaran sebesar Rp. 594.000.000,- tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang ekonomi makro, penanaman modal dan badan usaha dengan menetapkan target *output* 386 rancangan rekomendasi. Dari output yang telah ditetapkan tersebut realisasi output Asdep ekon-1 adalah 425 rancangan rekomendasi (110,19%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 592.504.716,- (99,74%).

b. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan; Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan (Asdep Ekon-2). Asdep Ekon-2 mendapat pagu awal sebesar Rp. 1.170.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah). Dalam rangka optimalisasi (tunjangan kinerja Sekretariat Kabinet) Asdep Ekon-2 melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), sehingga pagu Asdep Ekon-2 setelah optimalisasi adalah sebesar Rp. 702.000.000 (tujuh ratus dua juta rupiah), yang terdiri dari Rp. 600.350.000 untuk kegiatan substansi dan Rp. 101.650.000,- untuk kegiatan Fasililatasi Operasional.

Anggaran sebesar Rp. 702.000.000,- tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan dengan menetapkan target *output 246* rancangan rekomendasi. Dari output yang telah ditetapkan tersebut realisasi output Asdep ekon-2 adalah 332 rancangan rekomendasi (134,96%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 699.403.850,- (99,63%).

 c. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri;
 Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri (Asdep Ekon-3). Asdep Ekon-3 mendapat pagu awal sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dalam rangka optimalisasi (tunjangan kinerja Sekretariat Kabinet) Asdep Ekon-3 melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga pagu Asdep Ekon-3 setelah optimalisasi adalah sebesar Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Anggaran sebesar Rp. 594.000.000,- tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Bidang Percepatan Infrastruktue, Pengembangan Wilayah dan Industri dengan menetapkan target *output 224* rancangan rekomendasi. Dari output yang telah ditetapkan tersebut realisasi output Asdep ekon-3 adalah 335 rancangan rekomendasi (149,55%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 593.291.049,-(99,88%).

d. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan hidup dan Kehutanan; Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan hidup dan Kehutanan (Asdep Ekon-4). Asdep Ekon-4 mendapat pagu awal sebesar Rp. 990.000.000, (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dalam rangka optimalisasi (tunjangan kinerja Sekretariat Kabinet) Asdep Ekon-

4 melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga pagu Asdep Ekon-4 setelah optimalisasi adalah sebesar Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Anggaran sebesar Rp. 594.000.000,- tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan hidup dan Kehutanan dengan menetapkan target *output* 291 rancangan rekomendasi. Dari output yang telah ditetapkan tersebut realisasi *output* Asdep ekon-4 adalah 330 rancangan rekomendasi (113,32%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 593.345.695,-(99,77%).

Empat kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Asdep tersebut diselenggarakan guna mendukung Program Deputi Bidang Perekonomian yaitu, Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian. Dari keseluruhan 4 (empat) kegiatan Deputi bidang Perekonomian total realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.478.545.310,- atau sebesar 99,78%.

Realisasi anggaran Tahun 2018 ini meningkat 6,66% dari Tahun 2017, dimana realisasi anggaran pada Tahun 2017 adalah sebesar 93,12%.

# D. PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NO.7 TAHUN 2017

Guna meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan (meliputi perumusan, penetapan dan pelaksanaan) termasuk pengambilan kebijakan yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas, Presiden pada tahun 2017 menerbitkan Inpres No.7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Negara, dimana sebagai pengganti Inpres No.4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Atas hal tersebut, Sekretariat Kabinet mendapatkan mandat untuk menjalankan manajemen kabinet yang akan mengawal pelaksanaanya, dan memastikan arahan presiden yang diputuskan dalam rapat terbatas atau sidang kabinet tersebut dilaksanakan dengan baik oleh para menteri/kepala lembaga.

Untuk kelancaran pelaksanaannya, Sekretaris Kabinet menerbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet serta membangun aplikasi Sistem Informasi Tindak lanjut Arahan Presiden (SITAP) agar pelaporan tindak lanjut arahan presiden dapat dilaksanakan secara sistematis, cepat, tepat dan mudah.

Semua kebijakan dan regulasi khususnya di tingkat Menteri/Kepala Lembaga harus tetap terkoordinasi dengan baik dibawah koordinasi Menteri Koordinator, sehingga kebijakan/regulasi yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat (termasuk dampak terhadap dunia usaha) harus dilaporkan kepada Presiden dan diputiskan dalam rapat terbatas atau sidang kabinet. Kebijakan/regulasi yang dikeluarkan harus melalui kajian mengenai dampak dan analisis resikonya. Dengan catatan kebijakan/regulasi tersebut tidak boleh bersifat sektoral dan tidak memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi.

Deputi Bidang Perekonomian mendapatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan di bidang perekonomian dengan mitra kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam kurun waktu tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan 46% tindak lanjut dari arahan presiden dengan tingkat kepatuhan pengisian 24% mengingat pelaksanaan pengisian SITAP baru di *launching* & disosialisasikan pada bulan Februari 2018 dan masih dalam tahap uji coba.

Adapun dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan reviuw setiap tahunnya terhadap SITAP sehingga dapat di inventarisir kendala yang dihadapi serta dapat di cari penyelesaiannya.

Berikut tabel matriks Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018, yang telah ditindaklanjuti.

## Tabel 3.7 Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018

	T7 • 1	T 1011	Wa	ktu	Kementeria	n/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat
	Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet
1. 2. 3. 4. 5.	Peningkatan Investasi dan Per Peningkatan Investasi (31 Jan Percepatan Pelaksanaan Beru Persiapan Peluncuran Online Rancangan Anggaran Pendap  a. Penyusunan RPP Online Single Submission sebagai dasar hukum bagi percepatan pelayanan perizinan berusaha b. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (integrasi sistem	uari 2018) Isaha (18 April 2018) Single Submission (1	ri 2018) ) 16 Mei 2018)		l	Kementerian     Sekretariat Negara     Badan Koordinasi     Penanaman Modal     Sekretariat Kabinet	<ul> <li>Pemantauan evaluasi terhadap implementasi OSS ke beberapa daerah (Bogor, Tangerang, Bekasi, Jakarta, dan Surabaya)</li> <li>Rapat Koordinasi Evaluasi Pemantauan OSS pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>Sekretaris Kabinet telah</li> </ul>
	esksisting ke dalam OSS, implementasi sistem OSS)  a. Pembentukan Tim Koordinasi untuk Mensinergikan Perencanaan Perencanaan, Penganggaran, dan	RPerpres tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia (RPerpres)	16 Juli 2018	30 September 2018	Kementerian Perdagangan	<ul> <li>Kementerian         Koordinator Bidang             Perekonomian     </li> <li>Kementerian             Sekretaris Negara</li> <li>Sekretariat Kabinet</li> </ul>	mengirim surat nomor B.577/Seskab/Ekon/12/2018 tanggal 4 Desember 2018 (Hal: Evaluasi Implementasi Kebijakan OSS) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  • Menindaklanjuti arahan Presiden, Sekretariat Kabinet (c.q. Deputi Bidang Perekonomian) menyelenggarakan rapat pembahasan mengenai

·	T	Wa	ktu	Kementeria	n/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat
Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi oleh K/L b. Sinergisitas antar K/L dalam penyelenggaraan event Internasional sebagai ajang promosi pariwisata Indonesia					<ul> <li>Kementerian         Pariwisata</li> <li>Kementerian         Koperasi dan UKM</li> <li>Kementerian         PAN         RB</li> <li>Kementerian         Luar         Negeri</li> <li>Kementerian         Perindustrian</li> <li>Kementerian         Rementerian         Perindustrian     </li> <li>Kementerian         Belautan         Perikanan</li> <li>BKPM</li> <li>BEKRAF</li> </ul>	pengembangan promosi nasional pada tanggal 24 Juli 2018, dengan mengundang K/L terkait (K/L pendukung pada kolom K/L)  Hasil kesepakatan rapat yang intinya untuk membentuk Tim Koordinasi, dengan mengkaji kembali RPerpres tersebut, melalui surat Sekretaris Kabinet surat nomor B.358/Seskab/Ekon/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 kepada Menteri Sekretaris Negara
Menteri dan Pimpinan Lembaga melakukan penghematan belanja barang sesuai perhitungan Menteri Keuangan dan memanfaatkannya untuk penguatan SDM, peningkatan kualitas kesehatan, dan pencapaian prioritas mendesak lainnya.	RInpres mengenai Penghematan Belanja Barang K/L Tahun 2019			Kementerian Keuangan	Kementerian     PPN/Bappenas     Kementerian     Sekretariat Negara	Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juli 2018 yang dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kemensetneg dengan hasil:     a. Tidak diperlukan Inpres untuk mengawal penghematan belanja barang dan pemanfaatannya karena pelaksanaannya telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (PP 17/2017).     b. Penghematan belanja

	W	T	Wa	ktu	Kementeria	n/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat
	Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet
							barang memperhatikan pencapaian target prioritas tahun 2019 serta pencapaian target RPJMN 2015-2019; c. Pembahasan atas pemanfaatan penghematan belanja barang dalam forum trilateral meeting agar memperhatikan arahan Presiden, diantaranya mengenai alokasi anggaran untuk pemberdayaan ponpes, serta kajian atas manfaat penyelesaian gedung perguruan tinggi yang mangkrak; dan d. Pergeseran besaran penghematan belanja barang K/L dan perubahan rencana pemanfaatannya agar disampaikan kepada Presiden.  Hasil Rakor telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No:B.357/Seskab/Ekon/07/ 2018
0. P	Pengembangan Batam (12 Dese		12 Desember	30 Maret 2019	Menko Bidang	• Vamantarian	retaris Kabinet telah
	Penyusunan peraturan yang diperlukan guna mengatur	RPP tentang Perubahan PP	2018 Desember	50 Maret 2019	Menko Bidang Perekonomian	Kementerian     Sekretariat Negara	mengirim surat nomor

	T7	T	Wa	ıktu	Kementeria	n/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat
	Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet
	pelaksanaan rangkap Jabatan Kepala BP Batam secara <i>ex</i> <i>officio</i> oleh Walikota Batam	Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam				<ul> <li>Kementerian         Hukum dan HAM</li> <li>Sekretariat Kabinet</li> </ul>	B.599/Seskab/Ekon/12/2 018 tanggal 19 Desember 2018 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
<b>7.</b> ]	Penataan TKA (6 Maret 2018)						
	Penggunaan TKA  Perpres	Perpres Penggunaan TKA	6 Februari 2018	31 Maret 2018	Menko Bidang Perekonomian	Kementerian     Ketenagakerjaan     Kementerian     Hukum dan HAM     Sekretariat Kabinet	1. Sekretariat Kabinet menyiapkan rancangan Peraturan Presiden mengenai Penggunaan TKA, dan membahasnya beberapa kali dalam rapat dengan kementerian/lembaga di Sekretariat Kabinet, rapatrapat bilateral lainnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.  Setelah melalui serangkaian pembahasan antar kementerian/lembag a, dan dibahas dalam rapat terakhir di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 9 Maret 2018, RPerpres Penggunaan TKA pada akhirnya ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2018, dan

77	T 1011	Wa	ktu	Kementeria	n/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat
Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet
						diundangkan pada tanggal 29 Maret 2018.  2. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet aktif memantau implementasi dari Perpres tersebut, termasuk terlibat aktif dalam penyusunan sejumlah peraturan pelaksanaan dari Perpres 20 Tahun 2018, ikut memantau kesiapan sistem teknologi informasi untuk implementasi perizinan TKA, Selain hal-hal tersebut di atas, monitoring atas implementasi Perpres TKA, juga dilaksanakan terkait mekanisme pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA). Berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan, belum ada kesepahaman antar kementerian dan pemerintah daerah provinsi terkait pembayaran DKPTKA tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Deputi Bidang Perekonomian pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 telah menyelenggarakan rapat guna membahas permasalahan tersebut yang dihadiri oleh para pejabat yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian

	T7	T	Wa	ıktu	Kementeria	an/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat
	Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet
							Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara.  Hasil rapat di Sekretariat Kabinet tersebut selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet dengan Surat Nomor: B.523/Seskab/Ekon/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk dapat segera ditindaklanjuti.
8.	Peningkatan Ekspor (31 Januar			1			
	a. FTA dengan negaranegara yang sangat penting untuk tujuan ekspor produk Indonesia. b. Insentif dan prioritas pada industri yeng berorientasi pada ekspor, sehingga meningkatkan ekspor Indonesia. c. Melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor secara gencar, sehingga Indonesia tidak memiliki ketergan-tungan pada pasar ekspor tradisional. d. Menjajaki kerja sama dengan negara-negara pasar non tradisional yang sebelumnya tidak pernah dilihat atau dilirik sebagai pasar	1) Terselesaikan nya perjanjian perdagangan internasional, seperti Indonesia – Australia CEPA, Indonesa – EFTA, Indonesia – EU CEPA;  2) Terciptanya pasar dan kerja sama dengan negara mitra non tradisional.	31 Januari 2018	-	Kementerian Perdagangan	<ul> <li>Kementerian Keuangan,</li> <li>Kementerian Perindustrian,</li> <li>Kementerian KUKM,</li> <li>BKPM</li> </ul>	hdorong percepatan penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional:  - Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor B.525/Seskab/Ekon/ 10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penyelesaian Ratifikasi First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN- Australia New Zealand FTA dan Perjanjian Perdagangan Internasional.

	· ·	<b>T</b>	Waktu		Kementeria	n/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat	
	Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet	
	ekspor produk-produk Indonesia.							
9. Rar	ncangan Anggaran Pendapatar	n Belanja Negara Ta	hun 2019 (18 Jul	i 2018)				
	Proyek revitalisasi atau pembangunan fisik pasar yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan agar digeser ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga konsentrasi Kementerian Perdagangan benar-benar pada urusan perdagangan yang berkaitan dengan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri dan tidak lagi berkaitan dengan fisiknya	<ul> <li>Proyek revitalisasi pasar;</li> <li>Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018</li> </ul>	14 Agustus 2018	Desember 2019	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul> <li>Kementerian         <ul> <li>Perdagangan</li> </ul> </li> <li>Dinas Perdagangan         <ul> <li>Daerah Provinsi,</li> <li>Kabupaten/kota</li> </ul> </li> </ul>	kepada Menteri PUPR Nomor B.597/Seskab/Ekon/ 12/2018 tanggal 13 Desember 2018 guna meneruskan permohonan Walikota Tangerang guna pembangunan/revitalisas i Pasar Anyar Kota Tangerang.	
10. Pe	mbahasan penyediaan Rumah	bagi ASN, TNI, dar	Polri (7 Novem)	ber 2018)				
	Setwapres agar memimpin, merumuskan dan menyederhanakan serta menyelesaikan program penyediaan, rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.      Menteri ATR dan menteri terkait agar mengidentifikasi secara lebih detail lokasi lahan yang akn dipergunakan untuk penyediaan perumahan bagia ASN, TNI. & Polri.				Menko Bidang Perekonomian		- Setwapres telah menyelenggarakan rapat pada tgl 19 November 2018 Rapat menyepakati bahwa Kementerian PUPR & Kementerian Keuangan perlu mengkaji kembali skema pembiayaan yg tepat untuk penyediaan rumah ASN, TNI, & Polri dan melaporkan ke Setwapres ementerian PUPR melakukan kajian terkait skema pembiayaan dan hasilnya dilaporkan kepada Setwapres	

	T7	T	Waktu F		Kementeria	n/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat	
	Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet	
	 11. Penataan DAS Citarum (16	   Januari 2018)						
	Upaya penataan DAS Citarum dan keputusan- keputusan terkait hal tersebut telah sangat jelas disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman. Oleh karena itu, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet agar menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyinergikan seluruh K/L, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya dalam melakukan penataan DAS Citarum, sehingga dapat segera bekerja				Menko Bidang Kemaritiman		Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.	
12. Pe	erkembangan Kebijakan Satu I	Peta (5 Februari 2018	8)					
	. Rapat Terbatas pada tanggal 13 Juni 2017 dan 5 Februari 2018. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden menyetujui usulan Menko Bidang Perekonomian bahwa data statistik sektor sosial, ekonomi	_			Menko Bidang Perekonomian		Guna mengakselerasi kebijakan tersebut, Sekretariat Kabinet mengawal pelaksanaan serta melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan perundangundangan yang dibutuhkan untuk dapat mempercepat pelaksanaan KSP sebagai contoh Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berbagi Data yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2018.	

		<b>T</b>	Wa	ktu	Kementeria	n/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat	
	Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet	
13. R	UU Pertanahan (23 Oktober 20	18)						
	1. Seluruh jajaran pemerintah agar memiliki pemahaman yang sama terkait RUU Pertanahan sebelum melangkah ke dalam pembahasan di DPR.  2. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan kembali pembahasan mengenai permasalahan tersebut, sehingga hasilnya menjadi lebih matang dan utuh.  3. Menko Bidang Perkonomian, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, dan pimpinan K/L terkait agar menggunakan momentum proses pembuatan Undang-Undang (UU) baru untuk memperbaiki regulasi atau keadaan yang ada saat ini  4. Menko Bidang Perkonomian, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, dan pimpinan K/L terkait agar Memanfaatkan pembahasan RUU				Menko Bidang Perekonomian	Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul> <li>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kembali pembahasan mengenai permasalahan yang disampaikan oleh Menteri LHK (telah diselenggarakan rapat t pada tanggal 21 November 2018 dengan mengundang K/L terkait. Kesepakatan rapat pada intinya meminta masukan secara tertulis mengenai substansi RUU Pertanahan kepada K/L terkait.</li> <li>Kemenko Bidang Perekonomian menyelenggarakan rapat lanjutan guna membahas masukan tertulis dari seluruh K/L terkait untuk mematangkan RUU Pertanahan.</li> <li>Kemenko Bidang Perekonomian melaporkan kepada Presiden hasil pembahasan dengan K/L terkait penyempurnaan RUU Pertanahan sesuai arahan Presiden.</li> </ul>	

	W	T	Wa	ıktu	Kementerian/Lembaga (K/L)		Tindak Lanjut Sekretariat	
	Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet	
14. La	njutan Strategi Kebijakan Me	mperkuat Cadangai	n Devisa (14 Agu	stus 2018)	_			
	1. Pimpinan K/L yang bertanggung jawab terhadap kebijakan penggunaan TKDN agar benar-benar mengikuti pelaksanaan kebijakan dimaksud di lapangan dan memberikan laporan pelaksanaan TKDN kepada Presiden setiap bulan.  2. Sebagaimana disampaikan Menteri Perindustrian bahwa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan tim TKDN belum ada. Keppres tersebut agar segera disiapkan				Menko Bidang Perekonomian		- Surat Menko Bidang Perekonomian kepada K/L terkait, Nomor S- 298/M.Ekon/09/2018, tanggal 17 September 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meminta kepada Menteri/Lembaga agar pimpinan Kementerian/Lembaga terkait untuk memberikan laporan pelaksanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Impor kepada Presiden setiap awal bulan. Sekretariat Kabinet terus memonitor perkembangan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara terkoordinir dengan K/L terkait - Kepres No. 24/2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri telah ditetapkan pada tanggal 17 September 2018. Tindaklanjut dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018, Saat ini Kemenko Maritim sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku ketua timnas P3DN tentang Kelompok Kerja Timnas	

T	Kegiatan Target Output		Waktu		n/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat	
Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet	
						P3DN.	
15. Mengkorporasikan petani (12 S	eptember 2017)	_					
diperoleh berdasarkar pemantauan ketiga lokas yang dilakukan pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 tersebut kemudiar dilaporkan oleh Deput Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet. Inti dar laporan tersebut adalah bahwa peranan sektor swasta dalam rangka mewujudkar korporasi petani yang berskala ekonomi tingg sangat diperlukar sebagaimana praktek rintisar korporasi petani d Tasikmalaya. Selain itu untuk mewujudkan skala ekonomi yang besar dengar pengelolaan lahan sawar seluas ± 5000 Ha melalu mekanisme konsolidas lahan, sangat bergantung pada kontur tanah dar budaya masyarakat setempat. Untuk memperdalam kajian yang dilakukan, maka dilakukan pemantauar lanjutan untuk meliha implementasi rintisar korporasi petani wilayar Kabupaten Magelang Jawa Tengah pada akhir Januar 2018. Selanjutnya, untuk						Memo laporan kajian tersebut dikirimkan melalui Surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian Pertanian Nomor B.146, tanggal 5 April 2018, perihal Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani Inti dari kajian adalah bahwa untuk mewujudkan korporasi pertanian sesuai arahan Presiden dalam Ratas tentang mengkorporasikan petani. Terdapat beberapa upaya yang masih perlu dilakukan oleh Kementerian Pertanian antara lain:  e. Membuat model bisnis korporasi petani sebagai pilot project untuk selanjutnya dapat direplikasi di beberapa tempat;  f. Memfasilitasi kemitraan antara swasta sebagai off taker dan avails dengan petani sebagai penyedia bahan baku; g. Percepatan integrasi kartu tani; h. Akses pembiayaan perbankan melalui KUR.	

	W 11		Wa	ıktu	Kementeria	n/Lembaga (K/L)	Tindak Lanjut Sekretariat	
	Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet	
	melaporkan hasil kajian atas							
	keseluruhan rangkaian							
	pemantauan yang telah							
	dilakukan, Deputi Bidang							
	Perekonomian							
	menyampaikan memo							
	kepada Sekretaris Kabinet							
	melalui memo Nomor							
	M.235, tanggal 2 April 2018.							
1	16. Restorasi Gambut (11 Janua	ari 2017)						
	FGD tersebut bertujuan	_				_	Rakor membahas progres	
	untuk mengidentifikasi						pelaksanaan restorasi gambut oleh	
	konsep R3 yang						BRG dan disampaikan bahwa	
	diberlakukan dalam						menindaklanjuti arahan Presiden	
	pengelolaan gambut,						dalam Rapat Koordinasi Nasional	
	mengidentifikasi						Pengendalian Karhutla sebagai	
	implementasi konsep R3 di						upaya persiapan Asian Games.	
	lapangan, dan						Tahun 2018, BRG dengan	
	mengidentifikasi						Badan Geologi dan Tim Restorasi	
	permasalahan umum						Gambut Daerah (TRGD) Prov.	
	restorasi lahan gambut dan						Sumatera Selatan telah melakukan	
	penerapan R3.						upaya untuk meminimalisir	
	Setkab pada tanggal 6						potensi karhutla di Prov. Sumatera	
	Agustus 2018						Selatan.	
	menyelenggarakan rapat						Melalui Presiden dengan nomor	
	koordinasi progres						memo M.921 tanggal 17 Agustus	
	pelaksanaan restorasi gambut						2018, Setkab mendorong agar	
	yang dihadiri oleh Deputi						menteri LHK mempercepat	
	Bidang Konstruksi Operasi						penyelesaian penyusunan rencana	
	dan Pemeliharaan BRG,						kerja pengelolaan gambut yang	
	Deputi Bidang Edukasi						akan dilakukan sebagai pedoman	
	Sosialisasi Partisipasi dan						perusahaan HTI.	
	Kemitraan BRG, dan							
	Direktur Pengendalian							
	Kerusakan Gambut,							
	Kementerian Lingkungan							
	Hidup dan Kehutanan.			I		1		

Verioten Towart Output		Waktu		Kementerian/Lembaga (K/L)		Tindak Lanjut Sekretariat	
Kegiatan	Target Output	Mulai	Batas	Utama	Pendukung	Kabinet	
Rapat koordinasi (rakor) bertujuan untuk mengetahui capaian terkini (per Agustus 2018) dari pelaksanaan restorasi gambut di 7 provinsi prioritas beserta kendala yang dihadapi hingga di tingkat tapak. Selain itu, untuk mengetahui progres tindak lanjut arahan		Mulai	Datas	Otama	Tendukung		
Presiden yang disampaikan dalam Rapat Terbatas maupun Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Presiden mengenai restorasi gambut dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).							

### E. SURVEI KEPUASAN MITRA KERJA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Deputi Bidang Perekonomian telah melakukan survei Kepuasan Pengguna Layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Kabinet kepada Kementerian/Lembaga.

Responden terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) Eselon I pada K/L yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang Perekonomian, baik dalam permintaan rekomendasi kebijakan, izin prakarsa RPUU maupun dalam fasilitasi sidang kabinet. Survei dilaksanakan pada bulan November s.d. Desember 2018 dengan konsep pertanyaan tertutup.

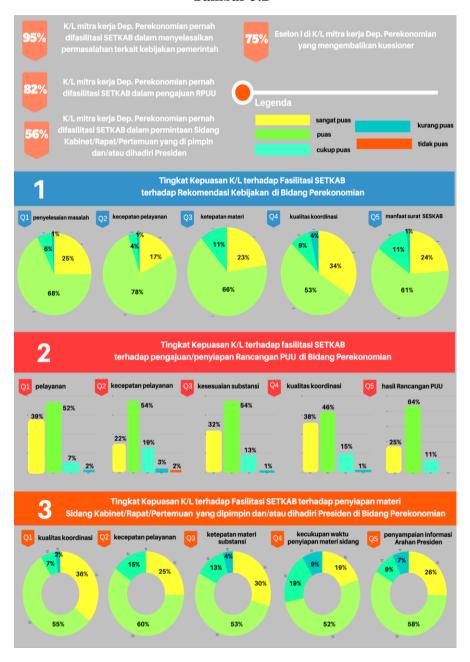
Adapun hasil survei berdasarkan indikator yang di survei pada kepuasan mitra kerja adalah indikator kinerja utama yang tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Perekonomian. Hasil survei tersebut menjadi dasar Deputi Bidang Perekonomian untuk kedepannya lebih baik lagi dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap mitra kerja guna menyelenggarakan dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian yang profesional dan andal.

Tabel 3.8 Tingkat Kepuasan Mitra Kerja

No	Tingkat Kepuasan	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Kurang Puas	Tidak Puas
1	Penyelesaian permasalahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian	17% s.d. 34%	53% s.d. 78%	4% s.d. 11%	1% s.d. 4%	0%
2	Pengajuan/penyiapan rancangan PUU di bidang perekonomian	22% s.d. 39%	46% s.d. 64%	1% s.d. 19%	1% s.d. 3%	2%
3	Penyiapan bahan sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden di bidang perekonomian	19% s.d. 36%	52% s.d. 60%	7% s.d. 19%	2% s.d. 9%	0%

Berikut Gambar 3.2 adalah infografis hasil dari survei tingkat kepuasan mitra kerja terhadap fasilitasi Deputi Bidang Perekonomian selama tahun 2018.

### Gambar 3.2



# **Penutup**

#### A. DINAMIKA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa capaian strategis tahun 2018 dapat dikategorikan "sangat baik". Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1. Peran dan posisi Deputi Bidang Perekonomian dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, workshop, dan lingkungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- 2. Munculnya isu-isu penting bidang perekonomian yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah dari terutama

- terkait program prioritas nasional yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
- 3. Keterlibatan Deputi Bidang Perekonomian sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan, atau Kelompok Kerja tingkat Nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.

Meskipun pencapaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018 dapat dikategorikan sangat baik, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya:

- 1. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis.
- 2. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi berdasar RAPK, yang dapat dilihat beberapa saran penyempurnaan belum ditindaklanjuti, seperti belum seluruhnya pegawai mendapat dukungan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
- 3. Realisasi kegiatan belum sesuai dengan rencana atau jadwal yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa penugasan yang sifatnya mendesak dan *urgent*, disisi lainnya terdapat persoalan jumlah SDM.
- 4. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam

- menunjang pelaksanaan tugas, seperti ruang kerja, terbatasnya akses informasi terkait kebijakan pemerintah di bidang perekonomian (buku, jurnal, majalah, dan koran).
- Belum optimalnya dukungan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas sehinga menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian.

#### **B. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS**

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

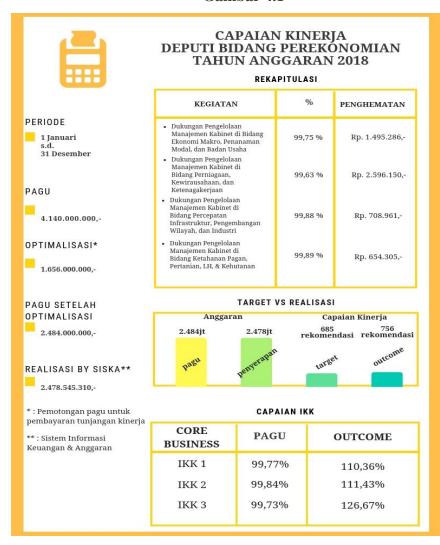
- Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- 2. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan anggaran dan pelayanan anggaran.
- Mendorong pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti saran yang disampaikan Deputi Bidang Perekonomian dalam hasil monitoring dan evaluasi berdasar RAPK,

- seperti pemenuhan TIK.
- 4. Mendorong Pejabat/Pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian untuk mengatur pelaksanaan tugas baik yang sifatnya mendesak dan *urgent* dengan tugas yang direncanakan atau dijadwalkan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan pelaksaanan tugas.
- 6. Mendorong pihak-pihak terkait untuk mengadakan SDM yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas dengan tugas dan fungsi terkait manajemen kabinet bidang perekonomian. Selain itu, diusulkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengelolaan atas jabatan fungsional terkait analis kebijakan dan substansi RPUU.
- Pembangunan sistem persuratan/agenda yang terintegrasi dari level/unit terendah hingga tertinggi sehingga mudah dalam mengakses infromasi mengenai data surat/laporan dan administrasi lainnya.
- 8. Peningkatan fungsi pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas permasalahan kebijakan dan program pemerintah dan implementasi PUU guna peningkatan

- pelaksanaan manajemen kabinet dengan mengundang Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk duduk bersama membahas isu-isu strategis yang muncul bersama dalam rapat dan sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden, dan membahas efektivitas (*progress*) tindak lanjut atas arahan presiden berbasis teknologi (SITAP).
- 9. Meningkatkan *networking*, sinergi, dan koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga/Instansi diantaranya melalui: (i) peningkatan keterlibatan dalam membahas RPUU dalam keanggotaan Panitia Antar Kementerian (PAK); dan (ii) peningkatan hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan, guna merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

#### C. REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA

#### Gambar 4.1



#### D. LAMPIRAN

Di dalam lampiran terdapat informasi diantaranya:

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian

Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja periode Tahun 2018

Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran periode Tahun 2018

Lampiran 4: Formulir checklist muatan substansi laporan kinerja

#### LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian

The Only Way

To Do Great Work

Is To Love What You Do

**STEVE JOB** 



## REPUBLIK BUNCHERA

#### PERJANJIAN KINERIA TAKUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kumi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si. Jahatan : Deputi Bidang Perekonomian

eelenjutnye dieebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sankai.

Pihak Kedua, Sekretaria Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Phammo Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 50 Januari 2018 Pihak Pertama, Deputi Bidang Perekonomian

Ir. Agustina Murbaningsih, M.St.

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Perser
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Perser
		Persentase rekomendasi terkait materi aidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persec

Kes	ria:	tan

- Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi, Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha
- Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan
- Dukungan Pengelolsan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri
- Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

Total Anggaran

Anggaran Rp.990.000.000,-

Rp.1.170.000.000,-

Rp.990.000.000,-

Rp.990.000.000,-

Rp.4.140.000.000,-

Pihak Kedua, Sekretaria Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Praming Anung Wibowo, M.M.

Jakarta,30 Januari 2018 Pihak Pertama, Deputi Bidang Perekonomian

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

## LAMPIRAN 2

## **Matriks Capaian Kinerja Periode Tahun 2018**

69

The best preparation
for good work tomorrow
is to do good work today

**ELBERD HUBBARD** 

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL.	KE PRESIDEN	NO. SESKAE
39.(2018) 2018-01-22	Permohonan Audiensi Managing Director International Monetary Fund (IMF)	02/01/2018	M-01
5.(2018) 2018-01-04	Antisipasi dan Solusi Menanggulangi Gejolak Inflasi dalam rangka Meningkatkan Stabilitas dan Ketahanan Ekonomi Nasional	03/01/2018	M-04
1.(2018)	Laporan pertemuan financial times-Asian Infrastructure Investment Bank (FT-AIIB) Summit tanggal 1 November 2017 di Hongkong	00/01/2018	M-12
12.(2018) 2018-01-05	Kpd Menteri Keuangan perihal permohonan penambahan dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Alor Tahun 2016	05/01/2018	M-09
11.(2018) 2018-01-05	Perkembangan terkini sektor jasa keuangan dan permohonan waktu kepada Presiden untuk memberikan arahan dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2018	08/01/2018	M-15
4 (2018) 2018-01-04	Laporan hasii rakor (lingkat Menteri) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM : Evaluasi KUR Tahun 2017 dan Pelaksanaan KUR Tahun 2018		
17 (2018) 2018-01-11	Laporan pelaksanaan tugas tirn pengendalian inflasi pusat (TPIP) periode triwulan (TW) III 2017	09/01/2018	M-22
19.(2018)	permintaan jadwal rapat kerja Presiden dengan Gubernur dan Ketua DPRD provinsi		
296.(2018) 2018-05-07	Laporan kunjungan kerja kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	10/01/2018	M-25
373 (2017) 2017-08-04	Laporan Gubernur BI tentang perkembangan eonomi terkini dan keputusan rapat dewan Gubernur BI	KAR	
622.(2017) 2017-12-20	Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Barito Timur (+R. Surat)		
33.(2018) 2018-01-17	Permohonan Waktu kepada Presiden untuk Menyerahkan Penghargaan dan Memberikan Arahan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2018	10/01/2018	M-24
551.(2017) 2017-11-15	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha		
3.(2018) 2018-01-04	Kpd Marzuki Usman perihal penyampaian apresiasi dan ucapan terima kasih		
16.(2018) 2018-01-11	Permohonan izin prakarsa multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting (MLI)		
20.(2018) 2018-01-11	Laporan perjalanan dinas Menteri BUMN ke Uni Emirat Arab dan Spanyol	12/01/2018	M-29
36.(2018) 2018-01-18	Konsolidasi Investasi antara Pemerintah Pusal dan Daerah	12/01/2015	M-30
35./2018) 2018-01-18	Tindak lanjut laporan pertemuan sherpa G20 ke-1 pada bulan Des, 2017 di Barîloche, dan Rencana Penyelenggaraan KTT G20 pada bulan Desember 2018 di Buenos Aires, Argentina (+ Memo ke Mensesneg)		
15.(2018) 2018-01-11	Update angka pengangguran terbuka	,73407	
41,(2018) 2018-01-22	Usulan ınsentif fiskal sektor industri	15/01/2018	M-37
30.(2018) 2018-01-17	Laporan realisasi APBN-P tahun 2017		E
38.(2018) 2018-01-19	R, Surat Seskab. Kpd: Menkeu, Menpan, Perihal: Kajian atas efektivitas Pelaksanaan Keppres 33 lahun 1986 (Laporan Raapat pembahasan mengenai lindak lanjut laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) Pejabat Negara		
53.(2018) 2018-01-25	Permohonan rapat kabinet terbatas mengenai Komite Nasional Keuangan Syariah	16/01/2018	M-50

NO. MEMO ASDEP	PERHAL	ŘE PRESIDEN	NO. SESKAB
51.(2018) 2018-01-25	Laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasonal tenlang penandatanganan nota kesepahaman sama pembangunan reverse linkage antara Indonesia dengan Islamic Development	15/01/2018	M-51
24.(2018) 2018-01-15	Silaturahim masyarakat asuransi Indonesia bersama Presiden RI	i gran	
121.(2018) 2018-03-01	Permohonan untuk berlemu dengan Sekretaris Kabinet dari US-ASEAN Business Council		
623.(2017) 2017-12-20	Permohonan persetujuan pengakhiran perjanjian BOT gedung Wisma Bakrie II antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT Bakrie Swasakti Utama		
56.(2018) 2018-01-29	Antisipasi gejolak sosial akibat revisi undang-undang tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP)		TO ST
64.(2018) 2018-01-31	Laporan Rapat Pembahasan Kenaikan Tarif PNBP Kementerian Kesehatan	01/02/2018	M-126
65.(2018) 2018-01-31	Penyaluran dana perimbangan tahun anggaran (TA) 2017 kota Surabaya		AT SY
71.(2018) 2018-02-02	Permohonan audiensi board of directors Asian Infrastructure investment bank dengan Presiden	Lie	
20.(2018) 2018-01-11	Laporan perjalanan dinas Menteri BUMN ke Korea Selatan, London, dan Belanda	Y.	
72.(2018) 2018-02-02	Kpd Mensesneg perihal Penerusan Informasi mengenai Akomodasi terkari pelaksanaan KTT G20 pada langgal 30 November - 1 Desember 2018 di Buenos Aires, Argentina	05/02/2015	M-145
107.(2018) 2018-02-22	Permohonan lestimoni Buku Kisah Sukses Dana Desa		
55.(2016) 2018-01-29	Penyelesaian revisi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pergeseran pengawasan kelentuan larangan dan pembatasan (Lartas) dari Border ke Post Border	12/02/2018	M-165
96.(2018) 2018-02-19	Laporan realisasi penanaman modal periode Triwulan IV tahun 2017, dan kumulatif Bulan Januari- Desember tahun 2017		
90.(2018) 2018-02-15	Laporan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Presiden tentang perkembangan indeks harga konsumen/inflasi Januari 2018		
66 (2018) 2018-01-31	Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2018	12/02/2018	M-175
105,(2018) 2018-02-21	Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2018	12/02/2018	M-181
91.(2018) 2018-02-15	Perlindungan hukum peternakan dan kemakmuran rakyat	12/02/2018	M-183
114.(2018) 2018-07-26	Penyampaian hasil rapat dewan Gubernur BI tanggal 17-18 Januari 2018 dan 14-15 Februari 2018	12/02/2015	M-180
109.(2018) 2018-02-23	Laporan Perjalanan Dinas Menteri Keuangan ke Kenya dan Arab Saudi	01/03/2018	M-231
117.(2018) 2018-02-28	Penyampaian Buku Laporan Kegiatan Kepedulian Sosial Bank Indonesia 2017		I III
138 (2018) 2018-03-07	Laporan Tindak Lanjut Perubahan Kebijakan Insentif Perpajakan dalam rangka Mendorong Investasi	05/03/2018	30-244
99.(2018) 2018-02-20	Laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden tentang Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Tahun 2017	.05/03/2018	M-245
162,(2018) 2018-03-16	Silaturahmi Masyarakat Asuransi Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia	06/03/2018	M-257
165 (2018) 2018-03-19	Hasil High Level Meeting Eselon I BI, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan	06/03/2018	M-258

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
164.(2018) 2018-03-19	Penyampaian ucapan terima kasih Gubernur BI kepada Sekretaris Kabinet dan kesepakatan High Level Meeting koordinasi pengendalian inflasi tim pengendalian inflasi pusat		
177.(2018) 2018-03-23	Penyapaian laporan review pembentukan holding BUMN sektor minyak dan gas		
183.(2018) 2018-03-27	Permohonan Waktu Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 (IHPS II 2017) dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	09/03/2018	M-267
212.(2018) 2018-04-06	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14-15 Februari 2018 dan 21-22 Maret 2018	09/04/2018	M-388
220.(2018) 2018-04-09	permohonan memberikan pengarahan dan menyerahkan penghargaan pembangunan daerah dalam pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan Nasional 2018	10/04/2018	M-397
331.(2018) 2018-05-25	Laporan rapat pembahasan Rpermen tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (RPP PPh)		
175.(2018) 2018-03-23	Kunjungan Delegasi Satgas Nasional Percepatan Berusaha RI ke PEA dalam rangka Melakukan Benchmarking Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Dubai		gn g
182.(2018) 2018-03-27	Laporan Kunjungan Kerja ke Davos, Swiss dan Paris, Perancis pada tanggal 23-30 Januari 2018 (Kepala BKPM)	12/04/2018	M-422
233 (2018) 2018-04-12	Penyampaian laporan pelaksnaan tugas dan wewenang BI triwulan IV 2017	16/04/2018	M-441
230.(2018) 2018-04-10	Laporan Menkeu mengenai hasil pertemuan Trilateral pembentukan mega Islamic Bank/World Islamic Investment Bank di Jeddah, Arab Saudi	16/04/2018	M-440
198 (2018) 2018-04-02	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2018 di Yogyakarta	-5	
197.(2018) 2018-04-02	Laporan perjalanan dinas Menteri BUMN ke Qatar, Swiss dan Inggris	18/04/2018	M-454
223 (2018) 2018-04-09	laporan mengikuti program Temasek Foundation International Leaders in Economic Development (TFILED) ke-5 Tahun 2018 di Singapura		
240.(2018) 2018-04-16	Penyampaian Apresiasi Startegi Nasional Tahun 2019 (+R, Surat Seskab ke Menteri PPN)	19/04/2018	M-450
241.(2018) 2018-04-16	Laporan Kunjungan Kerja ke Seoul, Korea Selatan tanggal 22-23 Februari 2018	19/04/2018	M-458
238.(2018) 2018-04-13	Penyampaian Iaporan Ministerial Conference Southeast Asia Regional Programme (SEARP) Organisasi for Economic Co-Operation and Development (OECD)	20/04/2018	M-465
226.(2018) 2018-04-09	Laporan Otorilas Jasa Keuangan mengenai Perkembangan Sektor Jasa Keuangan	20/04/2018	M-464
234.(2018) 2018-04-12	Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat Negara	20/04/2018	M-467
252 (2018) 2018-04-18	Laporan hubungan Indonesia-Jepang dan problema investasi perusahaan Jepang di Indonesia	25/04/2018	M-475
257.(2018) 2018-04-23	Usulan pencanangan gerakan ekonomi rakyat dan peringatan hari kebangkitan nasional 2018	25/04/2018	M-473
265.(2018) 2018-04-26	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas mengenai Pengelolaan Dana Haji		
234.(2018) 2018-04-12	Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat Negara		

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
268.(2018) 2018-04-27	Laporan kegiatan pertemuan masyarakat bimbingan teknis dan sosialisasi kartu masyarakat indonesia di luar negeri		
271.(2018) 2018-04-27	Permohonan izin Prakarsa Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi berkenaan dengan Keperluan Perpajakan		
485.(2018) 2018-08-27	Penyampaian Laporan Hasil Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Buenos Aires, Argentina	02/05/2018	M-500
272.(2018) 2018-04-27	Laporan Tambahan Utang Februari Tahun 2018	02/05/2018	M-499
280.(2018) 2018-04-30	Penyampaian Laporan Rangkaian Sidang Tahunan ke-43 Bank Pembangunan Islam Tahun 2018	02/05/2018	M-507
355.(2018) 2018-05-03	Kpd., Menkeu & MenPPN perihal Permohonan Penyampaian Hibah dan Audiensi Japan International Halalan Thaiban Union kepada Presiden		
225,(2018) 2018-04-09	Kpd Menkeu perihal Permohonan Penjelasan (Pertirnbangan) tentang Pengeluaran Impor Barang Pindahan	- 1	No.
277.(2018) 2018-04-30	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018		175
290.(2018) 2018-05-04	Kpd Sdr Yustinus Prastowo (Dir. Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis) perihal Penyampaian Apresiasi dan Ucapan Tenma Kasih	CER	
291.(2018) 2018-05-04	Penyampaian laporan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2017	08/05/2018	M-553
230 (2017) 2017-05-08	laporan kegiatan temu investor dalam rangka penjualan surat utang negara denominasi YEN (Samurai Bonds) tahun 2018	09/05/2018	M-559
302.(2018) 2018-05-09	usulan rapat internal mengenai nilai tukar rupiah	09/05/2018	M-558
306.(2018) 2018-05-11	Penyampaian Testimoni dalam Buku Kisah Sukses Dana Desa "Lilin-Lilin Cahaya di Ufuk Fajar Nusantara		
308.(2018) 2018-05-11	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21-22 Maret 2018 dan 18-19 April 2018	14/05/2018	M-566
326.(2018) 2018-05-24	permohonan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusal (LHP LKPP) tahun anggaran 2017	25/05/2018	M-605
332.(2018) 2018-05-25	Laporan Hasil Rangkaian Pertmuan Menteri Keuangan ASEAN dan Pertemuan terkait lainnya di Singapura tanggal 3-6 April 2018	28/05/2018	M-609
331.(2018) 2018-05-25	Permohonan Penelapan Peraluran Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (RPP PPH UMKM)		IN THE
314.(2018) 2018-05-14	Kpd Menko Perekonomian perihal Penerusan Hasil Diskusi dengan Industri Perbankan mengenal Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan POLRI		Page 1
342 (2018) 2018-05-30	Laporan Menko bidang perekonomian kepada Presiden tentang pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Triwulan I 2018	31/05/2018	M-634
344.(2018) 2018-05-31	Penyampaian Laporan dan Briefingsheet laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Tahun 2017	04/06/2018	M-637
362 (2018) 2018-06-21	laporan hasil rapat koordinasi Panifia Nasional Penyelenggara rangkalan pertemuan tahunan IMF-WB 2018 (AM 2018)		
358.(2018) 2018-06-08	Laporan Menteri Keuangan mengenai Hasil Rangkaian Pertemuan Musim Semi Bank Dunia dan Dana Meneter Internasional 2018	26/06/2018	M-676
361.(2018) 2018-06-21	Laporan Perjalanan Dinas Kepala Badan Pusat Statistik ke Turki	28/06/2018	M-684
286.(2018) 2018-05-03	Permohonan Penyampaian Rencana Ratifikasi Protocol to Implement the Sevent Package of Commitmens on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement of Services		1

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
336.(2018) 2018-05-25	Rencana Penyelenggaraan Festival ke-3 di Moskow, Rusia		75.11
372.(2018) 2018-05-29	laporan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan tanggal 16-19 Mei 2018	02/07/2018	M-892
373 (2018) 2018-06-29	реглюнопап penetapan peraturan Presiden Protocol 7 custom transit system		
380,(2018)	rapat koordinasi nasional pengawasan intern Pernerintah 2018	03/07/2018	M-703
376.(2018) 2018-07-92	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2017		
385.(2018) 2018-07-03	laporan tahunan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017	05/07/2018	M-742
394.(2018) 2018-07-09	Tindak Lanjut Penyelesaian atas Permohonan 12 (Dua Belas) Kasus Kerugian Negara yang Mengajukan Permohonan Banding Administrasi kepada Presiden di Lingkungan Kementerian Keuangan	10/07/2018	M-753
387.(2018) 2018-07-03	Kpd Ketua Dewan Jarninan Sosial Nasional perihal (Laporan Triwulan I Ttahun 2018 Dewan Pengawas BPJS Ketenegakerjaan, Khusus Investasi)	11/2	
397.(2018) 2018-07-11	Permohonan Membuka dan Memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018	13/07/2018	30-771
322.(2018) 2018-05-21	Pendapat BPK terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) (+R.Surat ke Menag, Menkeu, Kepala BPKH)	13/07/2018	M-759
352.(2018) 2018-06-06	Laporan Realisasi Penanaman Modal Periode Triwulan I Tahun 2018	13/07/2018	88-770
118.(2018) 2018-02-28	Optimalisasi Peran Indonesia di APEC untuk Peningkatan Pembangunan Inklusif dalam rangka Ketahanan Nasional	13/07/2018	M-768
319.(2018) 2018-05-18	Laporan Pelaksanaan Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan	13/07/2018	M-776
318.(2018) 2018-05-18	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ke Irlandia, Perancis dan Inggris tanggal 12-17 Maret 2018	13/07/2018	M-775
347.(2018) 2018-06-04	Laoran Kunjungan Kerja ke Dubai, Persatuan Emirat Arab	13/07/2018	M-774
194,(2018) 29/03/2018 TW1	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ke Kuala Lumpur, Malaysia	13/07/2018	M-773
376.(2018) 2018-06-29	Permohonan izin penjualan BMN Eks KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam (d.h. Total E7P Indonesia) + R. Surat ke Menkeu	13/07/2018	M-780
370.(2018) 2018-06-26	Kpd: Ketua Persatuan Insinyur profesional Indonesia (PIPI). Perihal: Permohonan sponsorship untuk pengiriman delegasi business ke Doha, Qatar		
402.(2018) 2018-07-11	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 April s.d. 28-29 Juni 2018	16/07/2018	M-783
	Permohonan Audiensi dan Membuka Pameran Otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Tahun 2018	16/07/2018	M-755
365.(2018) 2018-05-26	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017		
404.(2018) 2018-07-11	Penyampaian Laporan Hasil Rangkaian Pertemuan Sidang Tahunan Asian Development Bank ke- 51	16/07/2018	M-782
193.(2018) 2018-03-29	Penyampaian Laporan Resume Buku Karya Kwik Kian Gie "Menelusuri Zaman, Memoar dan Catatan Kritis		
405.(2018) 2018-07-11	Laporan Kunjungan Kerja ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	16/07/2018	M-790

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL,	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
307.(2018)	Tindak Lanjut Atas Surat dari Asosiasi Fastener Indonesia	546	
395 (2018) 2018-07-09	Kpd Dekan FEB Universitas Indonesia (Prof Ari Kuncoro, PhD) perihal Penyampaian Apreslasi dan Ucapan Terima Kasih		TERM
420,(2018) 2018-07-23	Kp Wapres perihal Permohonan kepada Wakil Presiden untuk Memnbuka Rountable High Level Discussion Indonesia: Pusat Ekonomi Islam Dunia*di Bappenas, pada tanggal 25 Juli 2018		
429.(2018) 2018-07-25	Kpd: Mensesneg, Perihal: Hasil Rapat Pembahasan mengenai Pengembangan Promosi Nasional		
430.(2018) 2018-07-25	Kpd Menkeu dan Men PPN perihal Penghematan Belanja Barang K/L TA 2019 (Laporan Rapal Koordinasi Penghematan Belanja Barang K/L Pagu Anggaran Tahun 2019)		
425 (2018) 2018-07-23	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas mengenai Ministerial Council Meeting 2018 - OECD di Perancis (+R. Surat ke Menteri PPN)	30/07/2918	M-845
437.(2018) 2018-07-31	Penyampaian (aporan tahunan PT BEI tahun 2017	02/08/2018	M-867
442.(2018) 2018-08-01	Laporan rapet koordinasi Rperpres tentang pembentukan dan pengekolaan dana investasi real estate (DIRE)		
459.(2018) 2018-08-10	Laporan Rapat Kelompok Kerja Pusat Tim Pengendalian Inflasi Pusat		
461.(2018) 2018-08-10	Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Triwulan I 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia	10/08/2018	M-905
402 (2018) 2018-07-11	penyampalan hasil rapat dewan gubernur BI pada 28-29 Juni 208 dan 18-19 Juli 2018	15/08/2018	M-917
472.(2018) 2018-08-16	Laporan Rapat Pembahasan Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing		
474.(2018) 2018-08-20	Laporan kegiatan temu investor surat berharga negara (SBN) di Eropa tahun 2018	24/08/2018	W-948
477.(2018) 2018-08-21	antisipasi dan solusi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi seluruh K/L atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019	24/06/2018	M-947
486 (2018) 2018-98-28	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2017	29/08/2018	M-964
485,(2018) 2018-08-27	Penyampaian Laporan Hasi Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Buenos Aires, Argentina	29/06/2018	M-961
490,(2018) 2018-08-28	Penyampaian Berita Resmi Statistik 15 Agustus 2018	29/06/2015	M-971
491.(2018) 2018-08-28	Penolakan investasi republik rakyat tiongkok (RRT) dan Perkembangan investasi screening di Uni Eropa		
493 (2018) 2018-08-28	Permohonan keringanan pajak pada ITB dan ITERA	31/06/2018	M-585
492.(2018) 2018-08-28	Penugasan Liason officer Kernenterian/ Lembaga telap diperlukan pada pelayanan terpadu satu pintu pusat di BKPM		
489.(2018) 2018-08-28	Laporan realisasi penanaman modal (PM) Periode Triwulan (TW) II 2018 dan Periode Semester (SMT) I 2018	31/08/2018	M-982
488.(2018) 2018-08-28	laporan pelaksaaan operasional sistem online Single Submission (OSS)	31/08/2018	W-981
507,(2018) 2018-09-04	Usulan Subsidi Pasang Baru Listrik 450 VA	06/09/2010	14-1013

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
336.(2018) 2018-05-25	Rencana Penyelenggaraan Festival ke-3 di Moskow, Rusia		75.11
372.(2018) 2018-05-29	laporan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan tanggal 16-19 Mei 2018	02/07/2018	M-892
373 (2018) 2018-06-29	реглюнопап penetapan peraturan Presiden Protocol 7 custom transit system		
380,(2018)	rapat koordinasi nasional pengawasan intern Pernerintah 2018	03/07/2018	M-703
376.(2018) 2018-07-92	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2017		
385.(2018) 2018-07-03	laporan tahunan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017	05/07/2018	M-742
394.(2018) 2018-07-09	Tindak Lanjut Penyelesaian atas Permohonan 12 (Dua Belas) Kasus Kerugian Negara yang Mengajukan Permohonan Banding Administrasi kepada Presiden di Lingkungan Kementerian Keuangan	10/07/2018	M-753
387.(2018) 2018-07-03	Kpd Ketua Dewan Jarninan Sosial Nasional perihal (Laporan Triwulan I Ttahun 2018 Dewan Pengawas BPJS Ketenegakerjaan, Khusus Investasi)	11/2	
397.(2018) 2018-07-11	Permohonan Membuka dan Memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018	13/07/2018	30-771
322.(2018) 2018-05-21	Pendapat BPK terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) (+R.Surat ke Menag, Menkeu, Kepala BPKH)	13/07/2018	M-759
352.(2018) 2018-06-06	Laporan Realisasi Penanaman Modal Periode Triwulan I Tahun 2018	13/07/2018	88-770
118.(2018) 2018-02-28	Optimalisasi Peran Indonesia di APEC untuk Peningkatan Pembangunan Inklusif dalam rangka Ketahanan Nasional	13/07/2018	M-768
319.(2018) 2018-05-18	Laporan Pelaksanaan Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan	13/07/2018	M-776
318.(2018) 2018-05-18	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ke Irlandia, Perancis dan Inggris tanggal 12-17 Maret 2018	13/07/2018	M-775
347.(2018) 2018-06-04	Laoran Kunjungan Kerja ke Dubai, Persatuan Emirat Arab	13/07/2018	M-774
194,(2018) 29/03/2018 TW1	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ke Kuala Lumpur, Malaysia	13/07/2018	M-773
376.(2018) 2018-06-29	Permohonan izin penjualan BMN Eks KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam (d.h. Total E7P Indonesia) + R. Surat ke Menkeu	13/07/2018	M-780
370.(2018) 2018-06-26	Kpd: Ketua Persatuan Insinyur profesional Indonesia (PIPI). Perihal: Permohonan sponsorship untuk pengiriman delegasi business ke Doha, Qatar		
402.(2018) 2018-07-11	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 April s.d. 28-29 Juni 2018	16/07/2018	M-783
	Permohonan Audiensi dan Membuka Pameran Otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Tahun 2018	16/07/2018	M-755
365.(2018) 2018-05-26	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017		
404.(2018) 2018-07-11	Penyampaian Laporan Hasil Rangkaian Pertemuan Sidang Tahunan Asian Development Bank ke- 51	16/07/2018	M-782
193.(2018) 2018-03-29	Penyampaian Laporan Resume Buku Karya Kwik Kian Gie "Menelusuri Zaman, Memoar dan Catatan Kritis		
405.(2018) 2018-07-11	Laporan Kunjungan Kerja ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	16/07/2018	M-790

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL,	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
307.(2018)	Tindak Lanjut Atas Surat dari Asosiasi Fastener Indonesia	546	
395 (2018) 2018-07-09	Kpd Dekan FEB Universitas Indonesia (Prof Ari Kuncoro, PhD) perihal Penyampaian Apreslasi dan Ucapan Terima Kasih		TERM
420,(2018) 2018-07-23	Kp Wapres perihal Permohonan kepada Wakil Presiden untuk Memnbuka Rountable High Level Discussion Indonesia: Pusat Ekonomi Islam Dunia*di Bappenas, pada tanggal 25 Juli 2018		
429.(2018) 2018-07-25	Kpd: Mensesneg, Perihal: Hasil Rapat Pembahasan mengenai Pengembangan Promosi Nasional		
430.(2018) 2018-07-25	Kpd Menkeu dan Men PPN perihal Penghematan Belanja Barang K/L TA 2019 (Laporan Rapal Koordinasi Penghematan Belanja Barang K/L Pagu Anggaran Tahun 2019)		
425 (2018) 2018-07-23	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas mengenai Ministerial Council Meeting 2018 - OECD di Perancis (+R. Surat ke Menteri PPN)	30/07/2918	M-845
437.(2018) 2018-07-31	Penyampaian (aporan tahunan PT BEI tahun 2017	02/08/2018	M-867
442.(2018) 2018-08-01	Laporan rapet koordinasi Rperpres tentang pembentukan dan pengekolaan dana investasi real estate (DIRE)		
459.(2018) 2018-08-10	Laporan Rapat Kelompok Kerja Pusat Tim Pengendalian Inflasi Pusat		
461.(2018) 2018-08-10	Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Triwulan I 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia	10/08/2018	M-905
402 (2018) 2018-07-11	penyampalan hasil rapat dewan gubernur BI pada 28-29 Juni 208 dan 18-19 Juli 2018	15/08/2018	M-917
472.(2018) 2018-08-16	Laporan Rapat Pembahasan Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing		
474.(2018) 2018-08-20	Laporan kegiatan temu investor surat berharga negara (SBN) di Eropa tahun 2018	24/08/2018	W-948
477.(2018) 2018-08-21	antisipasi dan solusi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi seluruh K/L atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019	24/06/2018	M-947
486 (2018) 2018-98-28	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2017	29/08/2018	M-964
485,(2018) 2018-08-27	Penyampaian Laporan Hasi Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Buenos Aires, Argentina	29/06/2018	M-961
490,(2018) 2018-08-28	Penyampaian Berita Resmi Statistik 15 Agustus 2018	29/06/2015	M-971
491.(2018) 2018-08-28	Penolakan investasi republik rakyat tiongkok (RRT) dan Perkembangan investasi screening di Uni Eropa		
493 (2018) 2018-08-28	Permohonan keringanan pajak pada ITB dan ITERA	31/06/2018	M-585
492.(2018) 2018-08-28	Penugasan Liason officer Kernenterian/ Lembaga telap diperlukan pada pelayanan terpadu satu pintu pusat di BKPM		
489.(2018) 2018-08-28	Laporan realisasi penanaman modal (PM) Periode Triwulan (TW) II 2018 dan Periode Semester (SMT) I 2018	31/08/2018	M-982
488.(2018) 2018-08-28	laporan pelaksaaan operasional sistem online Single Submission (OSS)	31/08/2018	W-981
507,(2018) 2018-09-04	Usulan Subsidi Pasang Baru Listrik 450 VA	06/09/2010	14-1013

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAE
511 (2018) 2018-09-05	Laporan Rapat Pembahasan Mengenai Pengembangan Promosi Nasional (R. Perpres ttg Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia)		
522 (2018) 2018-09-10	task force penyelesaian permasalahan penyebab opini tidak menyatakan pendapat (TMP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) TA 2017	12/09/2018	M-1048
522,(2018) 2018-09-10	task force penyelesaian permasalahan penyebab opini tidak menyatakan pendapat (TMP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) TA 2017		
531,(2018) 2018-09-12	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14-15 Agustus 2018	13/09/2018	M-1050
529 (2015) 2018-09-12	Laporan Sidang Tahunan Asian Infrastucture Investment Bank ke-3 Tahun 2018 di India	13/09/2018	M-1051
524,(2018) 2018-09-10	revisi target investasi 2018-2019	13/09/2018	M-1058
532.(2018) 2018-09-12	penyampaian kajian mengenai pelemahan nilai tukar rupiah		
534.[2018] 2018-09-14	penyampaian perkembangan indeks harga konsumen/inflasi Agustus 2018	17/09/2016	M-1061
536.(2018) 2018-09-17	Usulan relaksasi persyaratan minimal investasi bagi penanaman modal asing		THE S
544.[2018] 2018-09-20	penyampaia tanggapan atas surat menkeu mengenai permohonan persetujuan pengakhiran perjanjian BOT gedung wisma Bakrie II antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT Bakrie Swasakti Utama		
548.(2018) 2018-09-21	penyampaian tanggapan kemenkeu atas epermohonan pengujian validitas rencana pemberian hibah oleh Onodera Masataka		
554.(2018) 2018-09-25	Laporan Pertemuan ASEAN Economic Minister (AEM)-21st asean Investment Area (AIA) Council	27/09/2018	M-1098

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
612 (2017) 2017-12-13	Kpd: Menko Ekonomi, Menkeu, Menperin. Perihal: Permohonan paraf persetujuan Rancangan Peraturan Presiden tentang pengakhiran tugas dan pembubaran Badan pembina Proyek Asahan dan otorita Pengembangan Proyek Asahan (Rperpres)		
52.(2018) 2018-01-25	Permohonan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Mengagendakan Sidang Kabinet Paripurna tentang Rancangan Prioritas Pembangunan 2019	18/01/2015	M-56
81.(2018) 2018-02-08	Penelapa Rperpres tentang Pegesahan Perselujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus tentang Penghindaran Pajak Berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan (P3B)		
110.(2018) 2018-02-26	Kpd Menko Perekonomian, Menteri KP dan Ka BKPM perihal permohonan paraf persetujuan atas R. Perpres tig Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pernanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pernanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing		
125.(2018) 2018-03-02	Briefing Sheet Sidang Kabinet Paripurna mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Kapasitas Fiskal 2019	02/03/2018	M-237
472.(2016) 2016-07-20	Penyampaian perubahan Pasal 73 ayat (1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan industri	To the	
228.(2018) 2018-04-10	tentang pengalihan saham dan luasan lahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Rperpres)	11/04/2018	NT-405
282 (2018) 2018-05-02	Laporan Rapat Perubahan Rumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengakhiran Tugas dan PembubaranBadan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan		
242.(2018) 2018-04-16	Kpd MenPPN, Menkeu, MenPANRB perihal Permohonan Paraf Perselujuan atas R. Perpres ttg Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)		
414.(2018) 2018-07-20	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan	23/07/2018	M-321
464 (2018) 2018-08-14	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019	14/08/2018	M-912
503 (2018) 2018-09-03	Jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi manajemen eksekutif komite Nasional keuangan syariah	04/09/2018	M+982
521.(2018) 2018-09-06	Kpd: Menteri PPN/Ka. Bappenas, Perihal: Distribusi Lampiran Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2018		51.9
546.(2018) 2018-09-21	Kpd: Menko Ekonomi, Menkeu, Perihal: permohonan paraf persetujuan Rkeppres tentang Hari Indonesia Menabung		
	Pengajuan Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria kepada Presiden		
559 (2018) 26/09/2018	Permohonan Persetujuan Penyusunan RPP tentang Perubahan Kedua PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi		

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAE
511 (2018) 2018-09-05	Laporan Rapat Pembahasan Mengenai Pengembangan Promosi Nasional (R. Perpres ttg Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia)		
522 (2018) 2018-09-10	task force penyelesaian permasalahan penyebab opini tidak menyatakan pendapat (TMP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) TA 2017	12/09/2018	M-1048
522,(2018) 2018-09-10	task force penyelesaian permasalahan penyebab opini tidak menyatakan pendapat (TMP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) TA 2017		
531,(2018) 2018-09-12	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14-15 Agustus 2018	13/09/2018	M-1050
529 (2015) 2018-09-12	Laporan Sidang Tahunan Asian Infrastucture Investment Bank ke-3 Tahun 2018 di India	13/09/2018	M-1051
524,(2018) 2018-09-10	revisi target investasi 2018-2019	13/09/2018	M-1058
532.(2018) 2018-09-12	penyampaian kajian mengenai pelemahan nilai tukar rupiah		
534.[2018] 2018-09-14	penyampaian perkembangan indeks harga konsumen/inflasi Agustus 2018	17/09/2016	M-1061
536.(2018) 2018-09-17	Usulan relaksasi persyaratan minimal investasi bagi penanaman modal asing		THE S
544.[2018] 2018-09-20	penyampaia tanggapan atas surat menkeu mengenai permohonan persetujuan pengakhiran perjanjian BOT gedung wisma Bakrie II antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT Bakrie Swasakti Utama		
548.(2018) 2018-09-21	penyampaian tanggapan kemenkeu atas epermohonan pengujian validitas rencana pemberian hibah oleh Onodera Masataka		
554.(2018) 2018-09-25	Laporan Pertemuan ASEAN Economic Minister (AEM)-21st asean Investment Area (AIA) Council	27/09/2018	M-1098

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
612 (2017) 2017-12-13	Kpd: Menko Ekonomi, Menkeu, Menperin. Perihal: Permohonan paraf persetujuan Rancangan Peraturan Presiden tentang pengakhiran tugas dan pembubaran Badan pembina Proyek Asahan dan otorita Pengembangan Proyek Asahan (Rperpres)		
52.(2018) 2018-01-25	Permohonan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Mengagendakan Sidang Kabinet Paripurna tentang Rancangan Prioritas Pembangunan 2019	18/01/2015	M-56
81.(2018) 2018-02-08	Penelapa Rperpres tentang Pegesahan Perselujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus tentang Penghindaran Pajak Berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan (P3B)		
110.(2018) 2018-02-26	Kpd Menko Perekonomian, Menteri KP dan Ka BKPM perihal permohonan paraf persetujuan atas R. Perpres tig Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pernanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pernanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing		
125.(2018) 2018-03-02	Briefing Sheet Sidang Kabinet Paripurna mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Kapasitas Fiskal 2019	02/03/2018	M-237
472.(2016) 2016-07-20	Penyampaian perubahan Pasal 73 ayat (1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan industri	To the	
228.(2018) 2018-04-10	tentang pengalihan saham dan luasan lahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Rperpres)	11/04/2018	NT-405
282 (2018) 2018-05-02	Laporan Rapat Perubahan Rumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengakhiran Tugas dan PembubaranBadan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan		
242.(2018) 2018-04-16	Kpd MenPPN, Menkeu, MenPANRB perihal Permohonan Paraf Perselujuan atas R. Perpres ttg Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)		
414.(2018) 2018-07-20	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan	23/07/2018	M-321
464 (2018) 2018-08-14	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019	14/08/2018	M-912
503 (2018) 2018-09-03	Jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi manajemen eksekutif komite Nasional keuangan syariah	04/09/2018	M+982
521.(2018) 2018-09-06	Kpd: Menteri PPN/Ka. Bappenas, Perihal: Distribusi Lampiran Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2018		51.9
546.(2018) 2018-09-21	Kpd: Menko Ekonomi, Menkeu, Perihal: permohonan paraf persetujuan Rkeppres tentang Hari Indonesia Menabung		
	Pengajuan Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria kepada Presiden		
559 (2018) 26/09/2018	Permohonan Persetujuan Penyusunan RPP tentang Perubahan Kedua PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi		

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
2.[2018] 2018-01-03	Bahan sidang kabinet paripurna program dan kegiatan tahun 2018	02/01/2018	M-02
7.(2018) 2018-01-05	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas mengenai Peningkatan Investasi dan Perdagangan		
40.(2018) 2018-01-22	Penyampaian Bahan Rapal Kerja Pernerintah mengenai Percepatan Kemudahan Berusaha (Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha)		ALC:
39 (2018) 2018-01-22	Permohonan audiensi managing director International Monetary (IMF) kepada Presiden	15/01/2018	M-36
83.(2018) 2018-01-31	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Peningkatan Investasi dan Peningkatan Ekspor		
73.(2018) 2018-02-05	Penyampaian Briefing sheet dan Bahan Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah	61/02/2018	M-132
75.(2018) 2018-02-05	Permohonan Gubernur BI kepada Presiden untuk memberikan sambutan dalam International High Level Conference New Growth Models In A Changing Global Landscape serta menerima permohonan audiensi managing Director IMF	n to	
84.(2018) 2018-02-12	Bahan sidang kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019	65/02/2018	M-151
60.(2018) 2018-02-08	Permintaan jadwal rapat kerja Presiden dengan Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota	05/02/2018	M-155
101.(2018) 2018-02-20	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Insentif Investasi	-41-2	
103.(2018) 2018-02-21	Undargan Gubernur Bank Indonesia kepada Sekretaris Kabinet untuk Menghadiri International High Level Conference: New Growth Models in a Changing Global Landscape		
129 (2018) 2018-03-05	Permohonan US-ASEAN Business Council untuk bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet		in the
128 (2018) 2018-03-05	Permohonan Waktu Rapat Terbatas mengenai PT Freeport Indonesia dan Dana Abadi Pendidikan pada Bulan Maret 2018	62/03/201B	M-236
147.(2018) 2018-03-12	Permohonan Kepada Sekretaris Kabinet untuk Menjadi Pembicara dalam Pertemuan American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) President Advisory Council (PAC)		
157 (2018) 2018-03-15	Penyampaian Bahan Sekretaris Kabinet dalam pertemuan American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) President Advisory Council (PAC)		50.00
160,(2018) 2018-03-16	Permohonan Penjadwalan Rapat Terbatas Membahas Pagu Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2019	06/03/2018	M-252
174.(2018) 2018-03-23	Laporan rapat panilia nasional penyelenggaraan rangkaian pertemuan tahunan/annual meelings IMF-World Bank tahun 2018 (AM 2018) dan usulan rapat Kabinet Terbatas (Ratas) mengenai perkembangan persiapan penyelenggaraan AM 2018		
178.(2018) 2018-03-26	Penyampaían Bahan Pertemuan Presiden RI dengan Pengguna Fasilitas Kepabeanan dan Peluncuran Perizinan Online di Bogor	25-5	
181.(2018) 2018-03-27	Penyampaian Masukan Bahan Rapat Kerja Pemerintah dengan Bupati/Walikota mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah	524	150
199 (2018) 2018-04-02	Permohonan Waktu Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet mengenai Kelersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Anggaran 2019	03/04/2018	M-365
200.(2016) 2018-04-04	Briefing sheet pertemuan/audiensi dalam rangka penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2017, yang dijadwalkan pada Karnis 5 Apri 2018 di Kantor Presiden	05/04/2018	M-376
	penyampaian bahan audiensi Sekretaris Kabinet dalam mndampingi Presiden dalam menerima HIPMI, Kamis 5 April 2018		3 14 30

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
214 (2018) 2018-04-06	Usulan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas menyampaikan paparan prioritas nasional pada sidang kabinet paripurna (SKP) RKP dan Pagu Indikatif 2019		
216.(2018) 2018-04-09	Penyampaian briefing sheet rapat terbatas dan sidang kabinet paripurna mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikalif 2019	09/04/2018	M-390:
232.(2018) 2018-04-11	permohonan kehadiran Presiden RI pada rapat kerja Pernerintah tentang percepatan pelaksanaan perizinan berusaha	11/04/2018	M-104
237.(2018) 2018-04-13	Silahturahim masyarakat asuransi Indonesia bersma Presiden RI	17/04/2018	M-148
246.(2018) 2018-04-18	Penyampaian masukan bchan rapat terbatas percepatan pelaksanaan berusaha		
-256.(2018) -2018-04-23	Permohonan testimoni kepada Presiden untuk pembuatan video penghargaan pembangunan daerah 2018	25/04/2016	M-486
367.(2018) 2018-06-26	Kpd: Menlu, Mendag, Ka, BKPM, Penhal: permohonan saran/pertimbangan atas undangan Crans Montana Forum kepada Presiden		
305.(2018) 2018-05-11	permohonan waktu rapat terbatas tanggal 15 Mei 2018 mengenai kerangka ekonomi makro dan RUU Perpajakan	11/05/2018	M-S65
311.(2018) 2018-05-11	penyampaian bahan rapat lerbatas (ratas) mengenai: 1) kerangka ekonomi makro dan pokok- pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2018, 2) proses legislasi dan draf RUU ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), RUU Pajak Penghasilan (PPh), dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	14/05/2018	M-567
	Kpd: Menteri PUPR, Perihal: Permohonan waktu audiensi	NO FE	
366 (2018) 2018-06-26	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Perkembangan Persiapan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Pukul 15,00 WIB	26/06/2018	M-683
375.(2018) 2018-06-29	Permohonan perternuan Chief Executive Office (CEO) International Finance Corporation (IFC) dengan Presiden pada tanggal 31 Juli 2018 dan permohonan perternuan IFC'S Country Manager dengan Sekretaris Kabinet pada tanggal 6 Juli 2018	92/07/2018	M-695
377.(2018) 2018-07-02	permohonan membuka roundtable high level discussion Indonesia; Pusat Ekonomi Islam Duna di Bappenas, pada tanggal 25 Juli 2018	03/07/2018	11-700
379,(2018) 2018-07-02	permohonan membuka acara Indonesia development forum 2018	03/07/2018	M-701
384 (2018) 2018-07-03	Penyampaian bahan pertemuan Sekretaris Kabinet dengan International Finance Corporation (IFC) Country Manager for Indonesia, Malaysia , and Timor Leste pada tanggal 6 Juli 2018		
382.(2018) 2018-07-02	Permohonan waktu rapat lerbalas mengenai laporan realisasi Semester 1 dan prognosis semester 2 pelaksanaan APBN TA 2018	05/07/2018	11-715
392 (2018) 2018-07-09	penyampaan bahan rapat terbatas (ratas) mengenai: 1) Strategi dan kebijakan menghadapi dampak ketidakpastian perekonomian global, 2) realisasi dan Prognosis pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018	09/07/2018	U1-745
393.(2018) 2018-07-09	Kpd; wapres. Perihal: permohonan untuk membuka Indonesia Development Forum 2018		
400.(2018) 2018-07-11	Penyampaian Bahan Pertemuan Presiden dengan Chief Executive Officer (CEO) International Finance Corporation (IFC) pada tanggal 31 Juli 2018	13/07/2018	илп
403.(2018) 2018-07-11	Permohonan Waktu Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 16 dan 17 Juli 2018 mengenai Pagu Anggaran RAPBN 2019	13/07/2018	10-779
406.(2018) 2018-07-13	Kpd Wapres perihal Permohonan kepada Wakil Presiden untuk Membuka Acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intem Pemerintah 2018		188

NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
456 (2018) 2018-08-06	Penyampaian bahan sidang kabinet paripuma mengenai RAPBN Tahun anggaran 2019	18/07/2018	M-892
428.(2018) 2018-07-25	Penyampaian Bahan Butir Wicara Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018	25/07/2018	M-829
436 (2018) 2018-07-30	Penyampaian Bahan Ratas mengenai Strategi Kebijakan Penguatan Cadangan Devisa dengan Instrumen Biodiesel / Palm Oil dan Batubara		Rips:
443.(2018) 2018-08-01	Permohonan waktu sidang kabinel paripurna taggal 8 agustus 2018 mengenai nota keuangan RAPBN TA 2019	02/08/2038	M-860
456.(2018) 2018-08-06	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna mengeai Nota Keuangan dan RAPBN 2019	07/08/2018	M-888
460 (2018) 2018-08-10	Permohonan Audiensi President & CEO US-ASEAN Business Council		
463.(2018) 2018-08-13	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa	14/08/2018	M-909
468.(2018) 2018-08-15	permohonan audiensi un swissindo kepada Presiden		HE.
497 (2018) 2018-08-30	briefing sheet pertemuan Presiden dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	100	Ma.
500,(2018) 2018-08-31	Usulan Mengenai Pertemuan dengan Alibaba Group	01/09/2018	M-985
540 (2018) 2018-09-19	undangan Presiden dalam rangka wisuda akbar PKN Stan dan permohonan untuk menyampaikan orasi ilmiah tanggal 18 Oktober 2018 di Gedung Auditorium Ice Bsd	21/09/2018	M-1079
543.(2018) 2018-09-20	Permohonan Audiensi Managing Director IMF kepada Presiden	21/09/2018	M-1082
545.(2018) 2018-09-21	Permohonan Audiensi Co-Chair Bill&melinda Gates Foundation kepada Presiden	21/09/2018	M-1086
555 (2018) 25/09/2018	Permohonan Membuka dan Menjadi Pembicara Kunci pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Internasional Bloombeg pada 11 Oktober 2018	25/09/2018	M-1093

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO, SESKAB
90K 4	367.(2018) 2018-06-26	masukan saran/pertimbangan atas undangan crans montana forum kepada Presiden	28/06/2018	M-687.
BOK 4	369 (2018) 2018-05-28	permohonan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepla Bappenas kepada Presidenuntuk melaporkan penyusunan rancangan teknokratis rencana pembangunan jangka menengah nasinal 2020-2024	02/07/2018	M-691

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
	198.(2018) 2018-94-02	Permohonan izin mengahadiri kegiatan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional (KP3MN) tahun 2018		233
	102.(2015) 2018-02-20	Permohonan persetujuan penugasan pejabat di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian untuk mengikuti pendidikan dan pelaihan termasek foundation International Leaders in Economic Development (TFILD) Programme, Singapura, 18-28 Maret 2018		
	268.(2018) 2018-04-27	Permohonan Persetujuan sebagai Narasumber dalam Kegiatan Terpadu Birnbingan Teknis Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) di Houston dan Orlando, Amerika Serikat		
ADM	482 (2018) 2018-08-24	Permohonan Persetujuan mengikuti ASEAN e-Financial Inclusion Forum pada tanggal 23-27 September 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia		
ADM	505.(2018) 2018-09-03	permohonan persetujuan/izin mengikuti Global Airport Development Asia pada tanggal 24-27 September 2018, di Singapura		100

BKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL:	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
BOC 1	12 (2018)	Laporan menghadiri konferensi tingkat menteri world trade organization (WTO) ke-11 di Buenos Aires, Argentina		7.
IKK1	695 (2017) 2017-11-14	Kpd Menteri BUMN perihal Pengaduan Persaudaraan Mantan Karyawan Krakatau Steel Group	22/01/2018	M-73
IKK1	25.(2018) 2018-01-15	Laporan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2017		
TKIC1	40.(2018) 2018-01-18	Permohonan membuka rapat (raker) Kementerian Perdagangan tahun 2018		
BOX 1	752.(2017) 2017-12:20	Laporan perkembangan sub tema, lokasi dan luas lahan peviliun Indonesia serta responsible National Authority (RNA) dan Commissioner General (CG) Indonesia pada Expo 2020 Dubai	19/01/2018	M-68
IKK1	18.(2018) 2018-01-11	Kpd: Menteri Ketenagakerjaan. Perihal: Masuan terkait Kebijakan pelarangan dan penghentian penglirinan TKI pada pengguna perseorangan di Negara Timur Tengah. Hasil kunjungan kerja Menteri Ketenagakerjaan ke Jeddah, tanggal 15 s.d. 21 Oktober 2017		
HOC1	24 (2018) 2018-01-12	Laporan monitoring perlindungan dan tata kelola penempatan tenaga kerja Indonesia di Luar negeri	1 5 6	
#KK 1	46.(2018) 2018-01-23	Penyampaian undangan pembukaan rapat kerja (Raker) Kementerian Perdagangan tahun 2018		
B0C1	18 (2018) 2018-01-10	Kpd; Mendag, Perihal: Penerusan Surat Walikota Mojokerto terkait Proposal permohonan Pembangunn/Revitalisasi Pasar dan Sentra PKL (1. Proposal pengajuan dana untuk revitalisasi pasar prapanca Kota Mojoerto, Jawa Timur, 2. Permohonan bantuan revitalisasi sentra PKL Benteng Pancasila Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur)	22/01/2018	W-75
1001	760.(2017) 2017-12-27	Rencana pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) secara masif terhadap impor produk baja	12/02/2018	M-184
IKK-1	77.(2018) 2018-02-01	Laporan rapat penyederhanaan perizinan TKA tingkat Eselon I		
IKK1	90 (2018) 2018-02-07	Laporan pertemuan regional comprehensive Economic Partnership (RCEP) Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN di Singapura		
IKK 1	105.(2018) 2018-02-13	Permohonan dukungan pernbangunan perkebunan aren		
IKK 1	84.(2018) 2018-02-05	Laporan hasil pertemuan tingkat Menteri IMT-GT ke-23 tanggal 28 s.d. 29 September 2017 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung		
IKK 1	36 (2018) 2018-01-17	Rekomendasi optimalisasi pengiriman tenaga kesehatan perawat ke Negara Kawasan Timur Tengah dan Negara Anggota OKI		
IKKT	151.(2018) 2018-03-02	Laporan Pendirian Layanan Terpadu Satu Atap		
IKK 1	150.(2018) 2018-03-02	Kpd Mendag perihai Permehonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Raliyat Wiuasa, Kecamatan Loru- Ulara, Kabupaten Poso, Provinsi Sufawesi Tengah	13/03/2018	M-277
IKK T	149.(2018) 2018-03-01	Laporan Pelaksanaan kongres Depalindo ke X di Surabaya, Jawa Timur		115.2
IKK 1	143 (2018) 2016-02-28	Kpd: Menteri Perdgangan. Perihal: Permohonan pembangunan pasar agats distrik Agats di Kabupateri Asmat, Papua	13/03/2018	M-282

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
IKK 1	212 (2018) 2018-03-29	Kpd Mendag pcrihal Permohonan Pembangunan Pasar Rakyal Ternanggung Silam, Kabupaten	T RESIDEN	JESKAB
IKK 1	204 (2018) 2018-03-28	Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  Laporan BPJS Ketenagakerjaan Januari 2018	12/04/2018	M-417
IKK 1	255.(2018) 2018-04-16	undangan menghdiri musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia 2018		
IKK 1	208.(2018) 2018-03-29	Kpd Menko Perekonomian perihal Permohonan Kunjungan Presiden RI ke Provinsi Kepulauan Riau	7 01	
IKK 1	209 (2018) 2018-03-29	Permohonan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat dan Gudang di Provinsi Kepulauan Riau (+R. Surat ke Mendag)	23/04/2018	M-471
IKK 1	226.(2018) 2018-04-04	Penyampaian rekomendasi KPK atas permendag nomor 16 tahun 2017 tentang perdagangan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komodilas		
IKK 1	221.(2018) 2018-04-04	proses lindak lanjutpengesahan protokol to implement the seventh package of commitment on financial services under the ASEAN framework agreement of services		
IKK 1	281.(2018) 2018-04-27	Kpdt mendag, Perihali tindak lanjut surat menteri perdagangan nomor 438/M-DAG/SD/4/2018 tentang tembusan tanggapan rekomendasi KPK tentang pasar lelang gula kristal rafinasi		
IKK 1	245.(2018) 2018-04-11	Laporan kesiapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bangunan pasar atas kota bukit tinggi		
IKK 1	265 (2018) 2018-04-19	Laporan Pelaksanaan KUR Tahun 2017	02/05/2018	M-503
IKK 1	295.(2018) 2018-05-08	penyampaian aspirasi dari Dewan Pimpinan Nasional andalan petani tebu rakyat Indonesia (DPN-APTRI)	18,51	Hai
IKK 1	301 (2018) 2018-05-09	ucapan terima kasih dari mitsubishi kepada Sekretaris Kabinet		
IKK 1	299.(2018) 2018-05-09	pembahasan dan penyelesalan ratifikasi enam perjanjian perdagangan internasional		70
IKK 1	308.(2018) 2018-05-16	Laporan Rapat Pembahasan Penyelesalan Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Perdagangan		
IKK 1	294.(2018) 2018-05-07	Laporan Rapal Koordinasi Teknis terkail Sengketa DS 477 dan DS 478		
IKK 1	233.(2018) 2018-04-05	R. Surat Seskab kpd: Menko Ekonomi, Menleri KUKM ) Perihal: Inisiasi Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMiK)	23/05/2018	M-599
IKK 1	352 <sub>4</sub> (2018) 2018-06-08	Laporan Hasil Koordinasi terkait Permasalahan Lonjakan Impor		
IKK 1	M. 385 2018-07-06	Laporan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI dalam rangka pembahasan proses ratifikasi protokol 6 (enam) perjanjian Asean	4 10	
IKK 1	M,396 2018-07-10	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
IKK 1	M.367 2018-06-26	Transformasi Kawasan Perdagangan Bebas Batam menjadi KEK Batam		

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO, SESKAB
IKK 1	M.386 2018-07-06	Penyampaian Kembali Peraturan Menten Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau	On a	
IKK 1	M.347 2018-05-31 (Triwulan 2)	Laporan BPJS Ketenagakerjaan Triwulan I Tahun 2018		
IKK 1	M.354 2018-06-05 (Triwulan 2)	Tirıdak Lanjul Penandatarıganan Protokol Perubahan Perjenjian Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA) Khususnya terkali dengan Impor Mangga dari Pakistan		
IKK 1	M.297 2018-05-09 (Triwulan 2)	Notulensi Rapat Wakil Presiden lentang Penyelesaian Isu Perundingan: Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement; By ASEAN- Regional Comprehensive Partnership; Co. Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement; du Indonesia- European Free Trade Area Comprehensive Economic Partnership Agreement		
IKK 1	M.349 2018-05-31 (Triwulan 2)	Rekomendasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah	(int	
IKK 1	M.361 2018-06-08 (Triwulan 2)	Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tahun 2017		
IKK 1	M,352 2018-06-04 (Triwulan 2)	Permohonan Arahan Presiden atas Rencana Pilot Project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Arab Saudi	23/07/2018	M-619
IKK 1	M. 408 2018-07-18	Kpd Menteri Kordinator Bidang Perekonomian perihat Antisipasi Perekonomian Indonesia dari Dampak Perang Dagang Tiongkok-Amerika Serikat	Par I	
IKK 1	M.240 2018-04-09 (Triwulan 2)	Kpd Menteri PU dan Perumahan Rakyat penhat Permohonan Pembangunan Pasar Tradisional Aksara Kota Medan		
IKK 1	M.414 2018-07-20	Kpd Menteri Ketenagakerjaan perihal Dugaan pelanggaran hak pekerja di anak perusahaan Wilmar International Limited dan perusahaan pernasoknya di Indonesia	1,000 Y	
IKK 1	M.421 2018-07-26	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan ke Tunisia dan Maroko	01/08/2018	M-852
IKK1	M. 449 2018-08-10	Permohonan Penyampaian Rencana Ratifikasi ASEAN - Hongkong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)		1
IKK 1	M.453 2018-08-10	laporan keuangan dan laporan pengelolaan program BPJS kelenagakerjaan semestor I Lahun 2018		505
IKK 1	M.462 2018-08-16	Laporan rapat koordinasi pembahasn tentang usulan perubahan platon kredit usaha rakyat, pembayaran imbel jasa dan kredit usaha pariwisata	307	BAI
IKK 1	M.455 2018-08-14	Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi		
IKK 1	M 466 2018-08-20	implementasi peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 lentang penggunaan tenaga kerja oleh Direktorat Jenderal Imigrasi	- CE	315
IKK 1	M.478 2018-08-27	Kunjungan Menteri Perdagangan ke Washington DC Amerika Serikat		33.
IKK 1	M.476 2018-08-27	Laporan Penyelenggaraan INACRAFT 2018		
IKK 1	M.488 2018-08-31	laporan logistic performance index (LPI) 2018		

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
HGC 1	M. 485 2018-08-30	rencana pendirian kantor Indonesia Trde Promotion Center Shanghai		
BOK 1	M.511 2018-09-06	permohonan respon atas program pro rakyat palatihan UMKM-agro industri pangan		
IKK1	M,517 2018-09-07	pengaduan PT. Pradha karya perkasa kepada Presiden	F. 198	
BOC 3	M. 497 2018-09-05	peringkat daya saing Indonesia dalam global competitiveness report	13/09/2018	M-1049
BOC 1	M.518 2018-09-10	laporan rapat koordinasi tindaklarijut sinergi dan integrasi kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan		N EX
BOC 1	M.520 2018-09-12	laporan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR-RI dengan Dirjen perundingan perjanjian Internasional dalam rangka pembahasan proses ratifikasi protokol 6 perjanjian ASEAN		
1 XX	M.521 2018-09-12	Kpd: Menteri LHK, Perihal: permohonan izin pembukaan perkebunan Aren di Provinsi Riau (KOPKARU)		
BOK 1	M. 532 2015-09-17	Kpd: Menteri Ketenagakerjaan, Menteri BUMN. Perihal: pengaduan perhimpunan maritan karyawan PT Djakarta Lloyd (persero) kepada Presiden	.0.5	

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
90K 2	568 (2017) 2017-11-09	Laporan triwulan III tahun 2017 Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan	19/01/2018	M-83
IKK Z	9.(2018) 2018-01-08	Laporan kunjungan kerja Menteri Perdagangan ke Santiago, Chile, tanggal 13-15 Desember 2017		
HK 2	20,(2018) 2018-01-11	Laporan Dewan Jaminan Sosial Nasional hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ajaminan sosial ketenagakerjaan semester I tahun 2017	19/01/2018	M-70
IKK 2	32.[2018] 2018-01-15	Laporan hasil rapat pembahasan ratifikasi ASEAN Hongkong, China Free Trade Agreement	19/01/2018	M-68
IKK 2	51.(2918) 2018-01-24	Laporran rapat pembahasan naskah penjelasan dalam rangka ratifikasi perjanjian Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)	14/02/2018	M-191
IKK 2	84.(2018) 2018-02-05	Laporan hasil pertemuan tingkat Menteri IMT-GT ke-23 tanggal 28 s.d. 29 September 2017 di Pangkalpinang, Bangka Belitung		
IKK 2	74.(2018) 2018-02-01	Percepatan penyelesaian peraturan pemerintah KEK Batam		
IKK 2	134.(2018) 2018-02-26	Usulan susunan keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023		
IKK.2		Penyampaian bahan rapat Sekretaris Kabinet dengan Presiden terkait persiapan kunjungan kerja ke Australia dan Selandia Baru		
IKK 2	163 (2018) 2018-03-08	Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI oleh Koperasi Perikanan (+Rsurat kpd Menkop)		
IIOC2	559 (2018) 2018-09-21	Kpd: Menko bidang Ekonomi, Menteri PPN/Ka BPPN, Mendag. Perihal: Permohonan paraf persetujuan R Inpres tentang aksi nasional perlindungan konsumen tahun 2018		
IKK2	TESTA	permohonan izin prakarsa penyusunan Rperpres tentang penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI oleh koperasi perikanan	11/05/2018	M-500
IKK 2	M.389 2018-07-09	Permohonan Audiensi dan Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS)		
IKK.2	M. 475 2018-08-27	Laporan Hasil Rapat Pembahasan Materi RUUPK dan Paraf Persetujuan		100
IKK2	M, 510 2018-09-05	Laporan Hasil Rapat Pembahasan Maleri RPP Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang		
IKK 2	M.559 2018-09-21	Kpd Menko Perekonomian, MenPFN dan Mundag perihai Permohonan Paraf Persetujuan atas R. Inpres tig Aksi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2018-2019		

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
80K3	8 (2018) 2018-01-05	Permobonan sambutan Presiden dalam acara hari ulang tahun (HUT) Bukatapak ke-8 pada tanggal 10 Januari 2018 di Ciputra Artpreneur, Jakarta		Total .
KK3	160 (2018) 2018-63-07	Permohonan sambutan dan membuka Jakarta International handicraft trade fair (Inacraft)		
POX:3	234.(2018) 2018-04-95	Penyampaian Bahan Rapat Internal terkait Penyelesaian Perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)	06/54/2918	Rt-381
1003	243.(2016) 2018-04-09	Permohonan Kehadiran Presiden pada Peringatan Hari Konsumen Nasional 2018	12/04/2018	M-450
BOK 8	238 (2018) 2018-04-09	Permohonan Kehadiran Presiden untuk Menghadiri Acara Peresmian dimulainya Ekspor Mobil Mitsubishi Xpander	12/04/2018	10-418
вжэ	273,(2018) 2018-04-24	Penyampaian sambulan Presiden pada peringalan hari Konsumen Nasional 2018		100
IKK 3	291,(2018) 2018-05-04	Permohonan Kesediaan Presiden untuk Membuka Trade Expo Indonesia 2018 ke-33 Tahun 2018	08/05/2918	M-550
IKK 3	324,[2018] 2018-05-21	permohonan kehadiran Presiden untuk meresmikan pembukaan Jakarta Fair ke-51 tahun 2018		
KK3	M,372 2918-07-02	Kpd: Menteri KUKM, Perihal: Permohonan waktu audiensi	30	
вк.з	M.392 2018-07-09	Permohonan kehadiran Presiden pada Hari Koperasi Nasional ke-71 tanggal 12 Juli 2018		
MK3	M.403 7018-07-15	Undangan sebagai pemateri dalam simposium-orkestra BPJS Kelenagakerjaan, tanggal 8 Agustus 2018 di Djakarta Theater		
IKK3	M,407 2018-07-18	Kpd Mendag perihal Penerusan Surat Bupati Kendal terkait Pembangunan /Revitalisasi Pasar Kaliwungu Kab <sub>a</sub> Kendal		
KK3	M. 439 2018-08-03	Paparan Sekretaris Kabinet dalam Simposium - Orkestra BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 8 Agustus 2018 di Djakarta Tealer	3-14-	
INK3	M.442 2015-08-03	Permohonan Kehadiran Presiden dalam Penyelenggaraan Export Ceremony Toyota Group		
BK 3	M.443 2018-08-65	Kpd Ketum IWAPI perihal Permohonan Fasilitas Audiensi kepada Presiden		
PCK-3	M.513 2018-09-06	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Persiapan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Korea Selatan dan Vietnam	07/09/2018	M-1028
ккз	M.519 2018-09-10	undangan kegialan wirausaha mandiri (WMM) award 2018		
ккз	M.514 2018-09-07	permohonan audiensi Chief Technology Officer Amazon WEB Services	13/09/2018	M-1055
кка	M. 542 2018-09-19	Penyampaian Briefingsheel Audiensi Pertemuan Presiden dengan Tim Amazon	20/09/2018	M-1077

tick	NO, MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
BOK 3	M.575 2018-09-27	R. Surat Seskab kpd: Menkominfo, Ka BSSN, Perihal: permohonan kerja sama PT Cisco System Indonesia dalam pengembangan wkonmi digital dan keamanan siber	28/09/2018	M-1100
BOX 3	M.575 2018-09-27	permohonan audiensi President & CEO Sojitz Group	28/09/2018	M-1101

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
	169 (2018) 2018-03-08	Permohonan izin untuk menjadi anggota delegasi RI pada ASEAN-China Joint Committee (ACJC) tanggal 13-15 Maret 218 di beijing, RRT		
	177.(2018) 2018-03-15	Permohonan izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mengikuti Training & Study Visit in Singapore: Sharing Singapore's Urban Transportation Strategy & Blueprint" Tanggal 25 s.d., 30 Maret 2018 di Singapura		
Tusi Lain- Lain	M.523 2018-09-13	Pembahasan dan Penyusunan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang Perekonomian Tahun 2015 s.d. Agustus 2018		BENG.

IKK	NO, MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
IKK 1	803 (2017) 2017-12-27	Kpd Menko Perekonomian perihal Penerusan Surat Gubemur Sumatera Selatan (Permohonan Bantuan kepada Presiden menjadikan Kawasan Tanjung Carat sebagai Bagian dari KEK Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan)		
IKK 1	10.(2018) 2018-01-05	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		196
BOC 1	795,(2017) 2017-12-19	Kpd: Menkeu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ka. Bappenas. Perihal: Penerusan surat Bupati Gayo Lues, Aceh	23/01/2018	M-81
IKK1	805.(2017) 2017-12-27	Laporan hasil reviu tata kelola proyek strategis nasional triwulan III tahun 2017		
IKK 1	36.[2018] 2018-01-17	Penyampaian briefing sheet pertemuan Giled Sciences, Inc. dengan Sekretaris Kabinet	01/02/2018	M-121
IKK 1	65.(2018) 2018-01-23	Kpd: Menteri PUPR, Menteri PPN/Bappenas. Perihal: Penerusan Usulan Koperasi Persada Laskar ITB Tujuh Sembilan		
IKK 1	73.(2018) 2018-01-29	Laporan menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen Tata Ruang	01/02/2018	M-124
IKK 1	776,(2017) 2017-12-11	Tindak lanjut surat keputusan Mentri LHK nomor: SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016	01/02/2018	M-123
(RQC-1)	796.(2017) -2017-12-19	Kpd: Menteri PUPR. Perihal: Penyampaian surat Gubernur Sulawesi Barat. Permohonan bantuan infrastruktur.	31/01/2018	M-108
IKK 1	74,(2018) 2018-01-29	Permintaan Jadwal Rapat Terbatas Kabinet terkait Percepatan Kebijakan Satu Peta		
IKK1	68.(2018) 2018-01-26	Laporan tinjauan lapangan dan pembahasan Usulan rencana Pengembangan Kawasan Walini	31/01/2018	M-106
lkk 1	65.(2018) 2018-01-24	Penyampaian hasil pelaksanaan audit Kapasitas Ruang dan Audit Struktur, serta kelayakan lift Gedung Nusantara   DPR RI		
IKK 1	95.(2018) 2018-02-07	Kpd: Menteri PUPR. Perihal: Permohonan nama jembatan Ngadiluwih Kediri (Penyampalan Surat Rektor Universitas Moestopo)	21/02/2018	M-205
IKK1	53.(2018) 2018-01-22	Penyampaian Penjelasan BP Tapera berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	21/02/2018	M-208
IKK 1	777.(2017) 2017-12-11	Rencana pengembangan jaringan jalan di Kota Surabaya		# E II
IKK 1		Konferensi musik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional langgal 7 s.d. 9 Maret 2018, di Ambon, Maluku		
lKK1		Pameran Indonesia International Fumiture dan Craft Expo (IFEX) 2018		
JKK 1		tentang Penunjukkan pelaksana tugas Komisioner Badan pengelola Tabunagan Perumahan Rakyat	POT	7-62

IKK	NO, MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
IKK1		Penyampaian Undangan dan Saran Pertimbangan Kehadiran Presiden pada the International Hig-Level Conference on International Decade for Action "Water for Sustainable Development" 2018-2028, di Dushanbe tanggal 20-22 Juni 2018	21/03/2018	M-326
IKK 1		Permohonan kesediaan Presiden untuk membuka acara Indonesia Industrial Summit 2018 dan Launching Roadmap Implementasi Revolusi Industri 4.0	37.97	
KK1		Permohonan Audiensi dan Pembukaan Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show 2018	09/04/2018	M-389
IKK 1		Bahan Kunjungan Sekretaris Kabinet ke LKPP		
IKK 1		Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perindustrian ke Davos, Swiss pada tanggal 22-27 Januari 2018	12/04/2018	M-421
IKK 1		Laporan Rapat Evaluasi atas Proyek Strategis Nasional yakni Jalan Tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak di Provinsi Jawa Timur dan Jalan Palu- Parigi di Provinsi Sulawesi Tengah		
IKK 1		Penyampaian laporan rapat pembahasn Rperpres lentang percepatan penetapan lahan sawah berkelanjutan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah		
IKK 1		Laporan rapat pengamanan aplikasi SITAP dengan Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 13 April 2018		
DOK 1		Laporan Menghadiri World Urban Forum ke-9 di Kuala Lumpur, Malaysia	19/04/2015	M-461
IKK 1		Laporan Rapat Pelaksanaan Arahan Presiden terkail Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat		
IKK 1	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	Laporan Rapat Evaluasi atas Proyek Strategis Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Merauke di Provinsi Papua	(Car	
IKK 1		Permohonan audiensi dewan pengurus pusat realestat Indonesia (DPP REI) dengan Presiden	25/04/2018	M-480
lick t		Pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PTSL di Provinsi Riau		
DOC 1	3 y	kpd: MenPU, MenPPN. Perihal: Penyampaian surat Bupati darmasraya (usulan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten darmasraya)		25 25
IKK 1	FIRE	Permohonan Membuka Sarasehan Nasional Citarum Harum dalam rangka Peringatan Hardiknas Kemenristekdikti Tahun 2018		
IKK 1		Laporan Penyampaian Risalah Rakor Pembahasn R. Perpres tentng Perepatan Pnetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah		
IKK 1		Laporan Rapat Intra-Government Secured Network dalam rangka Pelaporan Tindak Lanjut Arahan Presiden Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)		unik i
IKK 1		Penyampaian Laporan Hasil Pengujian Keamanan Informasi pada Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden	1	
JKK-1		KpdMenko Perekonomian perihal Tindaklanjut Arahan dan Petunjuk Presiden dalam Rapat Terbalas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Perpres No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional		

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
IKK 1		Hasil Audit atas Pembangunan Gedung Kantor Bupati Bima Tahun Anggaran 2014 -2016 (+ R. Surat ke Men PU)	28/05/2018	M-613
IKK 1	13.	Kpd Men PPN dan Ka LKPP perihal Penyampaian Kebijakan atas Rencana Revisi Perpres No 84 Tahun 2012		NII V
IKK 1	M.446 (03/07/2018)	Laporan Permohonan Peresmian Beberapa Ruas Jalan Tol	06/07/2018	M-732
IKK 1	M.449 (4/07/2018)	Laporan rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		100
IKK 1	M.444 (03/06/2018)	Permohonan Audiensi dan Dukungan Perubahan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Irigasi		0.5
IKK 1	M.455 (06/07/2018)	Laporan Hasil Reviu Proyek Strategis Nasional Triwulan I Tahun 2018	\$3/07/2018	M-772
IKK 1	M.380 (14/05/2018)	permohonan IP-PPAT kepada Presiden dalam rangka pembukaan kongres IPPAT ke VII tahun 2018		
IKK 1	M.456 (9/06/2018)	Kpd: Menteri PPN/Ka. Bappenas. Perihal: penyampaian surat Gubemur Kalimantan Utara selaku Koordinator Forum kerjasama dan revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) 2017-2018		
IKK 1	M.426 (05/06/2018)	Laporan Kehadiran dalam Simposium Peringalan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang tanggal 18-22 April di Tokyo, Jepang	15/07/2018	M-793
lick 1	M.427 (05/06/2018)	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perindustrian ke Republik Ceko dan Republik Federal Jerman, pada tanggal 30 April - 4 Mei 2018	16/07/2018	M-791
IKK 1	M.484 (24/07/2018)	Permohonan Pertemuan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank dengan Presiden RI	25/07/2018	M-827
IKK1	M.479 (23/7/2018)	Kpd Mensesneg (dll - 5 Menteri) perihal Laporan Rapat Mengenai Tinak Lanjut Sidang Kabinet Paripuma Tanggal 18 Juli 2018	1	
IKK 1	M,487 (25/07/2018)	Dukungan Program Pembiayaan Perumahan melalui Perbankan		
IKK 1	M.498 (31/07/2018)	Penyampaian tanggapan terhadap R. Keppres tentang kewenangan akses untuk berbagi data informasi Geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasioonal dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta		
IKK 1	M.500 (01/08/2018)	Permohonan kesediaan Bapak Presiden untuk membuka dan menjadi pembicara kunci pada acara HSBC Infrastructure forum 2018		
IKK 1	M,504 (03/08/2018)	Permohonan peletakan batu pertama (Groundbreaking) jalan tol Banda Aceh Sigli, dan peresmian fly over simpang surabaya, underpass Beurawe serta peresmian masjid At-Taqarrub di Prov. Aceh	07/08/2018	M-894
ligK1	M.520 (13/08/2018)	Rasionalisasi Tarif Tol		11/2

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
BGK 1	M.533 (27/08/2018)	(R. Surat Seskab kpd Menteri PPN/Bappenas, Perihal: Permohonan kesediaan Presiden untuk membuka Konstruksi Indonesia 2018	29/08/2018	N-967
lkk 1	M-535 (28/08/2018)	Usulan Alokasi Pengadaan Lahan/Tanah Proyek Prioritas non-PSN untuk Pebangunan Bendungan		
IKK 1	M.548 (30/08/2018)	laporan hasil reviu proyek strategis Nasional Triwulan II Tahun 2018		
IKK 1	M.547 (30/08/2018)	Kpd Menko Perekonomian perihal Rekomendasi Perumahan		
IKK 1	M.556 (3/09/2018)	Rencana Tindak Lanjut Penyediaan Rumah Bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	05/09/2018	M-1004
IKK 1	M.563 (07/09/2018)	R. Surat Seskab kpd Ka. Bekraf. Perihal: permohonan menghadiri Synchronize Fest 2018	13/09/2018	M-1046
IKK 1	M.557 (10/09/2018)	laporan hasil rapat koordinasi rencana penundaan pelaksanaan proyek strategis Nasional		
JKK 1	M.575 (17/09/2018)	Kpd MEnPPNperihal Penyampaian Letter of Intent untuk Berpartisipasi dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia		
IKK 1	M.573 (17/09/2018)	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Hasil MTR Program NCICD	21/09/2018	M-1085
IKK 1	M.586 (26/09/2018)	permohonan peresmian jembatan gantung dan bendungan	28/89/2018	M-1099

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
IKK 2	28,(2018) 2018-01-12	Usulan Perubahan Perpres Nomor 84 Tahun 2012 dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018	24/01/2018	M-88
IKK2	447.(2018) 2018-06-03	Kpd: Menko Ekonomi, Menteri ATR, Mendagri. Perihal: RPerPres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negra di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara		
IKK 2	109.(2018) 2018-02-09	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	20/02/2018	14-201
lKK2	153.(2018) 2018-02-27	Kpd Menko Bid. Perekonomian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang perihal R. Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung		
IKK2	148,[2018] 2018-02-26	Kpd Menko Perekonomain, Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim dan Menkeu perihal Permohonan Paraf Persetujuan R. Perpres ttg Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum	21/02/2018	N-207
IKK 2		Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum		
IKK2		Permohonan pertemuan CEO SCG Thailand dengan Presiden dan Penyampaian briefing sheet		
IKK 2		Kpd Ka LKPP, Menkeu DLL perihal Tindak lanjut Penerbitan Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
IKK2		Kpd Menko Perekonomian, MenPPN, Men ATR, Mendagri, MenLH dan Ka BIG perihal Permohonan paraf persetujuan atas R. Keppres tig Kewenangan Akses untu berbagi data informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta		
IKK2	8,79	tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan cekungan Bandung	08/05/2018	M-547
IKK2		Kpd Menko Perekonomian dan MenPPN/Ka Bappenas perihal Permohonan Paraf Persetujuan atas R. Perpres ttg Proyek Strategis Nasional		
IKK 2	418.(2018) 2018-05-28	Kpd: Menko Perekonomian, Menteri PUPR. Perihal: permohonan paraf persetujuan (R. Keppres tentang tim koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah		
IKK2		Perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional	21/06/2018	M-669
IKK 2	M,447 (03/06/2018)	Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh-Sumatera Utara	66/07/2018	M-730
IKK2	M.469 (17/07/2018)	Kpd Menkeu dan MenBUMN perihal Paraf Persetujuan tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas		
IKK 2	M 492 (26/07/2018)	Kpd Menko Perekonomian, Menhub, Men BUMN, dan Menperin hal Permohonan Paraf Persetujuan Rperpres tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara		
IKK2	M.524 (16/08/2018)	Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	17/08/2018	M-925
IKK-2	M.525 (16/08/2018)	Kewenangan Akses untuk Berbagi Data Informasi Geospasial mellui Jaringan Informasi Geospsial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	17/08/2018	M-924

IKK	NO, MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
IKK 2	M.526 (21/08/2018)	penanganan /penertiban limbah industri		
IKK 2	M.539 (28/08/2018)	Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara	29/88/2018	14-872
IKK 2	M.561 (06/09/2018)	Laporan Rapat Pembahasan R. Perpres ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat		
IKK 2	M.587 (27/09/2018)	Kpd: Mensesneg. Perihal: penyampaian hasil review atas Rperpres Rencana Tata Ruang kawasan strtalegis Nasional Jantung Kalimantan		

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
#KK3	55 (2018) 2018-01-22	Penyampaian bahan peretemuan Sekretaris Kabinet dengan Laskar Institut Teknologi Bandung		
BGK 3	94.(2018) 2018-02-05	Penyampaian bahan rapat lerbatas Perkembangan Kebijakan Satu Peta tanggal 5 Feb 2018	70/02/2018	M-198
BCK 3	150.(2018) 2018-02-27	Penyampaian briefing sheet dan butir wicara pada pertemuan Presiden dengan delegasi Gubernur Gorontalo	21/02/2018	M-209
IKK3		Penyampaian bahan rapat terbatas tentang penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri	15/04/2018	M-439
ikk3		Penyampaian Sambutan Sekretaris Kabinet dalam Acara Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018	S 11, 313	
IKK3	M.465 (16/07/2018)	penyampaian briefinfg sheet pertemuan Seskab dengan Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah tanggal 16 Juli 2018		
IKK 3	M.493 (27/07/2018)	Permohonan kepada Presiden untuk Memberlikan Sambutan dan Meresmikan Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dalam Acara Soft Lauching Kebijakan Satu Peta	30/97/2018	M-846
IKK 3	M.496 (30/07/2018)	Permohonan Peresmian Beberapa Venue dan Non Venue Asian Games ke-18 di Provinsi DKI Jakarta	01/03/2018	M-853
ікк з	M.501 (01/08/2018)	Penyampaian bahan wicara peresmian pembukaan pameran otomotif Galkindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-26 tahun 2018 dan peluncuran alat mekanis multiguna pedesaan (AMMDES), tanggal 2 agustus 2018 di Tangerang	02/05/2018	M-862
IKK3	M.514 (08/08/2018)	Permohonan briefing sheet audiensi direktur utarna PT. Astra dengan Sekretaris Kabinet, pada tanggal 8 agustus 2018		
ІККЗ	M.577 (18/09/2018)	permohonan kehadiran Presiden untuk menghadiri acara Peresmian ekspor Perdana New Ertiga Dan Nex II	18/09/2018	M-1059
lick 2	M.585 (25/09/2018)	Briefingnote Kunjungan Presiden dalam rangka Penyampaian Sertipikat Tanah Untuk Rakyat di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Tanggal 25 September 2018		y i

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
	40 (2018) 2018-01-17	Permohonan Izin Menghadiri Undangan Tirjaua Lapangan dan Pembahasan Usulan Rencana Pengembangan Kawasan Walini		
	56 (2018) 2018-01-22	Permohonan izin menghadiri undangan menjadi narasumber pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Jenderal Tata Ruang 2018, di Suraby, Jawa Timur		
đ	AL E	Permohonan izin menghadiri peresmian java integrated industrial and ports estate (JIIPE) dan Kapal Pendukung tol laut di Gresik, Provinsi Jawa Timur	20/03/2018	M-319
		Permohonan persetujuan menghadiri kelanjutan program knowledge management system on NCICD program di Korea Selatan	20/03/2018	M-318
		Permohonan izin menghadiri undangan menjadi narasumber pada acara rapat sosialisasi kegiatan Sinkronisasi lumpang tindih antar peta tematik sektor kehutanan, pertambangan, pertanahan, dan tata ruang untuk wilayah sumatera, kalimantan, sulawesi, jawa, bali dan nusa lenggara revisi	20/03/2018	M-314
		Реглонопал Izin Menghadiri Undangan menjadi Narasumber pada Diskusi Dukungan Penalaan Ruang Kawasan Perbalasan Negara di Provinsi Riau	20/03/2018	M-323
		Permohonan izin sebagai narasumber pada acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		
		Permohonan izin menghadiri undangan asistensi penyusunan peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencernaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum di Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan kunjungan ke Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Provinsi Jaw Barat tanggal 13 April 2018		
		Permohonan izin menghadiri undangan sebagai narasumber pada rapa koordinasi penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang kelembagaan dan tata kerja TIM DAS Citarum dan Peraturan Gubemur Jawa Barat tentang rencana aksi Satgas DAS Citarum, di Jatiluhur, Kabupaten Purwkarta, Provinsi JAwa Barat tanggal 17-18 April 2018		
		Permohonan izin untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi peraturan presiden no 16 tahun 2018 ke Semarang, tanggal 6-7 Maei 2018		
THE PERSON NAMED IN		Permohonan izin kepada Sekretaris Kabinet untuk menghadiri rapat percepatan pembangunan kawasan industri yang lermasuk dalam proyek strategis nasional, pada tanggal 14 mel 2018, di Bali		
		Permohonan Persetujuan Menghadiri Konsinyasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018		
	M.458 (11/06/2018)	Permohonan izin menghadiri undangan rapat koordinasi rencana percepatan pembangunan Bandara Kodiri diKabupaten Kediri, jawa Timur tanggal 12-13 Juli 2018		
H	ADM	Penugasan Pelaksana Tugas Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri		
	ADM	permohonan izin melaksanakan rapat koordinasi "Percepatan Penyusunan Pelaporan tindak lanjut arahan Presiden		

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO, SESKAB
IKK 1	603 (2017) 2017-12-28	Pengukuhan Presiden sebagai Insinyur Profesional Teknik Kehutanan	31/01/2018	M-105
IKK 1	2.(2018) 2018-01-02	Kpd: Menteri Tani, Perihal: Permohonan bantuan dana pembangunan sarana penampung air dan JITUT	31/01/2018	M-113
IKK 1	23.(2018) 2018-01-10	Pengukuhan Presiden sebagai Insinyur Profesional Teknik Kehulanan	31/01/2018	M-91
IKK 1	606.(2017) 2017-12-19	Laporan posisi freeport Indonesia dalam perspeklif lingkungan dan kehutanan		
IKK 1	609.(2017) 2017-12-12	Kpd Mentan perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pulau Karantina		
IKK 1	202 (2017) 2017-03-21	Permohonan agenda Presiden untuk meluncurkan Rencana Aksi Nasional lujuan Pembangunan Berkelanjulan / Sustainable Development Goals (di Istana Negara, Jakarta, Bulan Februari 2018)	31/01/2018	M-97
IKK 1	54 (2018) 2018-01-29	Permohonan Agenda Rapat Kerja Pengarahan Presiden Menghadapi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018 (di Istana, Jakarta, tanggal 2 Februari 2018)		(8)
IKK 1	53.(2018) 2018-01-29	Laporan Kegiatan Menghadiri Peresmian Layanan Kewirausahaan Petani dan Digitalisasi Sistem Pertanian di Kabupaten Indramayu		
IKK 1	45.(2018) 2018-01-23	Penyerapan gabah di Luar Kualitas pada musim Panen Rendeng tahun 2018 oleh Perum Bulog		
IKK 1	44.(2018) 2018-01-22	Laporan kinerja Kementerian LHK	31/01/2018	M-109
IKK 1	56.(2018) 2018-01-29	Laporan Menteri Keuangan dan Menteri LHK menghadri One Planet Summit (Paris, 11-12 Desember 2017)		
IKK 1	61.(2018) 2018-02-01	Tanggapan ke-9 atas tembusan urat Plt, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor.S,425/PSLB3/VPL,B3/10/2017		
IKK 1	63 (2018) 2018-02-02	Laporan Pertemuan dengan Duta Besar Belanda mengenai Larangan Penggunaan Produk Kelapa Sawit Indonesia di Maskapai KLM	21/02/2018	M-206
IKK 1	65.(2018) 2018-02-02	Penyelesaian pembayaran atas pengadaan Gabah di Luar Kualitas tahun 2017 dan Pengadaan Gabah/Beras dalam negeri tahun 2017 dengan fleksibilitas harga		
IKK 1	67.(2018) 2018-02-06	Permohonan Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Desa Perbangunan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara		
IKK 1	70 (2018) 2018-02-06	Laporan Menteri LHK mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2017 dan Rencana Pengarahan Presiden pada Karhutla 2018		
IKK 1	77.(2018) 2018-02-08	Laporan rapat pembahasan persiapan kunjungan kerja Presiden dalam rangka Program Peremajaan Sawit Rakyat (Kemenko bidang Ekonomi, tanggal 7 Februari 2018)		
IKK 1	71.(2018) 2018-02-06	Laporan pelaksanaan distribusi rastra tahun 2017	26/02/2018	M-217
IKK 1	79.(2018) 2018-02-12	Kpd: Menteri Perdagangan, Perihal: Permohonan pembatalan Kebijakan Impor Beras	Reli	
IKK 1	81 (2018) 2018-02-12	Permohonan agenda Presiden untuk meresmikan Istana Panda Indonesia di Lembaga Konservasi Taman Safari Indonesia (Jadwal disesuaikan dengan agenda Presiden)	27/02/2018	M-223
IKK 1	103.(2018) 2018-02-27	permohonan agenda rapat lerbatas kabinet pembahasan RUU konservasi Sumber Daya Alam Hayali dan ekosistemnya	27/02/2018	M-222
IKK 1	68 (2018) 2018-02-06	Kpd Menteri Perdogangan perihal Penyampalan Pormasalahan Harga Bawang Merah Konsumsi		
IKK 1	84.(2018) 2018-02-12	Laporan Badan Restorasi Gambut (BRG) hingga Bulan November 2017		

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
IKK 1	115 (2018) 2018-03-05	Usulan Pengelolaan Cadangan Beras Pemerinlah		
IKK 1	120.(2018) 2018-03-07	Laporan hasil rapat tim pengarah teknis Badan Restorasi Gambut (BRG)	Balle.	
IKK 1	125.(2018) 2018-03-09	Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization	23/03/2018	M-343
IKK 1	133.(2018) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Usulan Penetapan Hari Daur Ulang Internasional (18 Marel) + R. Sural Seskab ke Mentero LH dan Kehulanan			M-348
IKK 1	Laporan Perkembangan Capaian Pelaksanaan Restorasi Gambut oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) hingga bulan Desember 2017		26/03/2018	M-347
IKK 1	IKK 1 164.(2018) 2018-03-22 Kpd: Menko Polhukam, Perihai: High Pressure Fire Fighting System		26/03/2018	M-345
IKK 1		Kpd Mentan perihal Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani		
IKK 1		Usulan skema subsidi daging		
IKK 1		Laporan Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia melalui The Third National Communication Under the UNFCCC	12/04/2018	M-416
IKK 1	220 (2018) 2018-04-16	permohonan izin Menteri LHK untuk menghadiri Ministerial Roundtable Unild Nations Forum on Forest (UNFF) ke-13 New York, 5 s.d. 9 Mei 2018)		
IKK 1	226 (2018) 2018-04-18	Hasil Evaluasi Tata Kelola Beras Nasional oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan		
IKK 1	229,(2018) 2018-04-19	Kpd Menteri Perdagangan perihal Tindaklanjut Penandatanganan Protocol to Amend Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia-Pakistan (Khususnya terkali Impor Mangga dari Negara Pakistan)		
IKK 1	239.(2018) 2018-04-24	Laporan Menteri LHK menghadiri the 3rd partners meeting of global peatland initiative (GPI) dan Pertemuan bilateral dengan Uni Eropa (Brazzavilles, Republik Kongo, 22 s.d. 26 Maret 2018)	25/04/2018	M-476
IKK 1	237 (2018) 2018-04-23	Pandanan Menteri LHK tentang Rencana Kunjungan kerja ke Uni Eropa dalam rangka phase out palm-oil based biofuels tentang sawit tanggal 23-24 April 2018	25/04/2018	M-474
IKK 1	245.(2018) 2018-04-30	permohonan agenda Presiden untuk menghadiri dialog dan penutupan jambore masyarakat gambut 2018 di Kamlimantan Selatan, 30 April 2018		V= 0
IKK 1	249.(2018) 2018-04-30	Laporan Menteri LHK mengenai Kegialan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Periode 1 Januari s.d. 10 April 2018	07/05/2018	M-542
IKK 1	424.(2018) 2018-05-30	Permohonan Agenda Wakil Presiden untuk Meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (di Istana Wakil Presiden)	The state of the s	
IKK 1	426 (2018) 2018-05-30	Laporan hasil rapat koordinasi pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) {Kemenko bidang Perekonomian, tanggal 25 Mei 2018)		
IKK1	311.(2018) 2018-06-04	1) laporan rapat koordinasi Menteri untuk persiapan rapat kerja PPTKH 2018 dengan Gubernur tanggal 31 Mei 2018. 2) Briefing sheet rapat kerja nasional koordinasi pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) (Ruang Bhirawa, Gedung Bidakara, tanggal 5 Juni 2018)	16 7 1 #45 6	

IKK NO. MEMO ASDEP		PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKA	
IKK 1	321.(2018) 2018-06-07	Laporan Peluncuran Rencana Aksi Nasional Tuluan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-TPB) (Istana Wakil Presiden, tanggal 5 Juni 2018)			
IKK 1	M.360 10/07/2018	permohonan audiensi Dubes Uni Eropa kepada Seskab terkait EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership agreement (EU-CEPA)			
IKK 1	M.327 08/06/2018 TW2	Laporan Hasil Rapat Kerja Nsional Koordinasi Pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) tanggal 5 Juni 2018			
IKK 1	M 286 24/05/2018 TW2	Percepatan Izin Investasi Sektor Pertanian			
IKK 1	M.325 8/7/2018	Laporan Serah Terima Surat Kepercayaan (Letter of Credence) dan FAO Representative di Jakarta Tanggal 23 April 2018			
IKK 1	IKK 1 M 384 Laporan Menteri LHK mengenai Kegialan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Periode Januari s.d., Juni 2018		24/07/2018	M-823	
IKK 1	24/07/2018 Berkelanjutan				
IKK 1	M.398 24/7/2018	Laporan kinerja Badan Restorasi Gambut (BRG) s.d. bulan Juni 2018	26/07/2018	M-835	
IKK 1	M.391 24/07/2018	Laporan Kualilas Udara di Jakarta, Keasaman Air Hujan Indonesia dan Konsentrasi Gas Rumah Kaca <b>(GRK)</b>	26/07/2018	M-836	
IKK 1	M.383 Laporan Penjalanan Dinas Luar Negeri UKP-PPI Menghadiri "Äustralia-Indonesia 24/07/2018 Program for Sustainable Development & Climate Change" di Australia		26/07/2018	M-831	
IKK 1	M.394 24/07/2018	Penyampaian Rangkuman Corrective Actions Kehutanan Serta Paparan Kementerian LHK dalam Forum Sidang FAO di Roma	26/07/2018	M-834	
IKK 1	M.416 30/7/2018	Kpd MenLHK perihal Rekomendasi Melindungi dan Melestarikan Satwa Liar Orangutan Tapanufi			
IKK 1	M.422 01/08/2018	Penyampaian Laporan Hasil Technical Working Group (TWG) and Sub-Regional Ministerial Streering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution (THP) ke-20	02/08/2018	M-868	
IKK 1	M.432 02/08/2018	Kod Menteri LHK perihal Rekomendasi Association Des Plongeurs Sous-Marins Du Quebec terhada Kebijakan Penggunaan Plastik Sekalai Pakai di Indonesia			
IKK 1	M,450 14/08/2018	Kod Mentan Perihal Permohonan Perlindungan Anjing dari Tindakan Kekerasan dan Perdagangan Daging Anjing		15.	
IKK 1	M,457 14/08/2018	Laporan Hasil Rakor Progres Pelaksanaan Rstorasi Gambut	17/08/2018	M-921	
IKK 1	M,454 14/08/2018	Penyaluran cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi harga beras medium	23/08/2018	M-940	
IKK 1	MATA Knd Kosou Prolo Kosous hal Pala Line Line Till Addition				
IKK 1	MAO2 Delegand Took Dusin with Delay		31/08/2018	M-977	
IKK 1	M.488 30/08/2018	penyampaian laporan hasil the 24th sesion committee on Forestry, tanggal 16-20 Juli 2018 di Roma, Italia		15	
IKK 1	M.492	Kpd Menteri LHK, dan Menteri Perianian perihal penyampaian saran terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan		5,81	
IKK 1	M_493	aporan pelaksanaan rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca rang lerintegrasi tahun 2016	04/09/2018	M-995	
IKK 1	05/09/2018	Kod: Menteri ATR/Ka BPN, Mentan, Menteri LHK, Perihal: Permohonan penyelesalan sengketa lahan perkebunan masyarakat dengan PT PP London Sumatera Tik			

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
BOK 1	Permohonan untuk menjadi pembicara dalam acara High Level Event Around the Opening of the UN General Assembly di New York		06/09/2018	M-1015
IKK 1	M.508 12/09/2018	The internal English Edding Build I I Ere (1 clocks), blist baddi		
RGC 1	M.507 12/09/2018	usulan keanggotaan Komisi Kearnanan Hayati Produk rekayasa genetik		
IKK 1	M.511 13/09/2018	13/09/2018	M-1059	
IKK 1	M.513 13/09/2018	Laporan Pertemuan Penguatan Sinergitas Kernenterian Pertanian dengan KADIN, Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN di Hotel Ihe Anvaya Beach Resort, Bali		
IKK 1	14.514 27/09/2018	Permohonan Kehadiran Sekretaris Kabinet untuk Menghadiri Acara Penanaman Pohon (22 September 2018) dan Pesla Makan Malam (21 September 2018) di Jakarta		
IKK 1	M.518 18/09/2018	Laporan Deiri pada perundingan Ünited Nations Climate Change Conference Additional of the Subsidary Bodies'di Bangkok, Thailand tanggal 4-9 September 2018		
IKK 1	M.539 27/09/2018	Laporan Badan Restorasi Gambut s.d. Bulan Agustus 2018	28/09/2018	M-1102
IKK 1	M.540 27/09/2018	Kpd MenLH dan Mentan perihal Pelestarian Orang Utan di Indonesia		

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO, SESKAB
IRK 2	28.(2018) 2018-01-12	100		
IKK 2	72.(2018) 2018-02-06	Kpd: Menteri LHK. Perihal: Permohonan peninjauan kembali instruksi Presiden nomor 8 tahun 2015 tentang penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru Hutan Alam Primer dn Lahan Gambut	T. S.	
lkk 2	137.(2018) 2018-03-15			
IKK 2		Laporan tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
IKK2	228 (2018) 2018-04-18	Kpd Menteri ATR, Mentan, Mendagri, Menko Perekonomian dan MenLH perihal Permohonan Paraf Persetujuan aalas R. Inpres tig Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit		
IKK 2	345.(2017) 2017-07-17	Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit	08/06/2018	M-660
lkK2	328.(2018) 2018-06-08	Penyampaian Masukan dari Menteri ATR/Kepala BPN atas Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evakuasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	The same	
IKK2	M.347 02/07/2018	Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	03/07/2018	M-705
IKK 2	M.424 02/08/2018	Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement of the Establishment Asian Forest Cooperation Organization (AE AFoCO) / Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia		
IKK2	M.441 08/08/2018	Penyampaian R. Perpres tentang Reforma Agraria		
IKK 2	M,477 27/08/2018	Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pembahasan R. Perpres tentang Reforma Agraria	4.P(=	19 00

IKK	NO. MEMO ASDEP	PERIHAL	KE PRESIDEN	NO. SESKAB
IKK3	31,(2018) 2018-01-15	Penyampaian bahan rapat terbatas penataan daerah aliran sungai citarum (Bandung, 16 Januari 2018)	31/01/2018	M-96
IKK 3	95.(2018) 2016-02-22	Permohonan Agenda Presiden untuk Membuka Festival Danau Sunter (Jakarta, 25 Februari 2018)		
<b>ЖКЗ</b>	108.(2018) 2018-03-02	penyampaian bahan pertemuan Presiden RI dengan Menteri Kabinet Kerja terkait Pengaruh Harga Beras terhadap Tingkat Kemiskinan		
lkk3	110.(2018) 2018-03-03	Permohonan Agenda Presiden Rencana Kunjungan Kerja Hutan Sosial	22/03/2018	M-328
IKK3	117.(2018) 2018-03-05			
IKK3	168 (2018) 2018-03-23	Usulan lokasi Rapat terbatas di Desa untuk Program Padat Karya bidang Pertanian	23/03/2018	M-342
ІКК3		Penyampaian Bahan Presiden dalam Menerima Delegasi US-ASEAN Business Council		M-357
IKK3		Penyampaian Briefingsheet dan Infografis Ratas mengenai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Selasa, 3 April 2018, Pukul 15.00 WIB)	03/04/2018	M-368
IKK3		Penyampaian bahan rapat terbatas terkait persiapan menghadapi Idul Fitri 1439H/2018M		M-378
IKK3		Permohonan Agenda Presiden untuk Membuka Acara Jambore Masyarakat Gambut 2018 (Kalimantan Selatan, 28 April 2018)	11/04/2018	M-402
IKK3		Permohonan Agenda Presiden Rencana Kunjungan Kerja Hutan Sosial (Bulan April dan Mei 2018)	13/04/2018	M-428
KK3	242.(2018) 2018-04-24	Permohonan agenda Presiden rencana kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah (30 April 2018)		
ККЗ	250.(2018) 2018-04-30	Permohonan Kunjungan Kerja Presiden ke Provinsi Gorontalo		
IKK3	259,(2018) 2018-05-04	Permohonan Penyesuaian Agenda Presiden Rencana Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sumatera Barat	07/05/2018	M-523
IKK3	258.(2018) 2018-05-04	Penyampalan Usufan Topik Sidang/Kabinet Terbatas (Ratas) di Bidang Perekonomian		
IKK3	425 (2018) 2018-05-30	bahan rapat terbatas tentang persiapan menghadapi Idul Fitri 1439 H/2018 M	30/05/2018	14-628
IKK 3	M.353 5/7/2018	Permohonan pertemuan petani eksportir dengan Bapak Presiden RI Tahun 2018		N U
IKK3	M.379 19/07/2018	Penyampaian Bahan Raat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Pelaksanaan Mandatory Biodiesel (Jumat, 20 Juli 2018 10:00WIB)	20/07/2018	M-613
IKK3	M.411 27/07/2018	Penyampaian Bahan Rapat Internal Presiden		M-840
IKK3	M.410 27/07/2018	Permohonan Kehadiran Presiden RI pada International Conference on Biodiversity Ecotourism, And Creative Economy (ICBE), Manokwari, 7-10 Oktober 2018		
IKK3	M.415 30/07/2018	Permohonan Kehadiran Presiden pada Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2018 Tanggal 10 Agustus 2018 di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara		
IKK3	M.425 03/08/2018	Penyampaian Bahan Rapat Internal Presiden dengan Menteri Pertanian terkait Kenaikan Harga Beras	03/08/2018	M-871

IKK	K NO. MEMO PERIHAL		KE PRESIDEN	NO. SESKAB
IKK3	M,427 03/08/2018	Laporan Per Bulan Kemajuan Penggunaan B20		
#ККЗ	M,451 15/08/2018	Usulan Rencana Kunjungan Kerja Hutan Sosial	29/08/2018	M-927
вк.з	M;462 15/08/2018	Permohonan kehadiran Presiden dalam peningatan hari konservasi alam nasional (HKAN) Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018 di Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara		
IKK3	M.476 27/08/2018	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjul Arahan presiden lerkait Laporan per Bulan Kernajuan Penggunaan B20 (+R.Surat ke Menko Maritim, Menkeu, Menda, Menhub, Mentan dan MenBUMN)	29/08/2018	M-963
IKK3	M.475 27/08/2018	dan republik Peru beserta Direktur Eksekutif United Nations Environment		M-962
IKK 3	M.503 05/09/2018	permohonan kehadiran Presiden dalam pembukaan Global Land Forum tanggal 24 September 2018		M-1022
IKK3	M.505 10/09/2018	panen raya padi rawa dalam rangkaian Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan		M-1044
IKK3	M.529 24/09/2018	permohonan kehadiran Presiden RI pada International Conference On Biodiversity Ecoturism and Creative Economy (ICBE) (Manokwari, 7-10 Oktober 2018)		

#### RINCIAN CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER 2018)

No	Acdon	sdep Perihal	Ju	mlah	Disposisi
140	Asdep	Perinal	Output	Outcome	Seskab
1	2	3	4	5	6
Jumlah	n Keseluru	than (IKK 1 + IKK2 + IKK 3)	233	223	THE REAL PROPERTY.
A. IKK	Rancang	gan Rekomendasi Kebijakan (Tusi 1, 2, 3, & 6)	153	145	1137
A.1	Pelaksai	naan Tusi 1	12	11	
1	1	Permohonan Penetapan Peraturan Presiden Protocol 7 Custom Transit System	M.452 (02/07/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
2	2	Permohonan Waktu Audiensi bagi Koperasi Nasional Indonesia (KNI)	M.454 (03/07/2018)	Respon Seskab	Proses lebih lanjut
3	3	Laporan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	M,482 (11/07/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklanjutnya
4	2	Penyampaian Kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Kelentuan Impor Tembakau	M,485 (11/07/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	noted - arsip
5	2	Permohonan Arahan Presiden atas rencaa pilot Project sistem Penempatan satu Kanal (SPSK) Penempatan Migram Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Arab Saudi	M,531 (20/07/2018)	M-819 (23/07/2018)	Proses 1bh lanjut
6	1	Laporan Rapat Kelompok Kerja Pusat Tim Pengendalian Inflasi Pusat	M 584 (10/08/2018)		noted - arsip
7	1	Antisipasi dan Solusi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Bagi Seluruh K/L atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019	M 610 (23/08/2018)	M-947 (24/08/2018)	Proses Ibh lanjut
8	1	Penyampaian Laporan Hasil Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Buenos Aires, Argentina	M,616 (28/08/2018)	M-961 (29/08/2018)	Proses (bh lanjut
9	3	Rencana Tindak Lanjut Penyediaan Rumah Bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	M 652 (04/09/2018)	M-1004 (05/09/2018)	Proses lbh lanjut
10	1	Laporan Rapat Pembahasan Mengenai Pengembangan Promosi Nasional (Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia/RPerp res)	M,655 (05/09/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
11	1	Revisi Target Investasi 2018-2019	M,678 (13/09/2018)	M-1058 (13/09/2018)	Proses Ibh lanjut
12	4	Rekomendasi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Salah Satu Bentuk Bela Negara dalam rangka Ketahanan Nasional	M <sub>4</sub> 717 (28/09/2018)	8- 478/Seskab/ekon/ 10/2018 (2 Okt 2018)	Proses lbh lanjut
A.2	Pelaksar	naan Tusi 2	61	59	
1	4	Permohonan Audiensi Duta Besar Uni Eropa Kepada Sekretaris Kabinet terkait EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)	M:471 (10/07/2018)	Respon Seskab (Rekomendasi tidak diterima)	arsip
2	1	Laporan Realisasi Penanaman Modal Periode Triwulan I Tahun 2018	M 479 (11/07/2018)	M-770 (13/07/2018)	Proses Ibh lanjut
3	2	Laporan BPJS Ketenagakerjaan Triwulan I Tahun 2018	M_487 (11/07/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - Setuju, Arsip
4	1	Oplimalisasi Peran Indonesia di APEC untuk Peningkatan Pembangunan Inklusif dalam Rangka Ketahanan Nasional	M,488 (11/07/2018)	M-768 (13/07/2018)	Proses Ibh Ianjut
5	3	Permohonan Audiensi dan Dukungan Perubahan Rencana Kegialan Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Irigasi	M 489 (11/07/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - Setuju, Arsip
6	1	Laporan Pelaksanaan Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan	M_490 (11/07/2018)	M-776 (13/07/2018)	Proses Ibh lanjut
7	2	Tindak Lanjut Penandatanganan Protokol Perubahan Perjanjian Indonesia-Pakis tan Preferetial Trade Agreement (PTA) Khususnya terkait dengan Impor Mangga dari Pakistan	M 495 (11/07/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklanjutnya
8	1	Permohonan Izin Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Eks KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam (d.h. Total E&P Indonesia)	M 498 (11/07/2018)	M-780 (13/07/2018)	Proses lbh lanjut
9	3	Permohonan IP-PPAT kepada Presiden dalam rangka Pembukaan Kongres IPPAT ke-VII Tahun 2018	M_499 (11/07/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh Ianjut

No Asdep		dep Perihal	Ju	Disposisi	
INO	Asuep	Perinal	Output	Outcome	Seskab
1	2	3	4	5	6
10	1	Permohonan audiensi dan membuka Pameran Otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) TAhun 2018	M,506 (11/07/2018)	M-786 (16/07/2018)	Proses Ibh Ianju
11	2	Notulensi Rapat Wakil Presiden tentang Penyelesaian Isu Perundingan : a. Indonesia-Austr alia Comprehensive Economic Partnership Agreement; b. ASEAN-Regional Comprehensive Economic Partnership; c. Indonesia-Europ ean Union Comprehensive Economic Partne	M_507 (11/07/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	setuju> note dan arsip
12	2	Rekomendasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah	M.508 (11/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lanj
13	2	Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tahun 2017	M.511 (11/07/2018)	Respon Seskab	tindaklanjuti
14	1	Tindak Lanjut Atas Surat Dari Asosiasi Fastener Indonesia	M.513 (11/07/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjuti
15	4	Permohonan Pertemuan Petani Eksportir dengan Bapak Presiden RI Tahun 2018	M,518 (17/07/2018)	Respon Seskab	Pantau
16	2	Undangan Sebagai Pemateri Dalam Simposium-Orkes tra BPJS Ketenagakerjaan , tanggal 8 Agustus 2018 di Djakarta Theater	M.519 (17/07/2018)	Respon Seskab	tindaklanjutnya materinya, utk kepastian hadir acara tsb diputuskan seha
17	4	Laporan Serah Terima Surat Kepercayaan (Letter of Credence) dari FAO Representative di jakarta 23 April 2018	M,523 (18/07/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjulnya
18	2	Antisipasi Perekonomian Indonesia dari Dampak Perang Dagang Tiongkok - Amerika Serikat	M 530 (20/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lanj
19	1	Penyampaian Capaian Kinerja Pemerintah	M 533 (23/07/2018)		Tidak ada di pencatatan TU Seskab
20	2	Permohonan Pembangunan Pasar Tradisional Aksara Kota Medan	M.535 (23/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lanj
21	2	Dugaan Pelanggaran Hak Pekerja di Anak Perusahaan Wilmar International Limited dan Perusahaan Pemasoknya di Indonesia	M.538	Respon Seskab	proses lebih lanj
22	4	Penyampaian Saran Terkait Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	(24/07/2018) M.540	Respon Seskab	proses lebih lanj
23	4	Laporan Kualifas Udara di Jakarta, Keasaman Air Hujan Indonesia dan Konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK)	(25/07/2018) M.544	M-836	proses lebih lani
24	4	Penyampaian Rangkuman Corrective Actions Kehutanan serta	(25/07/2018) M 546	(26/07/2018) M-834	proses lebih lani
25	3	Paparan Kementerian LHK dalam Forum Sidang FAO di Roma Permohonan kepada Presiden untuk memberikan sambutan dan meresmikan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta	(25/07/2018) M 555 (30/07/2018)	(26/07/2018) M-846 (30/07/2018)	proses lebih lanj
26	3	dalam acara Soft Launching Kebijakan Satu Peta Permohonan Peresmian Beberapa Veneu dan Non-Veneu Asian	M 557	M-853	proses lebih lanje
27	3	Games ke 18 di Provinsi DKI Jakarta  Dukungan Program Pembiayaan Perumahan Melalui Perbankan	(30/07/2018) M.558	(01/08/2018) Respon Seskab	Monitor
28	2	Permohonan Audiensi terkait Pembangunan Pasar Kaliwungu	(30/07/2018) M 561		Pelaksanaannya
29	2	Kabupaten Kendal yang mengalami Kebakaran Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan ke Tunisia dan	(31/07/2018) M.562	Respon Seskab M-852	proses lebih lanji
29	2	Maroko Permohonan Kesediaan Bapak Presiden untuk Membuka dan	(31/07/2018)	(01/08/2018)	proses lebih lanji
30	3	Menjadi Pembicara pada Acara HSSC Infrastructure Forum 2018	M.568 (02/08/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
31	1	Laporan Rapat Koordinasi Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Pembentukan dan Pengelolaan Dana Investasi Real Estate (DIRE)	M.569 (02/08/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
32	4	Rekomendasi Association Des Plongeurs Sous-Marins Du Quebec terhadap Kebijakan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Indonesia	M 572 (02/08/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh lanju
33	2	Permohonan bantuan untuk melepaskan kotak telur secara langsung tanpa dokumen pemerintah	M.434 2018-08-03		
34	2	Permohonan Kehadiran Bapak Presiden dalam Penyelenggaran Export Ceremony Toyota Group	M.577 (06/08/2018)	Respon Seskab	Monitor
35	2	Permohonan Penyampaian Rencana Ratifikasi ASEAN-Hong	M.588	Respon Seskab	tindaklanjutnya Laporkan
36	2	Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)  Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS  Ketenagakerjaan Semester I Tahun 2018	(13/08/2018) M_591 (13/08/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di	tindaklanjutnya noted - arsip
		Permohonan Perlindungan Anjing dari Tindakan Kekerasan dan	M.594	dalam memo)	

No	Asdep	Parihal	Jur	nlah	Disposisi
140	Asuep	Perihal	Output	Outcome	Seskab
-1-	2	3	4	5	6
38	1	Laporan Rapat Pembahasan Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (RPP Hibah)	M,600 (20/08/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
39	3	Rasionalisasi Tarif Tol	M,601 (20/08/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - Arsip
40	2	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Usulan Perubahan Piafon Kredit Usaha Rakyat, Pembayaran Imbal Jasa dan Kredit Usaha Rakyat Parlwisata	M,605 (21/08/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklanjuti
41	2	Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan oleh Koperasi Perikanan	M,608 (23/08/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
42	2	implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi	M.611 (23/08/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - Arsip
43	3	Penanganan/Penertiban Limbah Industri	M,613 (23/08/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
44	2	Kunjungan Menteri Perdagangan ke Washington D.C. Amerika Serikat	M,628 (29/08/2018)	Respon Seskab (Terdapal rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
45	1	Laporan Realisasi Penanaman Modal (PM) Periode Triwulan (TW) II 2018 dan Periode Semester (SMT) I 2018	M.630 (29/08/2018)	M-982 (31/08/2018)	Proses Ibh lanjut
46	1	Penugasan Liason Officer Kementerlan/Lem baga tetap diperlukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM	M 631 (29/08/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklaniutnya
47	1	Permohonan Keringan Pajak pada Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA)	M 633 (29/08/2018)	M-980 (31/08/2018)	Proses lbh lanjut
48	4	Dukungan Bank Dunia untuk Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Stunting	M.636 (30/08/2018)	M-977 (31/08/2018)	Proses lbh lanjut
49	3	Rekomendasi Perumahan	M.640 (31/08/2018)	Respon Seskab	Proses 1bh lanjut
50	4	Penyampaian saran terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	M.646 (03/09/2018)	Respon Seskab	Proses (bh lanjut
51	4	Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang Terintegrasi Tahun 2016	M 647 (03/09/2018)	M-995 (04/09/2018)	Proses Ibh lanjut
52	2	Laporan Logistics Performance Index (LPI) 2018	M.649 (04/09/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
53	4	Permohonan Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Masyarakat denfgan PT PP London Sumatera Tbk	M 658 (06/09/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh lanjut
54	2	Peringkat Daya Saing Indonesia dalam Global Competitiveness Report	M 665 (10/09/2018)	M-1049 (13/09/2018)	Proses Ibh lanjut
55	2	Pengaduan PT Pradha Karya Perkasa	M 667 (10/09/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Setuju - Noled
56	2	Laporan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR-RI dengan Direktur Jenderal Perundingan perjanjian Internasional dalam rangka pembahasan proses ratifkasi protokol 6 (enam) perjanjian ASEAN	M 675 (13/09/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	noted - arsip
57	1	Penyampaian Kajian Mengenai Pelemahan Nilai Tukar Rupiah	M 681 (13/09/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	noted - arsip
58	2	Permohonan izin pembukaan perkebunan aren oleh koperasi karya usaha kita (KOPKARU)	M 682 (13/09/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh lanjut
59	4	Laporan Derli pada perundingan "United Nations climate change conference additional of the subsidary bodies" di bangkok, thailand tanggal 4-9 september 2018	M 692 (19/09/2018)	Respon Seskab	noted - arsip
60	1	penyampaian tanggapan kementerian keuangan atas permohonan pengujian validitas rencana pemberian hibah oleh onodera masataka	M <sub>1</sub> 703 (24/09/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	kehati-hatian dan recheking diperlukan utk mengkaji hal spt
61	2	permohonan PT cisco Systems Indinesia dalam kerjasama pengembangan ekonomi digital dan keamanan sibel	M.712 (27/09/2018)	M-1100 (28/09/2018)	Proses Ibh lanjut
A.3	Pelaksan	aan Tusi 3	62	58	- I - 7 7
1	1	laporan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan tanggal 16-19 Mei 2018	M-451 (29/06/2018) - TW	M-692 (02/07/2018) - TW	Proses lbh lanjut

No	Asdep	Perihal	Ju	mlah	Disposisi
140	Asdep	reiliai	Output	Outcome	Seskab
1	2	3-3-	4	5	6
2	1	Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2018	M.457 (03/07/2018)	M-703 (03/07/2018)	Proses Ibh Ianji
3	1	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2017	M_458 (03/07/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	noted - arsip
4	3	Laporan Permohonan Peresmian Beberapa Ruas Jalan Tol	M.463 (05/07/2018)	M-732 (06/07/2018)	Proses Ibh lanju
5	1	Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017	M.466 (05/07/2018)	M-742 (06/07/2018)	Proses Ibh Ianji
6	2	Laporan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI dalam Rangka Pembahasan Proses Ratifikasi Protokol 6 (Enam) Perjanjian ASEAN	M_470 (09/07/2018)	Respon Seskab	usulkan utk rati
7	1	Tindak Lanjut Penyelesaian atas Permohonan 12 (Dua Belas) Kasus Kerugian Negara yang Mengajukan Permohonan Banding Administrasi kepada Presiden di Lingkungan Kementerian Keuangan	M 473 (10/07/2018)	M-753 (10/07/2018)	Proses Ibh lanju
8	2	Transformasi KPBPB Batam menjadi KEK Batam	M.478 (11/07/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - Arsip
9	1	Laporan Triwulan I Tahun 2018 Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (khusus investasi)	M 483 (11/07/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh Ianju
10	4	Laporan Hasil Rapat Kerja Nasional Koordinasi Pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) (Ruang Bhirawa, Gedung Bidakara, tanggal 5 Juni 2018)	M_486 (11/07/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklanjutnya
11	1	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perencanaa Pembangunan Nasional ke Irlandia, Perancis, dan Inggris pada tanggal 12-17 Maret 2018	M,491 (11/07/2018)	M-775 (13/07/2018)	Proses (bh lanju
12	4	Percepatan Izin Investasi Sektor Pertanian	M.492 (11/07/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklanjutnya
13	3	Laporan Hasil Reviu Proyek Strategis Nasional Triwulan I Tahun 2018	M 494 (11/07/2018)	M-772 (13/07/2018)	Proses lbh lanju
14	1	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ke Kuala Lumpur, Malaysia	M 496 (11/07/2018)	M-773 (13/07/2018)	Proses Ibh lanju
15	3	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perindustrian ke Republik Ceko dan Republik Federal Jerman pada tanggal 30 April - 4 Me 2018	M 500 (11/07/2018)	M-791 (16/07/2018)	proses lebih lanj
16	1	Penyampaian Laporan Hasil Rangkaian Pertemuan Sidang Tahunan Asian Development Bank Ke-51	M 502 (11/07/2018)	M-782 (16/07/2018)	Proses Ibh lanju
17	3	Laporan Kehadiran dalam Simposium Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepan g tanggal 18-22 April 2018 di Tokyo, Jepang	M,503 (11/07/2018)	M-793 (16/07/2018)	Proses Ibh Lanju
18	3	Permohonan Audiensi Gubernur Kalimantan Utara Dengan Presiden	M.505 (11/07/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh Ianju
19	1	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 April 2018 s.d. 28-29 Juni 2018	M 510 (11/07/2018)	M-783 (16/07/2018)	Proses Ibh Ianju
20	Depmar	Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak Tuban	M 526 (19/07/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh lanju
21	4	Laporan Menteri LHK Mengenai Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Periode Januari Hingga Juni 2018	M.536 (23/07/2018)	M-823 (24/07/2018)	proses lebih lanju
22	3	Permohonan Pertemuan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank dengan Presiden	M.539 (24/07/2018)	M-827 (25/07/2018)	proses lebih lanji
23	4	Laporan Kinerja Badan Restorasi Gambut (BRG) s.d Bulan Juni 2018	M 542 (25/07/2018)	M-835 (26/07/2018)	proses lebih lanji
24	1	Laporan Rapat Pembahasan Mengenai Pengembangan Promosi Nasional	M.543 (25/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lanjo
25	4	Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri UKP-PPI Menghadiri "Australia-Indo nesia Program for Sustainable Development & Climate Change" di Australia	M 545 (25/07/2018)	M-831 (26/07/2018)	proses lebih lanju
26	1	Laporan Rapat Koordinasi Penghematan Belanja Barang Kementenan/Lem baga (K/L) Pagu Anggaran Tahun 2019	M,547 (25/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lanju
27	3	Laporan Rapat Mengenai Tindak Lanjut Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018	M 548 (25/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lanju
28	1	Laporan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai Ministeriat Council Meeting 2018-OECD di Perancis	M,553 (27/07/2018)	M-845 (30/07/2018)	proses lebih lanju

Al-	0 1	sdep Perihal	Jur	Disposisi	
No	Asdep		Output	Outcome	Seskab
1	2	3	4	5	6
29	4	Rekomendasi Melindungi dan Melestarikan Satwa Liar Orangutan Tapanuli	M 560 (31/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lan
30	1	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2017	M.570 (02/08/2018)	M-867 (02/08/2018)	Proses lbh lanj
31	4	Penyampaia Laporan Hasil Technical Working Group (TWG) dan Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution (THP) ke-20 (31 Mei s.d., 1 Juni 2018 di Bangkok, Thailand)	M_571 (02/08/2018)	M-868 (02/08/2018)	Proses lbh lanj
32	3	Permohonan Peletakan Batu Pertama (Groundbreaking ) Jalan Tol Banda Aceh-Sigli dan Peresmian Fly Over Simpang Surabaya, Underpass Beurawe serta Peresmian Masjid At-Taqarmb di Provinsi Aceh	M_579 (06/08/2018)	M-894 (07/08/2018)	Proses lbh lanj
33	1	Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Triwulan I 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia	M.585 (10/08/2018)	M-906 (10/08/2018)	Proses Ibh Ianj
34	1	Penyampaian Hasii Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 28-29 Juni 2018 dan 18-19 Juli 2018	M 595 (16/08/2018)	M-917 (16/08/2018)	Proses Ibh Ianj
35	4	Laporan Hasil Rakor Pelaksanaan Progres Pelaksanaan Restorasi Gambut Per Agustus 2018 (Setkab, 6 Agustus 2018)	M_599 (16/08/2018)	M-921 (17/08/2018)	Proses Ibh Ianj
36	1	Permasalhan PT Karya Cipta Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero)	M,607	Lintas Deputi	
37	3	Usulan Alokasi Pengadaan Lahan/Tanah Proyek Prioritas non-	(21/08/2018) M 621	Respon Seskab	Monitor
38	1	PSN untuk Pembangunan Bendungan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional	(28/08/2018) M.622	M-964	tindaklanjutny Proses lbh lanj
39	1	Keuangan Inklusif Tahun 2017 Penyampaian Berita Resmi Statistik 15 Agustus 2018	(28/08/2018) M 624	(29/08/2018) M-971	Proses (bh lan)
40	2	Laporan Penyelenggaraan INACRAFT 2018	(29/08/2018) M 627	(29/08/2018) Respon Seskab (Tidak ada	noted - arsip
41	1	Penolakan Investasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Perkembangan Investasi Screening di Uni Eropa	(29/08/2018) M,632 (29/08/2018)	rekomendasi di dalam memo) Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di	Noted - Arsip
42	1	Laporan Pelaksanaan Operasional Sistem Online Single Submission (OSS)	M,635	M-981	Proses lbh lan
43	4	Rekomendasi untuk Tidak Melakukan Pencemaran dan Pemborosan Air di Indonesia	(30/08/2018) M,637	(31/08/2018) Respon Seskab	Proses lbh lan
44	3	Laporan Hasil Reviu Proyek Strategis Nasional Triwulan II Tahun 2018	(30/08/2018) M 639	Respon Seskab	Monitor
45	4	Penyampaian Laporan Hasil The 24th Sesion of the Committee on Forestry tanggal 16-20 Juli 2018 di Roma, Ilalia	(31/08/2018) M 642 (31/08/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	tindaklanjutny Setuju - Arsip
46	1	Usulan Subsidi Pasang Baru Listrik 450 VA	M 656 (05/09/2018)	M-1013 (06/09/2018)	Proses Ibh Ianj
47	1.000	Task force penyelesaian permasalahan penyebab opini tidak menyatakan pendapat (TMP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) pada laporan keuangan	M,666 (10/09/2018)	M-1048 (13/09/2018)	Proses Ibh lanj
48	2	Permohonan Respon atas Program Pro Rakyat Pelatihan UMKM-Agro Industri Pangan	M,669 (10/09/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklanjutny
49	2	Laporan Rapat Koordinasi Tindaklanjut Sinergi dan Integrasi Kegiatan Pendampingan, Pelatihan dan Penyuluhan	M,670 (12/09/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklanjutny
50	1	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14-15 Agustus 2018	M,671 (12/09/2018)	M-1050 (13/09/2018)	Proses Ibh Ianj
51	3	Laporan hasil rapat koordinasi rencana penundaan pelaksanaan proyek strategis nasional	M,673 (12/09/2018)	Respon Seskab (Tidak ada rekomendasi di dalam memo)	noted - arsip
52	3	Penerusan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor	M 674 (12/09/2018)	Lintas Deputí	
53	4	Usulan Keanggotaan Komisi Keamanan Hayatî Produk Rekayasa Genetik	M 676 (13/09/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklanjutny
54	4	Laporan Per Bulan Kemajuan Pengguanaan B20 kepada Presiden	M 680	Respon Seskab	Proses Ibh Iani
55	4	Permohonan Kehadiran Presiden dalam Peringatan Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional dan	(13/09/2018) M.684 (13/09/2018)	M-1059 (13/09/2018)	Proses Ibh lanj
56	1	Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) Usulan Relaksasi Persyaratan Minimal Investasi Bagi Penanaman Modal Asing	M.691 (18/09/2018)	Respon Seskab	tindaklanjuti

No	Acdes	Asdep Perihal	Jun	Disposisi	
NO	Лочер	Perinal	Output	Outcome	Seskab
1	2	3	4	5	6
57	3	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Hasil MTR Program NCICD	M,698	M-1085	Proses Ibh Ianii
58	1	Penyampaian Tanggapan atas Surat Menteri Keuangan Mengenai Permohonan Persetujuan Pengakhiran Perjanjian BOT Gedung Wisma Bakrie II antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT Bakrie Swasakii Utama	(21/09/2018) M_701 (24/09/2018)	(21/09/2018) Respon Seskab	Noted, Setuju Pantau tindaklanjutnya
59	3	permohonan peresmian jembatan gantung dan bendungan	M.711 (27/09/2018)	M-1099 (28/09/2018)	Proses Ibh Ianji
60	4	Laporan Badan Restorasi Gambut s.d Bulan Agustus 2018	M.715 (28/09/2018)	M-1102 (28/09/2018)	Proses Ibh Ianju
61	4	Pelestarian Orang Utam di Indonesia	M.716 (28/09/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh Ianju
62	4	Penyampaian Pengaduan tentang Pembantaian Buaya	M_718 (28/09/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	monitor tindak lanjutnya
A.4	Pelaksan	aan Tusi 6	18	17	
1	2	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	M 477 (11/07/2018)	M 611 (23/08/2018), Tusi 2	tindaklanjuti
2	1	Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)	M,480 (11/07/201)	M-769 (13/07/2018)	Proses lbh lanju
3	1	Laporan Kunjungan Kerja ke Dubai, Persatuan Emirat Arab	M 493 (11/07/2018)	M-774 (13/07/2018)	Proses Ibh Ianju
4	1	Penyampaian Laporan Resume Buku Karya Kwik Kian Gie "Menelusuri Zaman, Memoar dan Catatan Kritis"	M.501 (11/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lanj
5	1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017	M,504 (11/07/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklaniutnya
6	1	Permohonan Sponsorship Pengiriman Delegasi Business ke Doha-Qatar	M,509 (11/07/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh (anju
7	1	Laporan Kunjungan Kerja ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	M.512 (11/07/2018)	M-790 (16/07/2018)	proses lebih lanj
8	1	Penyampaian Buku Indonesia Tahun 2030: Ide dan Gagasan Ekonomi Muda FEB Universitas Indonesia	M 514 (11/07/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh Ianju
9	4	Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga Beras Medium	M 606 (21/08/2018)	M-940 (23/08/2018)	Proses Ibh lanju
10	1	Laporan Kegiatan Temu Investor Surat Berharga Negara (SBN) di Eropa Tahun 2018	M.609 (23/08/2018)	M-948 (24/08/2018)	Proses Ibh lanju
11	2	Rencana Pendirian Kantor Indonesia Trade Promotion Center Shanghai	M 650 (04/09/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklanjutnya
12	1	Laporan Sidang Tahunan Asian Infrastructure Investment Bank ke-3 Tahun 2018 di India	M.672 (12/09/2018)	M-1051 (13/09/2018)	Proses lbh lanju
13	4	Laporan Pertemuan Penguatan Sinergitas Kementerian Pertanian dengan KADIN, Perusahaan daerah/BUMD/BUM N di Hotel The Anvaya Beach Resort, Bali	M.685 (14/09/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted, Arsip
14	2	Pembahasan dan Penyusunan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang Perekonomian Tahun 2015 s.d. Agustus 2018	M.687 (14/09/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
15	1	Penyampatan Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflas i Agustus 2018	M 688 (14/09/2018)	M-1061 (17/09/2018)	Proses Ibh lanju
16	3	Penyampaian Letter Of Intent untuk Berpartisipasi dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia	M 693 (19/09/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh lanju
17	2	Pengaduan Perhimpunan Mantan Karyawan PT Djakarta Lioyd (Persero) Kepada Presiden	M 695 (20/09/2018)	Respon Seskab	Proses lbh lanju
18	1	laporan pertemuan ASEAN Economic Minister (AEM)-21st ASEAN Investment Area (AIA) Council	M_710 (26/09/2018)	M-1098 (27/09/2018)	Proses Ibh lanju
IKK 2	2		25	23	
B.1	Pelaksan	aan Tusi 4	25	23	
1	4	Penyampaian Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	M 460 (03/07/2018)	M-705 (03/07/2018)	Proses Ibh Ianju
2	3	Rancangan Peraturan Presiden tenlang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh-Sumatera Utara	M 461 (04/07/2018)	M-730 (06/07/2018)	
3	2	Permohonan Audiensi dan Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS)	M.472 (10/07/2018)	Respon Seskab	noted - setuju
4	3	Permohonan Paraf Persetujuan Rperpres tentang Permbiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelojaan Terbatas	M 524 (18/07/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh lanju

No	Andon	Parity I	Ju	mlah	Disposisi
IVO	Asdep	Perihal	Output	Outcome	Seskab
1	2	3	4	5	6
5	1	Rancangan Peraturan Presiden tentangan Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan (RPerpres)	M,528 (20/07/2018)	M-821 (23/07/2018)	proses lebih lanju
6	3	Rancangan Perpres tentang percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara	M,549 (26/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lanju
7	3	Penyampaian Tanggapan terhadap Rkeppres tentang Kawenangan Akses untuk Berbagi Data Informasi Geospasial Melalul Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	M,563 (31/07/2018)	Respon Seskab	Noted dan Monito tindaklanjutnya
8	4	Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Pengesahan Agreement of the Establishment Asian Forest Cooperation Organization (AE AFoCO)/Persetuj uan tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia	M.573 (02/08/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
9	4	Penyampaian Rancangan Perpres tentang Reforma Agraria	M,582 (09/08/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh lanjut
10	1	Penetapan Rancangan Peraturan Presiden Mengenai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Rperpres)	M 593 (14/08/2018)	M-912 (14/08/2018)	Proses Ibh lanjut
11	3	Rancangan Keppres tentang Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	M,597 (16/08/2018)	M-925 (17/08/2018)	Proses (bh lanjut
12	3	Rancangan Keputusan Presiden (Rkeppres) tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	M,598 (16/08/2018)	M-924 (17/08/2018)	Proses lbh lanjut
13	2	Laporan Hasil Rapat Pembahasan Materi RUUPK dan Paraf Persetujuan	M 617 (28/08/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
14	4	Hasil Rapat Koordinasi tingkat Menteri Pembahasan Rperpres tentang Reforma Agraria	M.619 (28/08/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
15	4	Kronologi Pengajuan Rinpres tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	M,623 (29/08/2018)	Berkas belum turun dari Seskab	Tidak ada di pencatatan TU Seskab
16	3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara	M,625 (29/08/2018)	M-972 (29/08/2018)	Proses Ibh Ianjut
17	3	Laporan Rapat Pembahasan Rperpres mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	M_626 (29/08/2018)	Respon Seskab	noted - setuju
18	1	Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (Rperpres Hak Keuangan KNKS)	M 644 (03/09/2018)	M-992 (04/09/2018)	Proses lbh lanjut
19	2	Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang yang tidak Melakukan Pendaftaran Gedung	M.661 (06/09/2018)	Respon Seskab	Monitor Tindaklanjutnya
20	1,0	Kpd: Menteri PPN/Ka, Bappenas, Perihal: Distribusi Lampiran Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2018	M,663 (10/09/2018)	B 441/Seskab/Ek on/9/2018 (14 Sept 2018)	Proses Ibh lanjut
21	1	Permohonan Paraf Persetujuan alas rancangan keputusan presiden tentang hari indonesia menabung	M_702 (24/09/2018)	B- 463/Seskab/Ekon/ 09/2018 tanggal 25 Sept 2018	Proses lebih lanjut
22	2	Rancangan Instruksi Presiden Tentang Aksi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2018-2019	M,704 (24/09/2018)	Respon Seskab	Proses Ibh lanjut
23	1	Pengajuan Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria kepada Presiden	M 708 (25/09/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - Arsip
24	1	permohonan persetujuan penyusunan RPP tentang perubahan kedua PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi (RPP Bunga Obligasi)	M,709 (26/09/2018)	Berkas belum turun dari Seskab	7.
25	3	Penyampaian Hasil Review Rperpres tentang Rencana Tala Ruang Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (RTR KSN Jantung Kalimantan)	M_713 (27/09/2018)	Respon Seskab	Proses lbh lanjut
ІКК З		an Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, u Pertemuan	55	55	
2.1			55	55	

= 0

No	Asdep	Perihal	Ju	mlah	Disposisi	
110	Ловор	Permai	Output	Outcome	Seskab	
1	2	3	4	5	6	
1	1	Permohonan Pertemuan Chief Executive Officer (CEO) International Finance Corporation (IFC) dengan Presiden pada tanggal 31 Juli 2018 dan Permohonan Pertemuan IFC'S Country Manager dengan Sekretaris Kabinet pada tanggal 6 Juli 2018	M-453 (02/07/2018)	M-695 (02/07/2018)	Proses lbh lanj	
2	1	Permohonan Membuka Roundtable High Level Discussion "Indonesia: Pusat Ekonomi Islam Dunia" di Bappenas, pada tanggal 25 Juli 2018	M_455 (03/07/2018)	M-700 (03/07/2018)	Proses lbh lanj	
3	1	Permohonan Membuka Acara Indonesia Development Forum M,456 2018 (03/07/2018)		M-701 (03/07/2018)	Proses Ibh Ianj	
4	1	Penyampaian Bahan Pertemuan Sekretaris Kabinet dengan International Finance Corporation (IFC) Country Manager for Indonesia, Malaysia, and Timor Leste pada Tanggal 6 Juli 2018	M 462 (04/07/2018)	Respon Seskab	Buatkan sura memo kpd Bap Presiden utk	
5	1	Permohonan Waktu Rapat Terbatas mengenai Laporan		M-735 (06/07/2018)	Proses (bh lan)	
6	1	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas (Ratas) Mengenai : 1,		M-745 (09/07/2018)	Rapat sdh berlangsung	
7	1	Permohonan Kepada Wakil Presiden untuk Membuka Acara Indonesia Development Forum 2018	M,469 (09/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lar	
8	2	Permohonan Kehadiran Presiden pada Hari Koperasi Nasional ke-71 tanggal 12 Juli 2018	M 474 (10/07/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklaniutny	
9	Penyampaian Bahan Pertemuan Presiden dengan Chief  Executive Officer (CEO) International Finance Composition (IEC)  M.48		M_481 (11/07/2018)	M-777 (13/07/2018	Proses Ibh lanj	
10	1	Permohonan Membuka dan Memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian inflasi 2018	M 484 (11/07/2018)	M-771 (13/07/2018)	Proses Ibh Ianj	
11	1	Permohonan Waktu Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 16 dan 17 Juli 2018 mengenai Pagu Anggaran RAPBN 2019	M 497 (11/07/2018)	M-779 (13/07/2018)	Proses lbh fanj	
12	1	Permohonan kepada Wakil Presiden untuk Membuka Acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intem Pemerintah 2018	M_515 (13/07/2018)	Respon Seskab	Proses lbh lan	
13	3	Penyampaian Briefing Sheet Pertemuan Sekretaris Kabinet dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 16 Juli 2018	M <sub>*</sub> 516 (16/07/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - Arsip	
14	1	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripuma Mengenai RAPBN Tahun Anggaran 2019	M 521 (17/07/2018)	M-802 (18/07/2018)	Proses Ibh Ianj	
15	4	Penyampaian Bahan Ratas mengenai Percepatan Pelaksanaan Mandatory Biodiesel, Kantor Presiden, Jumat 20 Juli Pukul 10,00 WIB	M 527 (19/07/2018)	M-813 (20/07/2018)	Proses Ibh lanj	
16	1	Permohonan Kepada Wakil Presiden untuk membuka Roundtable High Level Discussion "Indonesia: Pusat Ekonomi Islam Dunia" di Bappenas, pada tanggal 25 Juli 2018	M 532 (23/07/2018)	Respon Seskab	proses lebih lar	
17	1	Penyampaian Bahan Butir Wicara Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018	M.541 (25/07/2018)	M-829 (25/07/2018)	proses lebih lan	
18	4	Penyampaian Bahan Rapat Internal Presiden dengan Beberapa Menteri, pada tanggal 27 Juli 2018	M 551 (27/07/2018)	M-840 (27/07/2018)	Rapat sdh berlangsung	
19	4	Permohonan Kehadiran Presiden RI pada International Conference on Biodiversity Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) (Manokwasn, 7-10 Oktober 2018)	M.554 (27/07/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutny	
20	1	Penyampaian Bahan Ratas Mengenai Penguatan Cadangan Devisa dengan Instrumen Biodiesel/Palm Oil dan Batubara	M,556 (30/07/2018)	Respon Seskab	Ratas lelah berlangsung	
21	4	Permohonan Agenda Presiden Peringalan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2018 (10 Agustus 2018 di Kota	M 559 (31/07/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutny	
22	3	Penyampaian Bahan Wicara Peresmian Pembukaan Pameran Otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GfIAS) Ke-26 Tahun 2018 dan Peluncuran Alat Mekanis Multiguna (01/08/2018) (02/08/2018)			Arsip. Acara so	
23	1	Pedesaan (AMMDES), tanggal 2 Agustus 2018 di Tangerang Permohonan Waktu Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 8 Agustus 2018 Mengenai Nota Keuangan dan RAPBN TA 2019	M,567 (01/08/2018)	M-860 (03/08/2018)	Proses Ibh Iani	
24	4	Penyampaian Bahan Rapat Internal Presiden dengan Menteri Perlanian terkali Kenalkan Harga Beras	M_574 (03/08/2018)	(02/08/2018) M-871 (03/08/2018)	Proses Ibh Ianj	
25		laporan per bulan kemajuan penggunaan B20	M 575 (03/08/2018)	Respon Seskab	Tindaklanjuti	
26	2	Paparan Sekretaris Kabinet dalam Simposium-Orkes tra BPJS Ketenagakerjaan , tanggal 8 Agustus 2018 di Djakarta Theater	M 576 (03/08/2018)	Respon Seskab	Tidak bisa had	
27	1	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripuma mengenai Nota	M 578	M-888		

No	Asdep	Perihal	J	umlah	Disposisi
	TE I			Outcome	Seskab
1	2	3	4	5	6
28	3	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Direktur Utama PT, Astra dengan Sekretaris Kabinet, pada tanggal 8 Agustus 2018	(08/08/2018)	Respon Seskat (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	) Assis
29	1	Permohonan Audiensi President & CEO US-ASEAN Business Council kepada Sekretaris Kabinet	M.583 (10/08/2018)	Respon Seskab	Setuju
30	2	Permohonan Fasilitasi Audiensi Kepada Presiden	M:589 (13/08/2018)	Respon Seskab	Tdk Usah dibuatkan Surat
31	1	Penyampalan Bahan Ratas Mengerial Lanjutan Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa	M 590 (13/08/2018)	M-909 (14/08/2018)	Proses Ibh lanju
32	1	Permohonan Audiensi UN Swissindo kepada Presiden	M 596 (16/08/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	T Marie Co.
33	4	Usulan Rencana Kunjungan Kerja Hutan Sosial	M 602 (20/08/2018)	M-927 (20/08/2018)	Proses Ibh lanjul
34	4	Permohonan Agenda Presiden Peringatan HariKonservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2018	M.604 (21/08/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjutnya
35	3	Permohonan Kesediaan Presiden untuk membuka Konstruksi Indonesia 2018	M.615 (27/08/2018)	M-967 (29/08/2018)	Proses Ibh lanjut
36	4	Permohonan Courtesy Call Presiden dengan Menteri Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo dan republik Peru beserta Direktur Eksekutif United Nation Environment Programme (UNEP) 16 s.d 21 September 2018	M 618 (28/08/2018)	M-962 (29/08/2018)	Proses lbh lanjut
37	4	laporan Hasil Rakor Tindaklanjut Arahan Presiden terkait Laporan Per Bulan Kemajuan Penggunaan B20	M,620 (28/08/2018)	M-963 (29/08/2018)	Proses Ibh lanjut
38	1	Briefing Sheet Pertemuan Presiden dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	M.634 (30/08/2018)	Respon Seskab (Terdapal rekomendasi di	Arsip
39	1	Usulan Mengenai Pertemuan dengan Alibaba Group	M.641 (31/08/2018)	M-985	Proses Ibh Ianjut
40	4	Permohonan Kehadiran Presiden dalam Pembukaan Global Land Forum tanggal 24 September 2018 di Gedung Merdeka, Bandung	M 660 (06/09/2018)	(01/09/2018) M-1022 (07/09/2018)	Proses Ibh Ianjut
41	2	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Persiapan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Korea Selatan dan Vietnam	M 662 (06/09/2018)	M-1020 (07/09/2018)	Rapat sdh berlangsung
42	3	Permohonan untuk Menghadiri Synchronize Fest 2018	M 664 (10/09/2018)	M-1046 (13/09/2018)	Proses Ibh lanjut
43		Undangan Kegiatan Wirausaha Mandiri (WMM) Award 2018	M 668 (10/09/2018)	Respon Seskab (Terdapal rekomendasi di dalam memo)	Tidak hadir
44		Permohonan Audiensi Chief Technology Officer Amazon Web Services	M.679 (13/09/2018)	M-1056 (13/09/2018)	Proses Ibh Ianjut
45	4	Panen Raya Padi Rawa dalam Rangkalan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 Tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan	M,683 (13/09/2018)	M-1044 (13/09/2018)	Proses Ibh lanjut
46	4	Permohonan Kehadiran Sekretaris Kabinet untuk Menghadiri Acara Penanaman Pohon (22 September 2018) dan Pesta Makan Malam (21 September 2018) di Jakarta	M 686 (14/09/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	tidak bisa hadir -> ada acara dengan Presiden
47	- 1	permohonan kehadiran presiden untuk menghadiri acara peresmian ekspor perdana new erliga dan NEX II Ceremony	M.690 (18/09/2018)	M-1069 (18/09/2018)	Proses lbh lanjut
48	2	Penyampaian Bahan Briefing Sheet Audiensi Pertemuan Presiden dengan Tim Amazon	M.694 (19/09/2018)	M-1077 (20/09/2018)	Proses Ibh lanjut
49	1 0	Undangan Presiden Dalam Rangka Wisuda Akbar PKN STAN dan Permohonan untuk Menyampaikan Orasi Ilmiah tanggal 18 Oktober 2018 di Gedung Auditorium ICE BSD	a Wisuda Akbar PKN STAN Bikan Orasi Ilmiah tanggal 18 M.696 M-10		Proses lbh lanjut
50	1 F	Permohonan Audiensi Managing Director IMF kepada Presiden	M.697 (20/09/2018)	M-1082 (21/09/2018)	Proses Ibh lanjut
51	1 5	Permohonan Audiensi Co-Chair Bill & Melinda Gates Foundation Kepada Presiden	M.700 (21/09/2018)	M-1086 (21/09/2018)	Proses Ibh lanjut
52	3 5	orlefing note kunjungan presiden dalam rangka penyampaian ertifikat tanah untuk rakyat di stadion pakansari, kabupaten 1990r, provinsi jawa barat, 25 september 2018	M.705 (25/09/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Arsip
53	4 (	ermohonan Kehadiran Presiden RI pada International conference on Biodiversity Ecotourism and Creative Economy CBE) Manokwari 7-10 Oktober 2018	M.706 (25/09/2018)	Respon Seskab	Monitor tindaklanjulnya

No /	Asdep	Asdep Perihal	Jun	Disposisi	
			Output	Outcome	Seskab
1	2	3	4	E	-
54	1	Usufan Membuka dan MenPembicara Kunci pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Internasional Bloomberg pada tanggal 11 Oktober 2018	M 707 (25/09/2018)	M-1093 (25/09/2018)	Proses Ibh Ianju
55	2	permohonan audiensi president & ceo sojitz group	M.714 (27/09/2018)	M-1101 (28/09/2018)	Proses Ibh Ianju

#### RINCIAN CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER 2018)

	-1.0		Jun	nlah	
No	Asdep			Outcome (Nomor Seskab)	Disposisi Seskab
1	2	3	4	5	6
lumlah i	Ceseluruha	n (IKK 1 + IKK2 + IKK 3)	191	176	MAN ME IT
LIKK 1	dasi Kebija	akan (Tusi 1, 2, 3, & 6)	124	111	
A.1	Pelaksana	an Tusi 1	15	15	TO SERVED IN IT
1	Ekon 1	Laporan rapat pembahasan langgapan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang konsultan pajak (RUU KP)	M 738 (08/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
2	Ekon 3	Catatan atas permasalahan kehutanan terhadap rancangan undang-undang perlanahan	M_747 (15/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Setuju> dirataskan
3	Ekon 4	Rekomendasi Revitalisasi Daerah Alirn Sungai dan Reforestasi dalam rangka ketahanan air, Pangan dan Energi	M_768 (19/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut
4	Ekon 2	Hasil Rapat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga kerja Asing	M_780 (22/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	proses lebih lanjut
5	Ekon 4	analisa hukum atas wacana kebijakan penundaan pengutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya	M_782 (23/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Arsip
6	Ekon 1	Permohonan Waktu Ratas tentang Dana Desa dan Dana	M 785 (24/10/2018)	M-1215 (25/10/2018)	Proses Ibh lanjut
7	Ekon 1	Relurahan Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan	M 789 (26/10/2018)	M-1232 (26/10/2018)	Proses Ibh lanjut
8	Ekon 4	Analisa Hukum atas Usulan Kebijakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Hibah) Kepada Petani dalam Rangka Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Forum 14th Indoneia Palm Oil Conference	M_791 (26/10/2018)	M-1233 (26/10/2018)	Proses Ibh lanjut
9	Ekon 4	Pengolahan air limbah mesjid istiqlal menjadi air bersih	M 842 (26/11/2018)	M-1351 (27/11/2018)	Proses Ibh lanjut
10	Ekon 3	Percepatan Penetapan Rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air	M 875 (11/12/2018)	Respon Seskab (Terdapal rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjul
11	Ekon 1	Permohonan Peluncuran visi indonesia 2045 dan laporan kegiatan sosialisasi serla diskusi visi indonesia 2045	M.886 (14/12/2018)	M-1421 (17/12/2018)	Proses Ibh lanjut
12	Ekon 1	Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	M_896 (19/12/2018)	(Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
13	Ekon 2	Masukan US-ASEAN Business Council terhadap Rancangan Peraluran Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	900 (2018) 20/12/2018	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
14	Ekon 2	laporan rapat terkait pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecili	M 907 (21/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
15	Ekon 1	laporan hasil rapat koordinasui terbatas tingkat menteri tentang penetapan plafon kredit usaha rakyat (kur) 2019 dan kur pensiun serta kur peternak, kur petani garam, dan kur nelayan	M 930 (31/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted -Arsip
A.2	Pelaksana	aan Tusi 2	40	34	0,185
1	Ekon 2	Penyampaian Surat Permohonan Audiensi President dan CEO Sojitz Group	M,725 (02/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
2	Ekon 4	Masukan Dewan Ketahanan Nasional tentang Percepatan Mengembalikan Kejayaan Rempah-Rempah Nusantara untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional	M.727 (02/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh Ianjut

			Jum	lah	
No	Asdep			Outcome (Nomor Seskab)	Disposisi Seska
1	2	3	4	5	6
3	Ekon 1	Penyampaian Undangan Kepada Presiden untuk Menghadiri new economy forum high-level seminar "the bali fintech agenda"	M,729 (03/10/2018)	M-1129 (03/10/2018)	Proses lbh lanjut
4	Ekon 1	Usulan Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan Pemangku Kepentingan "Tri Hita Karana Sustainable Development Forum on Blended Financing and Innovation"  (08/10/2018)		Proses lbh lanjut	
5	Ekon 2	Laporan Pertemuan Women Ministerial Meeting di Montreal 21- 22 September 2018	M,736 (05/10/2018)		
6	Ekon 1	Ekon 1 surat petisi nasabah taiwan kepada pt millenium penata futures (08/10/2018) Respon Seskat (Terdapat (08/10/2018) rekomendasi di dalam memo)		Proses Ibh lanjut	
7	Ekon 3	Masukan Asosiasi Pengusaha Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang teritang Sumber Daya Air	M <sub>1</sub> 741 (09/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
8	Ekon 1	permohonan testimoni untuk ulang tahun bank mandiri	M 744 (10/10/2018)	Respon Seskab (Terdapal rekomendasi di dalam memo)	Ok alur waklunya
9	Ekon 4	Undangan Pencalonan Anggota Delegasi RI (DELRI) dan Sekretariat Kabinet pada COP-24 di Katowice, Polandia, 2-14 desember 2018	M.746 (15/10/2018)	02	
10	Ekon 4	Laporan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan	M <sub>1</sub> 753 (16/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut
11	Ekon 1	Laporan Pelaksanaan Tugas dan wewenang Bank Indonesia Triwulan II Tahun 2018	M,760 (17/10/2018)	M-1191 (18/10/2018)	Proses lbh lanjut
12	Ekon 3	Laporan Permohonan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dalam rangka Proyek Strategis Nasional Pendaflaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	M 765 (19/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
13	Ekon 2	Laporan Rapat Menindaklanjuti Pembangunan Pasar Aksara di Kota Medan	M_766 (19/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor Perkembangannya
14	Ekon 4	Penyampaian Bahan Pertemuan Seskab dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	M_769 (19/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Arsip
15	Ekon 1	laporan hasil kerangka pertemuan tingkat menteri pemerintah Indonesia-Malay sia-Thailand growth Triangle (IMT-GT) Ke-24 pada tanggal 30 september s.d 1 oktober 2018 di melaka, malaysia	M.773 (22/10/2018)	M-1203 (23/10/2018)	Proses Ibh Ianjut
16	Ekon 3	Penyampaian Data Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non- Proyek Strategis Nasional (Non-PSN) Provinsi Gorontalo	M.774 (22/10/2018) Respon Seskab (Tidak terdapat rekomendasi di dalam memo)		arsip
17	Ekon 2	Kekhawatiran atas Pengaturan TRIPS-Plus dalam Perundingan Perjanjian Kerjasama Ekonomi (CEPA) Indonesia-SFTA	M_784 (24/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	proses lebih lanju
18	Ekon 1	Penyampaian Permohonan untuk Menjadi Keynote Speech pada The 16th Asia-Pacific Conference of German Business (APK) 2018	M,792 (26/10/2018)	M-1234 (26/10/2018)	Proses lbh lanjut
19	Ekon 1	laporan hasil kegiatan menghadiri IMF-World Bank Group Annual Meeting (imf-wbg am) tahun 2018 di bali	M_797 (31/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
20	Ekon 3	permohonan kesediaan pencanangan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) dan peresmian beberapa proyek infrastruktur di provinsi gorontalo	M.800 (31/10/2018)	M-1270 (01/11/2018)	Proses lbh lanjut
21	Ekon 1	Penyampaian Laporan Ease of Doing Business (EODB) untuk Indonesia	M.812 (08/11/2018)	M-1296 (08/11/2018)	Proses lbh lanjut
22	Ekon 4	permohonan larangan perdagangan daging anjing ilegal	M.817 (09/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut

1	A STATE	- An in the state of the state	Jumlah			
No	Asdep		Output (Nomor Deputi)	Outcome (Nomor Seskab)	Disposisi Seska	
1	2	3	4	5	6	
24	Deputi	Penerusan Undangan Rapat Pembahasan RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua	M.824 (14/11/2018)	ve siliti		
25	Ekon 4	Permohonan Dukungan dan Parlisipasi dari Yun Energy Global Adolescents Science & Technology Innovation terhadap Perlindungan Lingkungan	M 833 (22/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjut	
26	Ekon 3	Permohonan Usulan Pembangunan Jalan dan Jembatan Gantung di Kabupaten Kediri	M 834 (22/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjut	
27	Ekon 3	Permohonan Membuka Acara Simposium Nasional "Paradigma Pembangunan Konstruksi dalam berbagai Perspektif terhadap ancaman bencana alam"	M 835 (22/11/2018)	M-1346 (26/11/2018)	Proses Ibh lanjut	
28	Ekon 4	Permohonan Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik Lahan Masyarakat Koperasi Banguna Tani Sejahtera	M_837 (23/11/2018)	(Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjul	
29	Ekon 4	Permohonan untuk Membantu Melestarikan Spesies Gajah Sumatera di Taman Wisata Alam Seblat	M 838 (23/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjut	
30	Ekon 3	Permohonan Pembangunan Waduk dan Embungdi Kabupaten Banyuwangi	M_839 (23/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjut	
31	Ekon 3	Penerusan surat sekretaris daerah kota kediri mengenai perkembangan pembangunan jembatan brawijaya	M 843 (26/11/2018)			
32	Ekon 2	Penolakan terhadap rancangan perubahan peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern	M.846 (28/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjut	
33	Ekon 4	rekomendasi menteri LHK mengenai pembangunan PLTA Batang Toru dan langkah-langkah konservasi terhadap orangutan di provinsi sumatera utara	M 848 (29/11/2018)			
34	Ekon 1	Undangan Menghadiri kegiatan project 2045 dan perayaan ke- 10 Tahun Berdirinya economic research Institute for ASEAN and east Asia (ERIA) pada tanggal 8-9 desember 2018	M.851 (29/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Ting diingalkan	
35	Ekon 1	Kegiatan Project 2045 dan Perayaan ke-10 Tahun Berdirinya Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)	M.862 (05/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjut	
36	Ekon 2	Permohonan pembangunan pasar anyar kota tangerang	877 (2018) 11/12/2018	M-1410 (12/12/2018)	Proses lebih lanjut	
37	Ekon 4	Laporan Hasil Menghadiri Pertemuan COP-24/CMP-14/C MA1,3/SBI-49/SB STA-49/APA-1,7 United Nations Framework Convetion On Climate Change di Katowice, Polandia 3 s.d 9 Desember 2018	M_898 (19/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	tindaklanjuti	
38	Ekon 4	Penyampaian Usulan untuk Mengurangi Deforestasi di indonesia untuk produksi minyak sawit	M_919 (26/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut	
39	Ekon 4	Antisipasi Dampak Dari Investasi Perkebunan Karet PT. Kartika Jemaja Jaya di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas	M.928 (28/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya	
40	Ekon 2	masukan kadin batam tentang kebijakan terkaitan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di kota batam	M,929 (31/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut	
A.3	Pelaksana	an Tusi 3	52	47		
1	Ekon 2	Permohonan audiensi karyawan PT_ Jasa Armada indonesia kepada sekretaris kabinet	M,721 (01/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - Setuju	

	- 112		Jui	mlah	Description in
No	Asdep	Perihal Perihal	Output Outcome Disposis (Nomor (Nomor Deputi) Seskab)	Disposisi Seskat	
1	2	3	4	5	6
2	Ekon 1	Laporan Menghadiri US-Indonesia Investment Summit 2018	M_726 (02/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
3	Ekon 2	Laporan Hasil Pertemuan Sherpa G20 ke-3 di Mendoza, Argentina	M.733 (04/10/2018)	Respon Seskab (Terdapal rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut
4	Ekon 1	Laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Triwulan II 2018	M,742 (09/10/2018)	M-1155 (10/10/2018)	Proses lbh lanjut
5	Ekon 4	Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang Terintegrasi tahun 2016	M_754 (16/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor Tindaklanjutnya
6	Ekon 2	Laporan dan rekomendasi utusan khusus presiden untuk kerja sama timur tengah dan negara anggota organisasi kerja sama islam terkait upaya peningkatan ekspor produk olahan kayu ke negara-negara timur tengah dan anggota organisasi kerja sama islam	M.756 (16/10/2018)	M-1186 (17/10/2018)	Proses Ibh lanjut
7	Ekon 1	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubemur Bank Indonesia pada 26-27 September 2018	M 757 (17/10/2018)	M-1188 (17/10/2018)	Proses Ibh lanjut
8	Ekon 3	perbaikan jalan nasional lae ikan-sukarame kabupaten papak bharat, sumatera utara	M <sub>1</sub> 758 (17/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjul
9	Ekon 3	Laporan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Semester I Tahun 2018	M.767 (19/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
10	Ekon 1	Penyampaian Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflas i September 2018	M.775 (22/10/2018)	M-1204 (23/10/2018)	proses lebih lanjut
11	Ekon 2	laporan dan rekomendasi utusan khusus presiden untuk kerja sama limur tengah dan nengara anggota organisasi kerja sama Islam terkait upaya meningkatkan ekspor indonesia ke arab saudi, meningkatkan investasi, dan meningkatkan jumlah wisatawan dari arab saudi	M_776 (22/10/2018)	M-1207 (23/10/2018)	proses lebih lanjut
12	Ekon 2	saran penyelesaian masalah impor beras	M,786 (25/10/2018)	M-1216 (25/10/2018)	proses lebih lanjut
13	Ekon 3	Penyampaian Laporan Pengadaan Tanah Melalui LMAN	M <sub>1</sub> 787 (25/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	proses lebih lanjut
14	Ekon 2	Undangan Peringatan Hari Sumpah Pernuda ke-90 Tahun 2018	M,793 (26/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Presiden hadir
15	Ekon 2	Penantanganan Pernyataan bersama dan Pengaturan teknis antara pemerintah indonesia dengan pemerintah arab saudi tenta ng pilot project sistem penempatan satu kanal (SPSK) penempatan pekerja migran indonesia sektor domestik di arab saudi	M_794 (29/10/2018)		
16	Ekon 3	Laporan Kendala Pengurusan Sertifikat Tanah di Deli Serdang, Sumatera Utara	M <sub>-</sub> 795 (30/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjul
17	Ekon 2	Permohonan Izin untuk Menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Kemajuan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	M.801 (01/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Setuju
18	Ekon 1	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22-23 Oktober 2018	M,804 (05/11/2018)	M-1280 (05/11/2018)	proses lebih lanjut
19	Ekon 2	Laporan BPJS Ketenagakerjaan Triwulan III Tahun 2018	M.806 (05/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - Arsip
20	Ekon 3	Penyampaian Buku OPUS (Creative Economy Outlook) 2019	M,809 (07/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
21	Ekon 1	laporan realisasi penanaman modal periode triwulan III Tahun 2018, dan Kumulatif Bulan Januari-Septemb er Tahun 2018	M.816 (09/11/2018)	M-1304 (12/11/2018)	Proses lbh lanjul
22	Ekon 1	Laporan APEC Finance Ministers Meeting (FMM) 2018, 15-17 Oktober 2018 di Port Moresby, Papua Nugini	M 818	M-1318	Proses lbh lanjut

	18		Ju	mlah	
No	Asdep	Perihal	Output (Nomor Deputi)	Outcome (Nomor Seskab)	Disposisi Seskat
1	2	3	4	5	6
23	Ekon 2	Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap program revitalisasi pasar sukamanah	M_822 (14/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
24	Ekon 1	Penyampaian Perkembangan Indeks Harga Konsumen Oktober 2018	M.825 (14/11/2018)	M-1322 (15/11/2018)	Proses Ibh lanjut
25	Ekon 4	Laporan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan s.d 18 Oktober 2018	M.826 (14/11/2018)	M-1326 (15/11/2018)	Proses Ibh lanjut
26	Ekon 1	Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2018	M 828 (14/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut
27	Ekon 1	penyampaian laporan hasil rangkaian sidang tahunan imf-wbg tahun 2018 di bali tanggal 7-14 oktober 2018	M 831 (19/11/2018)	M-1340 (21/11/2018)	Proses Ibh lanjut
28	Ekon 1	Laporan Kegialan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2017	M 836 (23/11/2018)	M-1356 (27/11/2018)	Proses lbh lanjut
29	Ekon 4	Permohonan Dukungan Status Federasi Himpunan Petani Pemakai Air Kabupaten Banyuwangi	M,844 (26/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjut
30	Ekon 4	Permohonan Penyelesaian Persoalan Tanah dalam Kawasan Hulan di Kabupaten Banyuwangi, provinsi Jawa Timur	M_845 (27/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjut
31	Ekon 1	Laporan Evaluasi Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) di Daerah	M <sub>-</sub> 850 (29/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjut
32	Ekon 4	Lapore Kegiatan Intergovernment al Review Meeting 4th, On The Implementation of The Global Programme of Actio for the Protection of The Marine Environment From Land-Based Activities di Bali 31 Okt 1 Nov 2018	M.852 (29/11/2018)	M-1377 (03/12/2018)	Proses (bh lanjut
33	Ekon 4	Penyampalan Laporan Badan Restorasi Gambut s.d Bulan September; Mengikuti World Economic Forume Sustainable Development (mpact Summit 2018 (24-25 September 2018 di New York, AS)	M.853 (30/11/2018)	M-1372 (03/12/2018)	Proses lbh lanjut
34	Ekon 3	Permohonan berpartisipasi dalam proyek infrastruktur di indonesia	M <sub>8</sub> 867 (06/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut
35	Ekon 1	Evaluasi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018	M.868 (07/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut
36	Ekon 1	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14-15 November 2018	871 (2018) 10/12/2018	M-1408 (10/12/2018)	Proses Ibh lanjut
37	Ekon 3	Hasil Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasiona Triwulan III Tahun 2018	M.872 (10/12/2018)	M-1407 (10/12/2018)	Proses lbh lanjut
38	Ekon 4	Permohonan Peninjauan Kembali Pengutan ekspor (Levy) CPO	981.(2018) 13/12/2018 Respon Seskab (Tidak terdapat rekomendasi di dalam memo)		Noted Arsip
39	Ekon 1	Penyampaian Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Lepata Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Singapura pada tanggal 17 s.d 18 Mei 2018	M.889 (17/12/2018)	M-1417 (17/12/2018)	Proses lbh lanjut
10	Ekon 2	Laporan Pelanggaran Peraturan Perundang-undan gan di bidang ketenagakerjaan oleh PT Surya saga utama (Blankspace resource group)	M 892 (17/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
1	Ekon 1	Laporan Kunjungan Kerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ke Arab Saudi dan Republik Rakyat Tipngkok (RRT)	M.897 (19/12/2018)	M-1424 (21/12/2018)	Proses lbh lanjut
2	Ekon 1	Laporan Rapat Pembahasan Naskah Akademik dan Draf Regulasi NSPK Penyusunan (dikatr Pembangunan Nasional Seria Capaian Tahun ke-4 RPJMN 2015-2019	M.905 (21/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
3		Laporan Menteri LHK mengenai Proses Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Sertifikasi Tanah dari Alokasi Kehutanan	M.908 (21/12/2018)	M-1439 (21/12/2018)	Proses lbh lanjut
4	Ekon 4	Penyampaian Laporan Badan Restorasi Gambut (BRG) s.d bulan ektober 2018	M.909 (21/12/2018)	M-1438 (21/12/2018)	Proses Ibh lanjut

 $\supset$ 

Ma	1		-	mlah	
No	Asdep	Perihal	Output (Nomor Deputi)	Outcome (Nomor Seskab)	Disposisi Seskal
1	2	3	4	5	6
45	Ekon 4	Laporan SDGs Annual Conference 2018 (Hotel Fairmont, jakarta, 17 s.d 18 desember 2018	M_910 (21/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monilor tindaklanjutnya
46	Ekon 4	Permohonan Keadilan Dari Sdri, Kristantiningsi h atas penyewaan tanah kosong milik perum bulog	M,911 (21/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh Ianjut
47	Ekon 4	Penyampaian Kendala Teknis SITAP yang merupakan hasil rapat koordinasi mengenai progres implementasi mandatory b20 dan pengungahan ke dalam sitap dengan kementerian koordinator bidang perekonomian	M.913 (21/12/2018)		
48	Ekon 1	Penyampaian Permasalahan pemenuhan komitmen perizinan yang diproses melalui sistem online single submission/oss	M <sub>.</sub> 914 (21/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
49	Ekon 1	Laporan menghadiri world investment forum (WIF) 2018 "investing in sustainable development"	M 916 (21/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut
50	Ekon 3	Laporan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Katalog Elektronik	M_918 (26/12/2018)		
51	Ekon 4	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Putrajaya, malaysia	M.920 (26/12/2018) Respon Seskab (Tidak terdapat rekomendasi di dalam memo)		Noted - Arsip
52	Ekon 2	Antisipasi dan Solusi Migrasi Perdagangan Konvensional ke E- Commerce dalam Rangka Menguatkan Ekonomi Berbasis Digital	M.925 (28/12/2018)	M-1455 (31/12/2018)	Proses Ibh lanjul
A.4	Pelaksana	an Tusl 6	17	15	
1	Ekon 1	Penyampaian Rekomendasi Himpunan Mahasiswa islam mengenai pelemahan nilai tukar rupiah	M:737 (05/10/2018)	M-1141 (10/10/2018)	Proses lbh lanjut
2	Ekon 3	Permohonan Ahli Waris Syahbudin (Rifan Syahbudin) terkait Konsoliasi/Gant i Kerugian Atas Peralihan Hak Warisan Kepada Penggarap	M_761 (05/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut
3	Ekon 1	Penyampaian Laporan Kunjungan Kerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ke Korea selatan, vietnam, dan singapura pada tanggal 9 s.d 16 september 2018	M,777 (22/10/2018)	M-1208 (23/10/2018)	proses lebih lanjut
4	Ekon 2	Saran Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap penunjukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebagai pelaksana ekspor rotan	M 796 (31/10/2018)		
5	Ekon 2	permohonan dukungan Indonesia international motor show (IIMS) surabya 2018	M.799 (31/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
6	Ekon 2	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan ke Swiss dan Spanyol	M.805 (05/11/2018) Respon Seskab (Tidak terdapat rekomendasi di dalam memo)		Noted Arsip
7	Ekon 2	Laboran Penyelenggaraan trade expo indonesia (TEI) ke-33 Tahun 2018	M.823 (14/11/2018)	M-1329 (15,/11/2018)	Proses Ibh lanjut
8	Ekon 4	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Partnering For Green Growth and The Gloal Goals 2030 (P4G) International Anti Corruption Conference dan Pertemuan Billateral dengan Pihak Denmark	M.854 (30/11/2018)	M-1373 (03/12/2018)	proses lebih lanjut
9	EKON 4	Rekornendasi Wantannas mengenai kebijakan penanganan dampak pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah aki bekas secara ilegal	M.895 (19/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses Ibh lanjut
10		Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan dalam rangka china international import expo 2018 di shanghai Upaya Peningkatan Investasi Indonesia-Arab Saudi melalui	M.865 (95/12/2018)	M-1390 (06/12/2018)	proses lebíh lanjut
11	EKON 1	opaya Ferangkaran Investasi Indonesia-Arab Saudi melalui kemitraan dengan negara-negara asia timur (china, jepang, dan korea selatan)	M.866 (06/12/2018)	M-1400 (10/12/2018)	proses lebih lanjut

			Jun	nlah	
No	Asdep	Perihal	Output (Nomor Deputi)	Outcome (Nomor Seskab)	Disposisi Seskat
1	2	3	4	5	6
12	Ekon 2	Laporan Pertemuan Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Menteri RCEP dalam rangkaian pertemuan KTT ASEAN KE-33 Di singapura	M <sub>2</sub> 888 (17/12/2018)	M-1416 (17/12/2018)	proses lebih lanjut
13	Ekon 2	Laporan Kunjungan Kerja dan Misi dagang menteri perdagangan ke aljazair	M 890 (17/12/2018)	M-1413 (17/12/2018)	proses lebih lanjul
14	Ekon 2	laporan kunjungan kerja utusan khusus presiden untuk timur tengah dan organisasi kerja sama islam ke jeddah	M_902 (21/12/2018)	M-1428 (21/12/2018)	proses lebih lanjut
15	Ekon 2	Laporan Kepala BKPM 30th APEC Ministerial Meeting di Papua Nugini	M 894 (19/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Pantau tindaklanjutnya
16	Ekon 1	Laporan Rapat Perbaikan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB)	M <sub>.</sub> 904 (21/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	proses lebih lanjut
17	Ekon 2	Laporan Hasil Rangkaian Pertemuan KTT G20 di Buenos Aires	M <sub>.</sub> 924 (27/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	tindaklanjuli
3. IKK 2	turan Peru	indang-undangan	12	12	
B.1	Pelaksana		12	12	
1	Ekon 4	Permohonan Paraf Persetujuan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement on The Establishment of The Asian Forest Cooperation Organization (Persetujuan tentang Pembukaan Organisasi Kerja Sama (Kehutanan Asia)	M.720 (01/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
2	Ekon 3	Permohonan Paraf Persetujuan Rperpres tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas	M <sub>1</sub> 731 (03/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses (bh lanjut
3	Ekon 4	Rperpres tentang Pengesahan Agreement on The Establishmen of the Asian Forest Cooperation Organization (AFOCO)/Persetu juan tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia	M.734 (05/10/2018)	M-1135 (05/10/2018)	Proses lbh lanjul
4	Ekon 2	Permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perindungan Pekerja Migran Indonesia	M_759 (17/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - dikawal sesuai arahan Presiden
5	Ekon 1	Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Mengenai Pengesahan Perjanjian Host Country Agreement on The Office of The Global Green Growth Institute In The Republic of Indonesia	M 827 (14/11/2018)	M-1324 (15/11/2018)	Proses lbh lanjut
6	Ekon 4	permohonan penetapan rancangan peraturan pemerintah tentang pulau karantina	M,830 (19/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
7	Ekon 3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas	M,873 (10/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
8	Ekon 2	Rancangan Instruksi Presiden tentang Aksi Nasional Perlindungan Konsumen	M,882 (13/12/2018)	M-1414 (17/12/2018)	Proses Ibh lanjut
9	Ekon 1	pemberian persetujuan subslansi atas permohonan penetapan peraturan presiden tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah pesemakmuran bahama untuk pertukaran informasi berkenaan dengan kepertuan perpajakan	M 915 (21/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
10	Ekon 1	Tanggapan terhadap rencana pembentukan induk (holding) badan usaha milik negara sektor infrastruktur dan sektor perumahan	M:917 (21/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut
11	Ekon 2	izin prakarsa penyusunan rpp tentang perubahan pp penyelenggaran KEK dan PP Fasilitas dan Kemudahan di KEK	M.926 (28/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
12	Ekon 2	pengharmonisasi an, pembulatan, dan pemantapan RPP tentang perubahan kedua atas pp nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam	M_927 (28/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya
C. IKK 3		ın Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, u Pertemuan	55	53	198
C.1	Pelaksana	aan Tusi 5	55	53	

			Jur	Jumlah		
No	Asdep	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	Output (Nomor Deputi)	Outcome (Nomor Seskab)	Disposisi Seskab	
1	2	3	4	5	6	
1	Ekon 2	Permohonan audiensi karnar dagang dan industri kepulauan itau (Kadin Kepri) kepada Sekretaris Kabinet	M 719 (01/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Setuju> Belum perlu diterima	
2	Ekon 1	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Perkembangan Persiapan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group Tahun 2018	M_722 (01/10/2018)	M-1120 (02/10/2018)	Proses Ibh lanjut	
3	Ekon 2	Permohonan Kehadiran Presiden pada Acara Perayaan Ekspor ke 1,5 Juta PT, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	M_724 (02/10/2018)	M-1119 (02/10/2018)	Proses Ibh lanjut	
4	Ekon 3	Permohonan Pembukaan Acara Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	M <sub>*</sub> 728 (02/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	noted, Arsip	
5	Ekon 1	Penyampaian Briefingsheet Penyerahan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester   Tahun 2018	M 732 (03/10/2018)	M-1130 (04/10/2018)	Proses lbh (anjut	
6	Ekon 1	Penyampaian Undangan AMCHAM Indonesia kepada sekretaris kabinet untuk menghadiri gala dineer us-indonesia private sector	M_740 (08/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	tidak hadir	
7	Ekon 1	Penyampaian Bahan untuk Presiden dalam menghadiri IMF- World Bank Group Annual Meetings 2018	M,743 (09/10/2018)	M-1150 (10/10/2018)	Proses Ibh lanjut	
В	Ekon 1	Briefingsheet audiensi Presiden dengan Islamic Development Bank (IDB) pada Tanggal 15 Oktober 2018	M,745 (15/10/2018)	M-1161 (15/10/2018)	Proses lbh lanjut	
9	Ekon 3	Permohonan Kehadiran dan Sambutan Pembukaan City Sanitation Summit XVIII di Jambi	M,748 (15/10/2018) M,750	M-1172 (15/10/2018) M-1170	Proses Ibh lanjut	
10	Ekon 4	Usulan Rencana Kunjungan Kerja Hutan Sosial	(15/10/2018) M_751	(15/10/2018) M-1173	Proses Ibh lanjut	
11	Ekon 3	Usulan Rapat terbatas untuk Membahas RUU Pertanahan Penyampaian Briefing sheet audiensi wakil sekretaris kabinet	(15/10/2018) M.764	(15/10/2018)	Proses Ibh lanjut	
12	Ekon 2	dengan wakil duta besar singapura	(19/10/2018)	Respon Seskab		
13	Ekon 2	Permohonan Membuka world conference on creative economy 2018 kepada presiden republik indonesia	M,770 (19/10/2018)	(Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor Tindaklanjutnya	
14	Ekon 2	Permohonan Kehadiran Presiden dalam peringatan hari buruh migran internasional di provinsi busa tenggara timur pada tanggal 18 desember 2018	M_771 (19/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor Tindaklanjutnya	
15	Ekon 3	Permohonan Pembukaan Acara Kontruksi Indonesia 2018 dan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi	M 772 (19/10/2018)	M-1199 (23/10/2018)	Proses lbh lanjul	
16	Ekon 3	penyampaian bahan rapat terbatas terntang permasalahan kehutanan dalam rancangan undang-undang pertanahan, tanggal 23 oktober 2018	M <sub>1</sub> 778 (22/10/2018)	M-1202 (23/10/2018)	Proses lbh lanjut	
17	Ekon 1	penyampaian bahan sekretaris kabinet dalam menerima perwakilan US-ASEAN Business council (US-ABC) pada Oktober 2018	M_779 (22/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	arsip	
18	Ekon 4	permohonan membuka acara 14th indonesia palm oil conference (IPOC) and 2019 price outlook oleh presiden (bali, 1-2 november 2018)	M_781 (22/10/2018)	M-1213 (24/10/2018)	proses lebih lanjut	
19	Ekon 2	Undangan untuk sharing di depan 1000 entrepreneurs dan calon entrepreneurs di indonesia entrepreneurs gathering 2018	M_783 (23/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor Tindaklanju(nya	
20	Ekon 4	Penyampaian Narasi Presiden dalam Pembukaan acara 14th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2019 Price Outlook	M.788 (25/10/2018)	M-1222 (26/10/2018)	Proses lbh lanjut	
21	Ekon 2	Permohonan Video Ucapan Selamat Ulang Tahun bagi Toyota Sienta Community Indonesia (TOSCA) dari Presiden	M.790 (26/10/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	noted	
22	Ekon 1,2,3,4	Penyampaian Bahan Rapat Intern Tanggal 31 Oktober 2018	M_798 (31/10/2018)	M-1244 (31/10/2018)	Proses Ibh lanjul	
23	Ekon 2	Evaluasi Kesiapan Beroperasi kawasan ekonomi khusus (KEK) dan Permohonan Kepada Presiden untuk Meresmikan KEK	M 802 (01/11/2018)	M-1273 (01/11/2018)	Proses Ibh lanjul	
24	Ekon 1	Bahan Ratas Kabinet tentang Cukai hasil tembakau dan dana desa dan dana kelurahan	M 803 (01/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	(sudah dilaksanakan	
25	Ekon 2	Permohonan Audiensi Badan Perlindungan Konsumen Nasional	M.807 (05/11/2018)	M-1286 (06/11/2018)	Proses Ibh lanjut	

			Jun			
No	Asdep	Perihal	Output (Nomor Deputl)	Outcome (Nomor Seskab)	Disposisi Seskab	
1	2	3	4	5	6	
26	Ekon 3	Penyampaian Bahan Rapat terbatas mengenai lanjutan pembahasan penyediaan rumah bagi asn, tni dan polri	M.808 (07/11/2018)	M-1290 (07/11/2018)	Proses Ibh lanjut	
27	Ekon 3	Permohonan Audiensi Kepada Presiden dalam rangka RAKERNAS dan HUT APERSI ke-20	M_810 (07/11/2018)	Respon Seskab (Terdapal rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya	
28	Ekon 3	Usulan Peresmian Proyek Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat	M.813 (08/11/2018)	M-1297 (08/11/2018)	Proses lbh lanjut	
29	Ekon 2	Permohonan Audiensi dengan Presiden (Zhong yang)	M 814 (08/11/2018)	M-1301 (12/11/2018)	Proses lbh lanjut	
30	Ekon 2	Audiensi Gubernur Kepulauan Riau Kepada Sekretaris Kabinet dalam Rangka Penyampaian Permohonan Kunjungan Presiden ke Provinsi Kepulauan Riau	M.815 (09/11/2018)	M-1300 (12/11/2018)	Proses lbh lanjut	
31	Ekon 2	Permohonan Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai dan Proyek Nasional Lainnya	M 820 (13/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya	
32	Ekon 1	Penyampaian Briefing sheet rapat terbatas (Ratas) mengenai kebijakan investasi dan perpajakan	M 832 (19/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Telah digunakan	
33	Ekon 3	Permohonan Peresmian Underpass Purwokerto dan Peninjauan Terowongan Notog	M.847 (29/11/2018)	M-1366 (29/11/2018)	Proses Ibh lanjut	
34	Ekon 2	permohonan audiensi amazon web services	M 849 (29/11/2018)	M-1378 (03/12/2018)	Proses (bh lanjut	
35	Ekon 3	permohonan kehadiran presiden untuk membuka kongres persatuan insinyur indonesia XXI dan dialog nasiona di padang, sumatera barat	M,855 (30/11/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	tidak dapat hadir, acara dgn Presiden	
36	Ekon 2	Penyampaian Bahan Briefingsheet Pelepasan Ekspor Motor Yamaha	857 (2018) 03/12/2018	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Arsip	
37	Ekon 3	Penyampaian Briefingnote terkait Penyerahan Sertifikat untuk Rakyat oleh Presiden di Taman Cakung, Tanggal 3 Desember 2018	858_(2018) 03/12/2018	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Arsip	
38	Ekon 3	Peluncuran Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional serta Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta	859_(2018) 04/12/2018	M-1381 (05/10/2018)	Proses lbh lanjut	
39	Ekon 1	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna tentang Capaian Tahun ke-4 RPJMN 2015-2019 dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lem baga	860 (2018) 04/12/2018	M-1384 (05/12/2018)	Proses lbh lanjut	
40	Ekon 3	Permohonan Audiensi Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia kepada Sekretaris Kabinet tentang Situasi dan Kondisi Industri Perkaretan Nasional	861.(2018) 05/12/2018	Respon Seskab (Terdapal rekomendasi di dalam memo)	Proses lebih lanjut	
41	Ekon 1	Butir Wicara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 oleh presiden ri di istana negara tanggal 11 desember 2018 pukul 11,00 WIB	869 (2018) 10/12/2018	M-1405 (10/12/2018)	Proses Ibh lanjut	
42	Ekon 3	Permohonan Membuka Acara Simposium Nasional "Paradigma Pembangunan Konstruksi dalam Berbagai Perspektif Terhadap Ancaman Bencana Alam	874.(2018) 11/12/2018	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses lbh lanjut	
43	Ekon 3	Penerusan Surat Gubernur Kalimantan selatan terkait dukungan acara ground breaking proyek strategis nasional kawasan industri jorong	M.876 (11/12/2018)			
44	Ekon 2	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam	M 878 (11/12/2018)	M-1411 (12/12/2018)	Proses lbh lanjut	
45	Ekon 2	Butir Wicara Peresmian Operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, pada tanggal 14 desember 2018	M.883 (13/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Arsip, Sdh berlangsung	
46	Ekon 4	Penyampaian Butir Wicara kunjungan kerja presiden ke taman hutan pinus kenali, provinsi jambi, minggu, 16 desember 2018	M 885 (14/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	sdh berlangsung. Arsip	
47	Ekon 2	Permohonan kehadiran presiden dalam peringatan hari buruh Internasional di sukabumi, provinsi jawa barat, tanggal 18 desember 2018	M 891 (17/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Arsip	
48	Ekon 2	Arahan Presiden pada Rapat Terbatas pengembangan Batam	M,893 (17/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Proses 1bh Ianjul	

E-12 (C-1)			Jui	- WE-		
No	Asdep	Perihal	Output (Nomor Deputi)	Outcome (Nomor Seskab)	Disposisi Seskab	
1	2	3	4	5	6	
49	Ekon 2	Permohonan Peresmian Pasar Tradisional Modern dan Peresmian Islamic Center kota padang panjang	M_899 (20/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Noted - Arsip	
50	Ekon 3 Permohonan Kesediaan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku		M.901 (20/12/2018)	M-1437 (21/12/2018)	Proses Ibh lanjut	
51	Ekon 4	Permohonan Agenda Presiden untuk Menghadiri Acara Ekon 4 Pemberian Penghargaan Tokoh Hutan Sosiai 2018 Pilihan Tempo (Kebun raya Bogor, 28 Desember 2018)		M-1430 (21/12/2018)	Proses Ibh lanjut	
52	Ekon 4	Laporan Hasil Rapat Koordinasi mengenai progres implementasi mandatory B20 dan Pengunggahan ke dalam SITAP	M 912 (21/12/2018)	Respon Seskab (Terdapat rekomendasi di dalam memo)	Monitor tindaklanjutnya	
53	Ekon 3	Permohonan Kesediaan Presiden untuk Penyerahan Langsung Sertifikat PTSL di Kota Batam	M,921 (27/12/2018)	M-1448 (28/12/2018)	Proses lbh lanjut	
54	Ekon 2 Permohonan Kehadiran Presiden untuk Kegiatan Hari Ulang Tahun Bukalapak ke-9 dan Peluncuran Mitra Bukalapak		922 (2018) (27/12/2018)	M-1449 (28/12/2018)	Proses lbh lanjut	
55	Ekon 4	Penyampaian Butir Wicara Menghadiri Acara Pemberian Penghargaan Tokoh Hutan Sosial 2018 Pilihan Tempo, Kebun Raya Bogor, 28 Desember 2018	M,923 M-1450 (27/12/2018) (28/12/2018)		Proses lbh lanjut	

## LAMPIRAN 3

Matriks Penyerapan Anggaran Periode Tahun 2018

69

Happiness is an inside job

69

WILLIAM ARTHUR WARD

## **REALISASI ANGGARAN**

Per Pengelola Kegiatan Per Periode s.d. 31 Desember 2018

Kementrian

: SEKRETARIAT KABINET

Unit Organisasi Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET : SEKRETARIAT KABINET

DIPA No. Tgl.

: DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2018 Tgl. 12 Desember 2017

Berdasarkan SPP Halaman: 1 dari 1

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Šisa Anggaran
04	JUMLAH REALISASI	4.140.000.000	2.484.000.000	1.305,643,560	1.172.901.750	2.478.545.310	99,78	5,454,690
04 040: 040: 040:	2 ASDEP BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN 3 ASDEP BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INDUSTRI	4.140.000.000 990.000.000 1.170.000.000 990.000.000	2.484.000.000 594.000.000 702.000.000 594.000.000	1.305.643.560 219.399.113 324.964.532 484.133.649	1.172.901.750 373.105.603 374.439.318 109.157(400	2.478.545.310 592.504.716 699.403.850 593.291.049	99,78 99,74 99,63 99,88	5.454.690 1.495.284 2.596.150 708.951
0404	ASDEP BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	990.000.000	594.000.000	277.146.266	316.199.429	593.345.695	99,88	654.305

### LAMPIRAN 4

69

Formulir Checklist Muatan Subtansi Laporan Kinerja

Choose a job you love and you will never have to work a day in your life

**CONFUCIUS** 

#### FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

NO		URAIAN	PERSON IN CHARGE	CATATAN	
1	KA	TA PENGANTAR	AKRB	Ada	
	IKF	ITISAR EKSEKUTIF	AKRB	Ada	
	a	1. Uraian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi /Unit Kerja	PA	Ada	
2		2. Capaian	AKRB & PA	Ada	
-		3. Kendala yang dihadapi	AKRB	Ada	
	ь	Uraian langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi adanya kendala pencapaian tujuan dan sasaran	AKRB	Ada	
		2. Mitigasi kendala pada tahun mendatang	AKRB	Ada	
3	DA	FTAR ISI	AKRB	Ada	
4	DAI	FTAR TABEL	AKRB	Ada	
5	DAI	FTAR GAMBAR	AKRB	Ada	
-[		BAB I PENDAHULUAN			
	а	Uraian penjelasan umum organisasi	AKRB	Ada	
6 [	b	Struktur organisasi	AKRB	Ada	
		Aspek strategis	AKRB	Ada	
_[	d	Permasalahan utama yang sedang dihadapi	AKRB	Ada	
		BAB II PERENCANAAN KINERJA			
Ī		Uraian secara ringkas dokumen :			
- 1		1. Renstra	PA	Ada	
- 1		2. Rencana Kerja (Renja) -	PA	Ada	
		3. Indikator Kinerja Utama	AKRB	Ada	
		4. Perjanjian Kinerja	AKRB	Ada	
		yang paling sedikit memuat tentang :		,,,,,	
	а		1) Uraian singkat sasaran organisasi pada tahun berjalan, serta keterkaitan dengan visi dan misi Sekretariat Kabinet;	AKRB	Ada
,		2) Uraian singkat renstra Satuan Kerja/Unit Organisasi, dimulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan sampai dengan program;	РА	Ada	
			3) Uraian rencana kerja utamanya menyangkut kegiatan untuk mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun berjalan, dan indikator keberhasilan pencapaiannya;	PA	Ada
		4) Uraian PK terkait target kinerja yang penting yang diperjanjikan;	AKRB	Ada	
		5) Uraian perbedaan antara target kinerja pada Renja dan PK (apabila ada).	AKRB	Ada	
	ь	Untuk komprehensivitas penyusunan substansi bab ini, Satuan Organisasi/ Unit Kerja dapat menggunakan bahan peraturan internal di bidang organisasi/tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet.	AKRB	Ada	

NO		URAIAN	PERSON IN CHARGE	CATATAN				
	Ī	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA						
	A CAPAIAN KINERIA  Uraian capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja dengan menganalisis capaian kinerja, meliputi:							
	1	Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun berjalan;	AKRB	Ada				
	2	Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu, atau tahun berjalan dengan beberapa tahun terakhir;	AKRB	Ada				
	3	Perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun berjalan terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra;	AKRB	Ada				
	4	Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional (jika ada);	8	Ada				
8	5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	AKRB	Ada				
	6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan	AKRB	Ada				
	7	Dilengkapi dengan berbagai ilustrasi seperti gambar, tabel, grafik, dan foto sesuai dengan subjek yang disusun.	AKRB	Ada				
	B AKUNTABILITAS KEUANGAN							
	1	Uraian realisasi anggaran yang digunakan;	PA	Ada				
	2	Uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen PK;	PA	Ada				
	3 C	Uraian efisiensi anggaran yang telah dilakukan.	PA	Ada				
	1	CAPAIAN LAINNYA (Opsional)  Uraian capaian kinerja lainnya di luar indikator kinerja yang telah diperjanjikan, misalnya penghargaan yang diperoleh.	AKRB	Ada				
	BAB IV PENUTUP							
9		impulan capaian kinerja organisasi dan upaya ke depan uk meningkatkan kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja	AKRB	Ada				
	LAMPIRAN							
	dita	piran 1: Perjanjian Kinerja (Gambar PK yang telah ndatangani)	AKRB	Ada				
10	Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran		AKRB	Ada				
	Lam	piran 4: Checklist (pada lampiran II) dilakukan oleh Fasilitasi rasional atau Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja	PA AKRB	Ada Ada				